

MENYEMAI DAMAI MELALUI PENDIDIKAN AGAMA

(Pendidikan Budaya Damai
pada SMA di Daerah Pascakonflik)

SAFARI TRUST
FOR PEACE & JUSTICE



Nugroho Eko Atmanto
dan Joko Tri Haryanto

Nugroho Eko Atmanto
dan Joko Tri Haryanto

MENYEMAI DAMAI MELALUI PENDIDIKAN AGAMA



MENYEMAI DAMAI MELALUI PENDIDIKAN AGAMA

Penulis: Nugroho Eko Atmanto dan Joko Tri Haryanto

Tim Peneliti: Wahab, Samidi, Nugroho Eko Atmanto, Aji Sofanudin dan Joko Tri Haryanto

Editor: Siti Muawanah

Tata Sampul: Quella

Tata Isi: Muhammad Shafril Hidayat

Pracetak: Antini, Dwi, Wardi

Cetakan Pertama, November 2020

Penerbit

DIVA Press

(Anggota IKAPI)

Sampangan Gg. Perkutut No.325-B

Jl. Wonosari, Baturetno

Banguntapan Yogyakarta

Telp: (0274) 4353776, 081804374879

Fax: (0274) 4353776

E-mail: redaksi_divapress@yahoo.com

sekred2.divapress@gmail.com

Blog: www.blogdivapress.com

Website: www.divapress-online.com

Bekerjasama dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Jl. Untung Suropati Kav. 70 Bambankerep, Ngaliyan, Semarang

(KP) 50185, Telp. (024) 7601327, Fax. (024) 7611386

Email: bla_semarang@kemenag.go.id

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Nugroho Eko Atmanto dan Joko Tri Haryanto

Menyemai Damai Melalui Pendidikan Agama/Nugroho Eko Atmanto dan Joko Tri Haryanto; editor, Siti Muawanah—cet. 1—Yogyakarta: DIVA Press, 2020

xxxviii + 122 hlmn; 14 x 20 cm

ISBN 978-623-293-130-5

I. Judul

II. Siti Muawanah

SAMBUTAN

KEPALA BALAI PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN AGAMA SEMARANG

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menerbitkan “buku monografi” pada tahun 2020. Penerbitan buku monografi ini terealisasi di tengah Pandemi Covid-19. Hal ini merupakan upaya Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang untuk selalu hadir dan terus berkarya memberikan sumbangan wawasan pengetahuan tentang isu-isu sosial keagamaan berbasis hasil penelitian.

Pada kesempatan ini, kami meluncurkan buku monografi berjudul “Menyemai Damai melalui Pendidikan Agama (Pendidikan Budaya Damai pada SMA di Daerah Pascakonflik)”. Buku monografi ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian para peneliti Balai Litbang Agama Semarang Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan di Kalimantan Barat pada 2016.

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki sejarah konflik antaretnis, khususnya antara etnis pendatang dengan etnis pribumi. Konflik-konflik tersebut

meninggalkan trauma psikologi dan sosial yang tidak mudah disembuhkan. Apalagi, bila sebagian masyarakat terus mereproduksi dan mewariskan konflik masa lalu dalam bentuk cerita ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, perlu upaya untuk mengurangi dan menyembuhkan luka masa lalu, salah satunya melalui pendidikan damai di kalangan pelajar SMA. Inilah yang dipaparkan oleh Nugroho Eko Atmanto dan Joko Tri Haryanto dalam buku ini.

Proses penerbitan monografi ini telah melalui proses pembacaan, telaah, dan penyusunan naskah hasil penelitian ke dalam tulisan artikel yang dilakukan secara serius oleh para peneliti. Buku ini juga telah dievaluasi dari Tim Penjamin Mutu Internal Peneliti (TPMIP) Balai Litbang Agama Semarang. Selain itu, penyuntingan secara ketat juga telah dilakukan oleh para editor yang terpercaya sehingga penerbitan buku monografi ini layak kami banggakan. Dalam kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang telah memberikan kepercayaan dan arahan demi terwujudnya penerbitan buku ini
2. Para pakar yang telah memberikan kontribusi pengetahuan melalui kata pengantar ahli, dan endorsement terhadap buku monografi ini
3. Para editor, baik editor internal maupun eksternal serta editor dari Tim Penjamin Mutu Internal Peneliti (TPMIP) Balai Litbang Agama Semarang
4. Para peneliti yang dengan tulus hati merelakan karya hasil penelitiannya diterbitkan dalam bentuk buku monografi

5. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi terlaksananya program penerbitan buku monografi Balai Litbang Agama Semarang

Kami berharap penerbitan buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah sosial keagamaan serta sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan tentang pelbagai perkembangan dan dinamika sosial keagamaan di Indonesia. Selain itu, buku monografi ini diharapkan dapat menjadi acuan kajian bagi para akademisi, mahasiswa dan para peneliti sosial keagamaan. Kami pun berharap buku monografi ini dapat menjadi informasi keagamaan bagi masyarakat secara luas.

Pada akhirnya, penerbitan buku ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik tampilan ataupun pilihan kata sehingga memerlukan perbaikan, baik berkaitan dengan sisi substansi maupun teknis. Oleh karena itu, kami mengharap kritik dan saran pembaca untuk perbaikan dan penyempurnaan penerbitan selanjutnya. Last but not least, pada akhirnya kami ucapkan selamat membaca dan semoga kami dapat terus berkarya pada tahun-tahun berikutnya.

Semarang, Agustus 2020
Kepala Balai Litbang Agama
Semarang

Dr. Samidi Khalim, S.Ag, M.S.I.

PENGANTAR EDITOR

MENEBAR DAMAI DI BUMI BORNEO

Bukan rahasia apabila Indonesia terkenal sebagai bangsa yang heterogen, bangsa yang majemuk, dan bangsa yang plural. Hal itu dapat dilihat dari beberapa unsur, seperti suku bangsa, agama, dan bahasa. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, tercatat ada 1.430 suku bangsa (INDONESIA.CO.ID., tt.) yang mendiami negara ini. Demikian pula dengan agama yang dipeluk oleh penduduknya. Selain menganut enam agama besar (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu), penduduk Indoneisa juga menganut kepercayaan yang biasa disebut dengan “penghayat” atau “penganut kepercayaan”. Berdasarkan catatan Basuki (2015) sebagaimana dikutip oleh Mustolehudin dan Muawanah (2017:232) terdapat 147 kelompok penghayat hidup di Indonesia. Keberagaman yang tidak dapat diabaikan. Demikian pula dengan ragam bahasa yang digunakan oleh penduduk Indonesia. Pada 2005, 742 bahasa hidup di negara ini Tondo, 2009:278) walaupun sebagiannya sudah hampir punah (Ibrahim, 2011:40; Tondo, 2009:281-284). Semua

keragaman itu pun diakui dan diabadikan dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” di mana kata pertama berarti berbeda-beda.

Di satu sisi, keragaman tersebut merupakan kekayaan kebudayaan yang tidak ternilai harganya, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dapat dikelola dengan baik.

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang dihuni oleh beragam etnis, budaya, dan agama. Program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah menjadi salah satu faktor beragamnya penduduk yang tinggal di Pulau Borneo ini. Pada tahun 70 dan 80an, pulau ini menjadi tujuan utama transmigrasi setelah sebelumnya Pulau Sumatra dan Sulawesi menjadi prioritas tujuan program perpindahan penduduk ini (baca Levang, 2003:25; Dewi, 2013). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila terdapat suku Madura dan Jawa di provinsi ini.

Bukan hanya suku Jawa dan Madura, sejumlah suku pendatang pun mendiami wilayah seluas 146.807 km² ini. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS Tahun 2010, penduduk yang tinggal di provinsi terluas keempat ini adalah Dayak, Melayu, Jawa, Cina, Madura, Bugis, Sunda, Batak, Daya, Banjar, dan Suku Lainnya (Atmanto dan Haryanto, 2020). Mereka memeluk agama yang beragam: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan lainnya.

Seiring perjalanan waktu, para pendatang ini pun berinteraksi dengan penduduk yang lebih dulu tinggal di Kalimantan Barat, baik dengan penduduk asli maupun sesama pendatang. Mereka membangun kehidupan bersama

membangun budaya. Para pendatang ini berasal dari latar belakang suku dan budaya yang berbeda, ada kalanya interaksi antarmereka mengalami gesekan dan benturan. Berdasarkan catatan sejarah, serangkaian konflik antarsuku telah terjadi di Kalimantan Barat. Kejadian konflik yang tercatat paling awal di tahun 1963 yang melibatkan suku Cina Keturunan/Tionghoa dengan suku Dayak hingga terakhir konflik yang terjadi antara suku Madura dengan kelompok lainnya di Pontianak pada 2000. Di antara dua kejadian tersebut serangkaian konflik yang melibatkan beberapa suku pun pecah di Kalimantan Barat, seperti Dayak dengan Tionghoa (1967), Dayak dengan Madura (1979, 1996/1997), dan Melayu dan Dayak dengan suku Madura (1999) (Atmanto dan Haryanto, 2020; Al-Humaidy, 2007: 191).

Konflik antarsuku yang bertubi-tubi yang melanda Kalimantan Barat ini tak pelak menyisakan trauma, menyisakan kenangan buruk dalam hubungan antarsuku yang tinggal di sana. Hal itu diperparah ketika masyarakat sering mereproduksi peristiwa berdarah antarsuku untuk diwariskan kepada generasi berikutnya sehingga luka sejarah tidak akan dapat sembuh segera.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengobati luka akibat konflik tersebut adalah dengan menanamkan pendidikan damai di generasi muda. Siswa sekolah adalah siswa yang tepat untuk memulai pemahaman baru tentang hubungan bersama dalam anggota masyarakat yang saling berbeda. Siswa SMA adalah siswa yang paling tepat karena ia akan segera menjadi anggota masyarakat.

Penanaman budaya damai dapat dilakukan melalui banyak jalan, salah satunya adalah melalui pendidikan

agama di sekolah. Inilah yang dilakukan oleh Nugroho Eko Atmanto dan Joko Tri Haryanto dalam buku ini. Buku ini memaparkan bagaimana pendidikan damai dapat disemai-kan di ruang pendidikan formal. Praktiknya, pendidikan damai tidak harus menjadi satu materi atau mata pelajaran tersendiri, tetapi cukup terintegrasi dalam muatan-muatan pendidikan agama yang telah ada. Nilai-nilai pendidikan damai dapat diambil dari materi-materi pendidikan agama yang diajarkan di sekolah. Bukan itu saja, pendidikan damai juga dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan ekstra-kurikuler yang melibatkan siswa dari berbagai agama.

Akhirnya, semoga kehadiran buku yang ditulis oleh Atmanto dan Haryanto ini menjadi sumbangsih anak negeri bagi kehidupan yang rukun, damai, toleran, dan harmonis di Bumi Borneo. Dari sana, semangat persatuan dan kesatuan akan membara dan menjalar ke seluruh Nusantara sehingga semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” benar-benar menjadi nyata.

Daftar Bacaan

- Dewi, Septiyani. 2013. “Para Transmigran di Desa Rasau Jaya I Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat Tahun 1971-1979. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Unnes
- Al-Humaidy, Muhammad Ali. “Analisis Stratifikasi Sosial sebagai Sumber Konflik Antaretnik di Kalimantan Barat”. *Karsa* 13(2):186-195
- Ibrahim, Gufran Ali. 2011. “Bahasa Terancam Punah: Fakta, Sebab Musabab, Gejala, dan Strategi Perawatannya”. *Linguistik Indonesia* 29(1):35-52
- Levang, Patrice. 2003. *Ayo Ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indoensia* (terj.) Jakarta: KPG
- Mustolehudin dan Siti Muawanah. 2017. “Polemik Pengisian Kolom Agama di KTP bagi Penganut Aliran Kepercayaan (Studi pada Media Cetak, On line, dan Media Cetak pada November 2014”. *Jurnal SMART* 3(2):231-242

Tondo, Fanny Henry. 2009. “Kepunahan Bahasa-bahasa Daerah: Faktor Penyebab dan Implikasi Etnolinguistik”.
Jurnal Masyarakat & Budaya 11(2):277-296

PENGANTAR AHLI PENDIDIKAN DAMAI: PERKEMBANGAN, BENTUK DAN KONTEKS INDONESIA

Ahwan Fanani

Perkembangan Pendidikan Damai

Pendidikan damai adalah salah satu tema yang mengemuka sejak sepuluh tahun lalu. Sebagai satu rumusan, pendidikan damai masuk ke Indonesia dari negara-negara maju yang telah terlebih dahulu mengembangkannya. Arti penting pendidikan damai meningkat dalam konflik-konflik yang terjadi di Indonesia pascaruntuh Orde Baru dan pada awal era Reformasi. Pada saat itulah, resolusi konflik, termasuk mediasi, dan pendidikan damai dilirik keberadaannya untuk turut menormalisasi kondisi sosial yang mengalami keguncangan akibat reformasi tahun 1998.

Di beberapa negara, pendidikan damai sudah berkembang sejak lama. Di Eropa pendidikan damai berkembang pasca Perang Dunia I dengan Maria Montessori sebagai salah satu pelopornya. Pendidikan damai awalnya diorientasikan untuk memberikan pemahaman kepada para siswa mau-

pun orang tua bahwa perang itu bukan solusi yang baik. Pendidikan damai kemudian masuk sebagai salah satu program sekolah. Di Amerika Serikat, pendidikan damai berkembang pesat pada tahun 1970 dan 1980-an dengan tokoh-tokoh seperti Betty A. Reardon dengan fokus pengembangan pada pendidikan formal.

Pendidikan damai berkembang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Keanekaragaman orientasi pendidikan damai tidak lepas dari konteks sosial politik dan bentuk konflik yang umum terjadi di berbagai negara. Di beberapa wilayah Afrika Utara, anak-anak kecil direkrut untuk menjadi tentara dalam konflik antara pemberontak dengan pemerintah. Di Afghanistan, anak-anak kecil menjadi korban kekerasan dan *broken home* hingga harus bekerja untuk membantu ibu-ibu mereka yang menjanda. Di Brazil dan sebagian wilayah Amerika Selatan, perang antargeng mewarnai kehidupan kaum muda. Di Bosnia Herzegovina pascakonflik akibat pecahnya Yugoslavia, anak-anak menyaksikan kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh para tetangga mereka yang beda etnis dan agama hingga pembantaian massal terhadap kaum ibu dan anak-anak.

Pendidikan damai semakin berkembang dengan adanya dukungan konseptual dari Johan Galtung yang menyediakan landasan bagi pencapaian *peace culture* (*budaya damai*). Konsepsi Galtung mengenai damai positif dan damai negatif turut memperluas wilayah kajian operasional pendidikan damai (Hicks, 1988: 6). Pendidikan damai pun berkembang sebagai bagian dari penciptaan damai positif atau damai dalam satu struktur dan budaya masyarakat.

Berdasarkan pembagian Galtung di atas, Betty A. Reardon (1988: 16) memetakan pendidikan damai pada tahun 1980-an menjadi pendidikan damai untuk *negative peace* dan pendidikan damai untuk *positive peace*. Reardon memetakan fase-fase pendidikan damai, yaitu 1) fase pendekatan reformasi, 2) fase rekonstruksi, dan 3) fase transformasi. Fase reformasi dimulai semenjak akhir perang dunia II. Tujuan pendekatan reformasi adalah mencegah terjadinya perang dengan mengontrol perlombaan senjata dengan mengubah perilaku orang untuk lebih membuka alternatif bagi solusi nonkekerasan.

Fase rekonstruksi terjadi mulai tahun 1960-an. Tujuan pendekatan rekonstruksi tidak lagi kepada perilaku, melainkan kepada sistem internasional. Arah pendekatan itu adalah perubahan institusional untuk memapankan institusi internasional guna penyelesaian konflik.

Sementara itu, fase transformasi menjadi landasan yang lebih luas dalam penciptaan perdamaian, tidak hanya menolak kekerasan, tetapi juga membuat kekerasan sebagai tindakan yang tidak bisa diterima, baik dalam level individu, sosial, maupun kebijakan negara. Fase transformasi berkembang sejalan dengan perkembangan gagasan *positive peace*. Perubahan yang dikehendaki pendekatan transformatif tidak hanya dalam tataran perilaku dan insitusi, melainkan juga dalam tataran pemikiran dan pembentukan nilai (Reardon, 1988: xi).

Pendidikan damai diangkat oleh lembaga tinggi PBB, UNICEF, sebagai bagian dari orientasinya. Pada tahun 1990, dokumen-dokumen UNICEF telah menekankan komitmen untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, dan

keterampilan yang diperlukan peserta didik untuk hidup damai dalam dunia yang saling terhubung (Fountain, 1999: 1). UNICEF menggarisbawahi bahwa pendidikan dan proses pembelajaran perlu ditekankan untuk membentuk modal manusia untuk pertumbuhan ekonomi dan modal sosial untuk toleransi dan penghormatan kepada pihak lain serta partisipasi untuk menghadapi kekerasan kultural yang mengancam keluarga dan masyarakat.

Pada perkembangannya pendidikan damai menjadi bidang yang interdisipliner atau bahkan transdisipliner. Pendidikan damai menjadi kajian interdisipliner karena di dalamnya merangkum berbagai ilmu lain yang saling bersinergi. Pendidikan damai mengandung ilmu pendidikan, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu resolusi konflik, dan ilmu agama. Pendidikan damai menjadi kajian transdisiplin karena sebagai kajian praktis, ia melibatkan berbagai keahlian untuk menyelesaikan satu masalah dan membuat rumusan untuk perbaikan.

Bentuk-Bentuk Pendidikan Damai

Dengan beragamnya tantangan dan konflik yang dihadapi oleh berbagai negara, maka pendidikan damai berkembang sesuai dengan kebutuhan di masing-masing tempat. Sara Clark-Habibie, salah seorang aktivis International Education for Peace Kanada, mencatat tiga bentuk pendidikan damai yang umum ia temui, yaitu pelatihan resolusi konflik, pendidikan demokrasi, dan pelatihan hak asasi manusia (Clark-Habibie, 2005: 35-37).

Sementara itu, Betty Reardon, dari Amerika Serikat, memetakan ragam pendidikan damai dengan menggunakan dua kategori perdamaian yang dikemukakan oleh Johan Galtung, yaitu *negative-peace* dan *positive-peace*. Pendidikan damai dalam kerangka *negative peace* mencakup 1) pendidikan untuk mengatasi konflik atau kekerasan ideologi; 2) pendidikan untuk mengatasi konflik bersenjata; 3) pendidikan untuk meningkatkan saling memahami; dan 4) pendidikan untuk mengatasi kurangnya mekanisme resolusi konflik. Sementara itu, pendidikan damai dalam konteks *positive peace* bisa mengambil bentuk: pendidikan lingkungan, pendidikan pembangunan, dan pendidikan hak asasi manusia. Jadi, spektrum pendidikan damai menjadi semakin kaya dengan berbagai tujuan dan pendekatan berbeda dalam mengatasi konflik.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa contoh dari bentuk pendidikan damai. Bentuk-bentuk tersebut sudah berkembang di berbagai negara.

1. Pendidikan Resolusi Konflik

Pendidikan resolusi konflik, sebagai mata pelajaran mengandung tiga kompetensi dasar, yaitu: pemahaman konflik, analisis konflik, dan bentuk-bentuk resolusi konflik. Ketiganya menjadi satu mata rantai antara pemahaman (konsep), kemampuan memetakan masalah, dan keterampilan menggunakan berbagai sarana penyelesaian konflik.

2. *Peer-Mediation* (Mediasi Teman Sebaya)

Peer-mediation atau mediasi teman sebaya adalah program pendidikan damai yang diperkenalkan ke

sekolah-sekolah dengan mekanisme utama mediasi. Mediasi adalah mekanisme penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang bertindak secara *fair* dan tidak memihak untuk memfasilitasi komunikasi dan penyelesaian masalah. *Peer-mediation* berkembang utamanya di negara-negara Australia, Selandia Baru, dan Negara-Negara Eropa sejak tahun 1980-an. Thomas Lickona mengintegrasikan *peer-mediation* ke dalam pendidikan karakter. *Peer-mediation* dimasukkan sebagai salah satu karakter yang dikembangkan di kalangan peserta didik untuk mampu menyelesaikan masalah atau sengketa mereka secara damai.

Di Indonesia, *peer-mediation* didiseminasikan oleh DBE USAID. *Program peer-mediation* dijalankan sebagai pelatihan siswa untuk menjadi mediator di antara sesama mereka (DBE USAID Indonesia, 2006). Program *peer-mediation* diintegrasikan ke dalam struktur organisasi siswa intrasekolah. Materi pendidikan *peer-mediation* di sekolah meliputi aspek konseptual, aspek nilai, dan keterampilan. Sayang, perkembangan dari *peer-mediation* belum tampak menggembirakan dengan kurangnya fokus lembaga pendidikan kepada persoalan mediasi teman sebaya yang menuntut keterlibatan seluruh komponen sekolah.

3. Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pendidikan hak asasi manusia adalah bentuk pendidikan damai yang menekankan kepada kesadaran warga negara terhadap hak dan posisi negara sebagai penjaga hak masyarakat. Pendidikan HAM lahir dari

kenyataan bahwa pendidikan menjadi wahana paling efektif untuk menanamkan kesadaran mengenai hak sebagai warga negara sekaligus kewajiban untuk menghormati hak orang lain.

Asumsi dasar pendidikan hak asasi manusia adalah bahwa kesadaran mengenai HAM di kalangan individu dan warga masyarakat akan mendukung kemampuan mereka untuk memelihara hak mereka sendiri dan menghormati hak asasi sesama warga negara. Kesadaran itu akan membantu tumbuhnya kekuatan sosial dan mendukung kepada penguatan institusi negara.

Pendidikan hak asasi manusia mendapatkan perhatian dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Pada 10 Oktober 2004, PBB meluncurkan Program Dunia tentang Pendidikan HAM yang didasarkan atas Deklarasi PBB tentang *Decade for Human Right Education 1995-2004*.

Program Dunia PBB itu ditujukan untuk mempromosikan pemahaman tentang prinsip dasar dan metodologi pendidikan HAM serta untuk menyediakan kerangka nyata bagi penguatan kerja sama dari tingkat internasional hingga tingkat akar rumput (www.ohchr.org, 06 Januari 2019).

Menurut Holland dan Martin (2014: 5), pendidikan HAM dilakukan untuk mengembangkan tiga gagasan pedagogis utama. Tiga gagasan tersebut adalah relevansi lokal, pembelajaran berorientasi tindakan, dan dampak transformatif. Relevansi lokal menyangkut promosi diskursus terbuka dan bebas sehingga hak asasi manusia bisa masuk ke alam pikiran peserta didik dan ke dalam budaya lokal. Orientasi tindakan dalam pembelajaran

menekankan bahwa proses pembelajaran dimaksudkan untuk menyediakan ruang bagi semua individu agar merayakan tindakan yang sejalan dengan nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, dampak transformatif dimaksudkan untuk mengubah para pendidik agar mampu membantu masyarakat menegakkan kondisi yang menawarkan kebebasan, penghormatan, dan sikap nirkekerasan.

4. Pendidikan Multikultural

Pendidikan Multikultural lahir dari negara-negara yang mengembangkan kebijakan multikulturalisme. Kebijakan tersebut diinisiasi di negara-negara dengan latar penduduk yang multi-etnis atau multiras. Di Amerika muncul konsep *melting pot* untuk menggambarkan bahwa Amerika Serikat merupakan tempat pertemuan aneka budaya yang membaur menjadi budaya Amerika. Keanekaragaman kelompok kultural di sebuah negara bisa dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu 1) negara dengan kelompok kultural yang dominan adalah kalangan pendatang, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia dan 2) negara dengan kelompok kultural yang dominan berasal dari penduduk setempat.

Keanekaragaman latar penduduk melahirkan empat model kebijakan multi-etnis atau multikultur, yaitu: model asimilasi, model integrasi individu, model multikulturalisme, dan model kosmopolitanisme. Model pertama berupaya mengelola perbedaan dengan mendorong minoritas menyesuaikan diri terhadap budaya dominan. Model kedua mirip dengan model pertama,

namun menekankan pada poses individual untuk berintegrasi kepada sistem sosial yang mapan. Model multi-kulturalisme menekankan pada konsep kesetaraan dengan melihat keunikan budaya masing-masing kelompok. Terakhir, model kosmopolitanisme menerima perbedaan seraya meniadakan konsep kelompok (Moodod, 2011: 4-5).

Pendidikan multikultural menghargai keanekaragaman pluralisme budaya dan menolak penyeragaman budaya. Sekolah menjadi tempat merayakan keanekaragaman tersebut. Melalui pendidikan multikultural, perbedaan budaya diakui dan kesetaraan budaya itu dipandang serta memiliki makna penting (Ramsey, Williams, and Vold, 2003: 17). Pendidikan multikultur menjadi bagian pendidikan damai karena menyediakan mode untuk berinteraksi secara damai dan mapan antarkelompok kultural yang berbeda.

Pendidikan Damai di Indonesia

Pendidikan damai di Indonesia, sebagai sebuah pendekatan khusus dalam pendidikan, masih relatif baru. Nilai-nilai dasar pendidikan damai sudah lama dikembangkan dalam dunia pendidikan di Indonesia, namun pengarusutamaan pendidikan damai di Indonesia baru tampak pada masa Reformasi. Masa Reformasi di Indonesia ditandai dengan kegoncangan sistem sosial dari masyarakat yang terbiasa hidup dalam kekuatan Pemerintah menjadi masyarakat yang lebih terbuka dan partisipatif.

Pendidikan damai di Indonesia menghadapi konteks sosial yang khas, yaitu dinamika sosial dan politik yang dihadapi masyarakat Indonesia. Ada tiga persoalan pokok yang dihadapi dunia pendidikan sehingga memerlukan adanya pengarusutamaan pendidikan damai, yaitu:

1. Kondisi Pascakonflik

Sejak tahun 1998, Indonesia mengalami rangkaian konflik sosial yang berkepanjangan. Guncangan sosial akibat perubahan orde politik melahirkan kegelisahan sosial dan perbenturan sosial baik secara horizontal maupun vertikal. Tercatat konflik di Indonesia merentang antara konflik antaretnis (seperti di Kalimantan), konflik bernuansa agama (seperti di Ambon dan Poso), persoalan pembangunan rumah ibadah (di berbagai wilayah), konflik antarkelompok intraagama (Konflik Ahmadiyah di Parung), konflik antarpendukung partai politik (seperti di Jepara), kerusuhan massa (seperti di Banjarmasin), penjarahan dan kekerasan (seperti di Jakarta tahun 1998), tawuran antarkampung (sebagaimana terjadi di berbagai wilayah Pantura Jawa Tengah), konflik pasca Referendum (di Timor Leste), dan tawuran antarpelajar (lihat misalnya Ecip, 2002; Mas'ood dan Budhi, 1997).

Berbagai kondisi itu melahirkan kesadaran di kalangan pendidik bahwa pendidikan harus memainkan peran untuk merajut kembali ikatan sosial dan kedamaian. Pendidikan damai berfungsi untuk menguatkan nilai sebagai basis hubungan sosial dan menumbuhkan kesadaran untuk hidup berdampingan

antarkelompok secara damai. Fungsi itu memperoleh momentum pada masyarakat yang sudah mengalami konflik dan dalam proses untuk normalisasi kehidupan.

Pendidikan damai dalam kondisi tersebut menjadi salah satu pendekatan untuk mengobati trauma dan mengembalikan kepercayaan di antara sesama anggota masyarakat. Danesh dalam bukunya, *Education For Peace* menegaskan bahwa perdamaian adalah hasil dari penerapan menyeluruh dari pandangan dunia yang berbasis perdamaian dalam setiap aspek kehidupan, identitas, hubungan, pembelajaran, profesi, organisasi massa, dan kepemimpinan (Danesh and Sara Clark, 2006: 306). Tujuan tertinggi pendidikan damai adalah untuk menanamkan peradaban damai di seluruh dunia, melalui pengembangan pandangan dunia yang berdasarkan kesatuan, penciptaan budaya damai, penciptaan budaya penyembuhan (*culture healing*), dan penggunaan pendidikan damai sebagai kerangka aktivitas pendidikan.

Pendidikan damai pascakonflik berfungsi sebagai *peace building*, yaitu upaya melanggengkan perdamaian secara struktural dan kultural. Perdamaian secara struktural bermakna adanya sistem yang dapat menopang perdamaian dan menyelesaikan persengketaan yang mungkin muncul. Perdamaian secara kultural berarti adanya landasan nilai yang menjadi basis bagi perdamaian struktural maupun perdamaian langsung antara pihak-pihak yang ada dalam masyarakat.

Pendidikan damai di Indonesia dengan demikian tidak lepas dari potret konflik yang sedemikian masif dan beragam yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Pendidikan damai merupakan respon dunia pendidikan untuk turut menstabilkan hubungan sosial dan menciptakan perdamaian di antara sesama anak bangsa.

2. Isu Multikultur

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi-kultur, yaitu masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok kultural. Ada enam agama resmi yang diakui negara, selain ratusan aliran kepercayaan hidup di masyarakat. Ada 300 bahasa yang dipakai di Indonesia dengan berbagai suku bangsa yang menggunakannya. Ada pula isu lokal yang menyeruak pasca-Reformasi dengan tuntutan desentralisasi kebijakan politik.

Persoalan itu menunjukkan bahwa pluralitas kelompok sosial menjadi tantangan yang harus dihadapi. Isu multikultur ini berkembang dari bagaimana seharusnya antarkelompok berinteraksi secara setara dan saling menghormati. Derivasi dari persoalan multikultur adalah munculnya isu intoleransi dan tantangan kebhinekaan.

Indonesia tidak secara eksplisit dan resmi menerapkan kebijakan multikulturalisme, sebagaimana Australia dan Kanada. Doktrin kesatuan bangsa dan kesatuan negara memberikan ruang minor bagi pengakuan dan langkah afirmatif terhadap suku bangsa tertentu. Sejak masa Orde Baru, upaya mengangkat kesenian dan kebudayaan khas daerah sudah digalakkan oleh pemerintah. Pemerintah juga mengangkat pahlawan nasional yang mewakili daerah-daerah di Indonesia.

Namun, pendekatan tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan hubungan mayoritas dan minoritas

dalam agama dan akses politik masyarakat asli di beberapa wilayah. Aksi-aksi teror terhadap rumah-rumah ibadah agama tertentu turut memperburuk persoalan hubungan antarkelompok kultural dan perebutan tanah antara penduduk asli dan pendatang yang juga terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Pendidikan damai di sekolah banyak ditekankan kepada nilai saling menghormati, nilai toleransi, dan nilai kebhinekaan (pluralitas kelompok kultural). Pendidikan damai ini masih terkait dengan kondisi pasca-konflik karena berbagai konflik di Indonesia melibatkan kelompok-kelompok sosial dengan latar identitas kultural yang berbeda.

3. Persoalan Remaja

Persoalan remaja menjadi tantangan bagi sekolah yang aman dan damai bagi pertumbuhan remaja. Salah satu tujuan utama pendidikan damai adalah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan sehat bagi pertumbuhan pikiran dan mental peserta didik. Kekerasan terhadap peserta didik menghambat pertumbuhan pikiran dan mental bahkan ada kalanya menimbulkan korban jiwa. Kekerasan di sekolah, menurut Miller dan Kraus (2008: 15) mencakup berbagai perilaku, seperti viktimisasi terhadap siswa atau guru, serangan terhadap siswa atau guru, eksploitasi fisik dan psikologis, perundungan (*bullying*), ancaman *via* media sosial *online*, tawuran, kekacauan di kelas, pelecehan seksual, dan keberadaan senjata tajam di sekolah .

Persoalan para pelajar di Indonesia sering disebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu merentang dari penyalahgunaan obat terlarang, tawuran antarpelajar, seks di luar nikah hingga *bullying* atau perundungan. Persoalan-persoalan itu menjadi tantangan di sekolah-sekolah di Indonesia saat ini. Penyalahgunaan narkoba menjadi isu nasional dan mendapatkan penanganan khusus dari pemerintah. Tawuran antarpelajar masih terjadi di sana dan tidak jarang menimbulkan korban jiwa (kematian) dan luka. Tawuran antarpelajar di Indonesia diwarnai penggunaan senjata tajam, seperti gir dan clurit sehingga mengandung resiko yang berat.

Berita tentang perundungan antarpelajar sering muncul di media informasi. Perundungan dilakukan oleh teman-teman satu sekolah, baik dalam bentuk kekerasan verbal maupun nonverbal. Perundungan mengakibatkan ketakutan dan trauma korban sehingga mengganggu proses perkembangan jiwanya dalam pendidikan.



Daftar Bacaan

- Betty A. Reardon. 1988. *Comprehensive Peace Education: Educating for Global Responsibility*. New York and London: Teachers College Press
- David Hicks. 1988. “Understanding the Field” dalam David Hicks (ed.). *Education for Peace*. London, New York: Routledge
- DBE USAID Indonesia. 2006. *Mediasi Teman Sebaya (Toolkit)*. November 2006
- Fountain, Susan. 1999. *Peace Education in UNICEF*. New York: Working Papers Education Section, Programme Division UNICEF
- Hossein B. Danesh and Sara Clark. 2006. *Education for Peace, Curriculum Manual: a Conceptual and Practical Guide*. Vancouver: EFP Press
- Muhtar Mas’oed dan Setia Budhi. 1997. *Amun Banjarmasin*. Jakarta: Yayasan Bantuan Lembaga Hukum Indonesia

- Patricia G Ramsey, Leslie R. Williams dan Edwina Battle Vold. 2003. *Multicultural Education: A Source Book*. New York: RoutledgeFalmer
- Sara Clark-Habibie. 2005. "Transforming Worldviews: The Case of Education for Peace in Bosnia Herzegovina". *Journal of Transformative Education* 3(1)
- S. Sinansari Ecip. 2002. *Rusuh Poso, Rujuk Malino*. Jakarta: Cahaya Timur
- Tareeq Moodod. 2011. *Multiculturalism and Integration: Struggling with Confusions*. Fiesole Italy: European University Institute

PRAKATA PENULIS

Rasa syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa. Atas limpahan nikmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul “Menyemai Damai Melalui Pendidikan Agama (Pendidikan Budaya Damai pada SMA di Daerah Pasca-konflik)” ini. Penyusunan buku ini didasarkan pada hasil penelitian pendidikan budaya damai pada wilayah pasca-konflik di Kalimantan Barat. Penelitian dilakukan oleh peneliti Balai Litbang Agama Semarang di tahun 2016.

Buku ini mencoba mendeskripsikan temuan di tiga wilayah yang pernah mengalami dan terdampak konflik sosial, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat. Konflik sosial di Kalimantan Barat menyisakan sejarah kelam yang sudah semestinya dapat diperbaharui menjadi sejarah relasi yang penuh dengan perdamaian. Konflik sosial di Kalimantan Barat telah terjadi beberapa kali, bahkan menjadi intens menjelang reformasi di tahun 1996/1997, tahun 1998/1999

dan tahun 2000 yang melibatkan etnis Melayu, Dayak, dan Madura. Konflik ini berdampak secara jangka panjang dalam konteks relasi sosial antarkelompok masyarakat di Kalimantan Barat.

Trauma psikologi dan sosial akibat konflik tersebut tentu mengganggu proses integrasi sosial masyarakat, terutama antarkelompok yang berkonflik. Terlebih pengaruhnya terhadap generasi muda menjadikan adanya stereotip, kecurigaan, bahkan kebencian terhadap kelompok lain. Pandangan negatif terhadap kelompok lain yang menjadi lawan dalam konflik masih direproduksi dalam ingatan kolektif masyarakat di Kalimantan Barat. Hal ini menyebabkan kebuntuan dalam mencari resolusi bagi penanggulangan trauma sosial dan akhirnya juga menghambat proses integrasi sosial di lingkungan masyarakat.

Salah satu jalur penting memulai fajar baru dalam membangun kembali perdamaian di masyarakat yang terkoyak oleh konflik adalah melalui penanaman nilai-nilai perdamaian. Benih-benih perdamaian ini perlu disemai sehingga tumbuh menjadi sikap hidup yang pada akhirnya menjadi budaya damai. Perdamaian yang dimaksud adalah suatu kondisi di mana masyarakat meniadakan jalan kekerasan baik langsung maupun tidak langsung dalam sistem sosial politik dan budayanya. Perdamaian yang mendorong terwujudnya sistem sosial yang menghapus diskriminasi sosial, menegasikan kekerasan, menuntut kesetaraan dan keadilan, serta mewujudkan situasi harmoni, rukun, dan damai dalam masyarakat.

Sementara lahan yang sangat subur dan dibutuhkan untuk menyemai benih-benih perdamaian ini adalah

generasi muda yang menjadi harapan masa depan masyarakat. Generasi baru yang nantinya akan menentukan bagaimana corak budaya damai ini dapat berkembang dan berbuah perdamaian. Oleh karena itu, lingkungan sekolah menjadi penting dalam persemaian nilai-nilai perdamaian ini. Bagaimana sekolah menciptakan lingkungan yang mendorong penghayatan terhadap nilai-nilai perdamaian dan harmoni; dan bagaimana ruang kelas dalam konteks belajar mengajar juga menanamkan nilai-nilai pendidikan budaya damai.

Seluruh nafas pendidikan di lingkungan sekolah semestinya menjadi energi bagi terwujudnya budaya perdamaian. Terlebih pendidikan agama yang merupakan kompilasi ajaran-ajaran luhur ketuhanan yang berisi sikap dan budi pekerti di samping keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap damai menjadi bagian dari jalan dan sekaligus tujuan dari pendidikan agama. Tujuan pendidikan agama adalah terwujudnya peserta didik yang kuat iman dan takwa. Hasil ini akan terlihat dalam bentuk sikap dan perilaku sosial yang positif di antaranya adalah sikap damai dalam kehidupan.

Berangkat dari hal tersebut, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, khususnya bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan melaksanakan penelitian pada tahun 2016 tentang pendidikan budaya damai melalui pendidikan agama di sekolah-sekolah daerah pascakonflik. Penelitian ini merupakan upaya mendapatkan gambaran pendidikan di sekolah khususnya pendidikan agama dalam mendukung terwujudnya budaya perdamaian terutama di wilayah yang memiliki pengalaman konflik di Kalimantan Barat. Tiga wilayah yang dipilih adalah Kota Pontianak,

Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas. Sasaran penelitian mencakup sekolah negeri maupun swasta di tingkat SLTA, di mana tehnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, FGD, serta telaah dokumen dan sumber-sumber sekunder.

Hasil penelitian tersebut telah diseminarkan dan direview oleh pakar di bidang pendidikan dan *peace studies* dari Walisongo Mediation Center (WMC). Hasil penelitian dirasakan penting untuk diterbitkan sehingga dapat memberi manfaat bagi khalayak yang lebih luas. Oleh karena itu, hasil penelitian tim pendidikan Balai Litbang Agama Semarang ini diproses untuk diolah dan diedit menjadi sebuah monograf. Draf buku ini didiskusikan secara internal di Balai Litbang Agama Semarang dan dikonsultasikan kepada Dr. Ahwan *Fanani*, M.Ag., dosen UIN Walisongo Semarang yang aktif dalam kajian perdamaian di Walisongo Mediation Center (WMC).

Demikianlah proses buku ini dapat hadir di tangan para pembaca. Kehadiran buku ini telah melibatkan banyak dukungan yang harus kami sampaikan rasa terima kasih kami selaku penulis. Ucapan terimakasih yang pertama kepada Kepala Balai Litbang Agama Semarang yang telah memfasilitasi kegiatan penelitian dan penerbitan buku tentang pendidikan budaya damai ini. Rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Dr. Ahwan *Fanani*, M.Ag. yang telah mendampingi, menelaah dan memberi masukan-masukan untuk buku ini, dan juga Siti Muawanah yang bersedia melakukan editing dan memoles tulisan ini sehingga layak untuk dipersembahkan pada para pembaca. Kepada para peneliti yang melakukan penelitian di Kalimantan Barat kami mengucapkan terima

kasih yang tak terhingga. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran struktural dan administrasi Balai Litbang Agama Semarang dan pihak-pihak lain yang telah memberi dukungan hingga buku “Menyemai Damai Melalui Pendidikan Agama (Pendidikan Budaya Damai pada SMA di Daerah Pascakonflik)” ini dapat terbit. Terima kasih juga kami sampaikan kepada penerbit DIVA press Yogyakarta yang berkenan menerbitkan risalah ini.

Tidak ada gading yang tak retak, demikian kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini pasti memiliki kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran senantiasa kami nantikan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi sekolah-sekolah dan pegiat perdamaian. Selamat membaca.

Semarang, Agustus 2020

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA SEMARANG	iii
PENGANTAR EDITOR	vii
PENGANTAR AHLI	xiii
PRAKATA PENULIS	xxix
DAFTAR ISI	xxxv
DAFTAR TABEL	xxxvii
 MENCARI TUNAS DAMAI DI LADANG PASCAKONFLIK	 1
 MENYOROTI DAMAI DAN KONFLIK, PENDIDIKAN DAMAI, SERTA PENDIDIKAN AGAMA ..	 13
Memahami Damai dan Konflik	13
Pendidikan Budaya Damai	21
Pendidikan Agama	27
 MENGENAL KALIMANTAN BARAT DAN DAERAH PASCA KONFLIK	 33
Sosiokultural Kalimantan Barat	33
Tiga Wilayah dalam Sejarah Konflik	43

DARI SEKOLAHAN MEMBANGUN PERDAMAIAN.....	59
Menenal SMA di Wilayah Pascakonflik	59
Budaya Damai di SMA Wilayah Pascakonflik.....	67
PENDIDIKAN AGAMA SEBAGAI PENDIDIKAN DAMAI	81
Kebijakan Pendidikan Agama.....	81
Pendidikan Agama dan Pendidikan Budaya Damai.....	84
Menyemai Nilai Perdamaian melalui Pendidikan Agama	92
PENDIDIKAN AGAMA BAGI PERDAMAIAN BANGSA	97
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	109
BIODATA PENULIS.....	119

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1.** Kondisi Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar di Kalimantan Barat Tahun 2018/2019
- Table 3.2** Kondisi Pendidikan Menengah di Kalimantan Barat Tahun 2018/2019
- Tabel 3.3** Kondisi Perguruan Tinggi Umum di Kalimantan Barat tahun 2017/2018
- Tabel 3.4** Kondisi Perguruan Tinggi Agama di Kalimantan Barat Tahun 2017/2018
- Tabel 3.5** Komposisi penduduk berdasarkan agama tahun 2018
- Tabel 3.6** Komposisi Etnis di Kalimantan Barat Tahun 2010
- Tabel. 3.7** Jumlah Penduduk Kota Pontianak Berdasarkan Etnis
- Tabel. 3.8** Jumlah Penduduk Kota Pontianak Berdasarkan Agama

- Table 3.9** Jumlah Sekolah, Guru , dan Siswa SMA di Kota Pontianak 2017/2018
- Tabel 3.10** Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa SMK di Kota Pontianak 2017/2018
- Tabel 3.11** Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa Madrasah Aliyah di Kota Pontianak
- Tabel 3.12** Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2020
- Table 3.13** Jumlah Sekolah, Guru , dan Siswa SMA di Kabupaten Bengkayang Tahun 2018
- Tabel 3.14** Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa SMK di Kabupaten Bengkayang Tahun 2018
- Tabel 3.15** Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa Madrasah Aliyah di Kabupaten Bengkayang Tahun 2018
- Tabel 3.16** Komposisi Umat Beragama di Kabupaten Sambas 2019
- Table 3.17** Jumlah Sekolah, Guru , dan Siswa SMA di Kabupaten Sambas Tahun 2019
- Tabel 3.18** Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa SMK di Kabupaten Sambas Tahun 2019
- Tabel 3.19** Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa Madrasah Aliyah di Kabupaten Sambas Tahun 2019
- Tabel 5.1** Jumlah siswa berdasarkan agama

MENCARI TUNAS DAMAI DI LADANG PASCAKONFLIK

Penduduk Kalimantan Barat terdiri dari bermacam-macam suku dengan karakter dan budaya masing-masing. Suku-suku tersebut adalah Dayak, Melayu, Bugis, Jawa, Madura, dan Cina/asing (Ishak, 2003). Perbedaan suku dan adat istiadat ini, di satu sisi merupakan kekayaan budaya yang tak ternilai harganya, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan konflik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kekayaan budaya ini perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan konflik antaretnis di kemudian hari.

Alqadrie (1999) dalam Arkanudin (2005: 1986) mencatat bahwa di Kalimantan Barat selama kurun tahun 1962 sampai dengan 1999 telah terjadi konflik dengan kekerasan sebanyak 11 kali. Hal ini mengindikasikan bahwa frekuensi konflik yang disertai kekerasan di Kalimantan Barat cukup tinggi. Konflik antaretnis yang pernah terjadi di Kalimantan Barat dan dalam skala yang cukup besar adalah konflik antaraetnis Melayu, Dayak, dan Madura. Konflik antaretnis

ini terjadi di Sanggau-Ledo Kabupaten Bengkayang yang terjadi antara Desember 1996 sampai dengan Maret 1997 yang melibatkan etnis Dayak dan Madura. Sedangkan konflik antaretnis di Sambas tahun 1999 melibatkan etnis Melayu, Madura dan ditambah keterlibatan etnis Dayak yang berada di pihak Melayu. Konflik ini berakhir dengan “terusirnya” etnis Madura dari Sambas yang kemudian direlokasi ke Pontianak (Cahyono et al., 2008: 3).

Menurut Yohanes Bahari, anggota Dewan Penasehat Adat Dayak Kalbar dan Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Tanjungpura, terdapat empat penyebab konflik etnis di Kalimantan Barat. Pertama, kesenjangan akses individu dan kelompok masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Kedua, interaksi antar-kelompok yang memiliki orientasi, nilai, dan kepentingan yang berbeda. Ketiga, persaingan memperoleh kekuasaan formal dan informal. Keempat, ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang bersifat struktural dan sistemik (Handoko, 2012).

Banyaknya konflik yang masih sering terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa budaya damai belum sepenuhnya menjadi karakter masyarakat Indonesia yang dikenal ramah tamah. Konflik antarsuku atau etnis masih saja terjadi baik dalam skala kecil maupun besar. Adanya interaksi antara dua etnis inilah yang kemudian memunculkan konflik antaretnis. Menurut Soekanto (1982), ketika dua kelompok masyarakat berinteraksi atau berhubungan maka yang terjadi ada beberapa kemungkinan, yaitu: kerjasama, konflik, dan akomodasi. Konflik inilah yang bila tidak diselesaikan atau dikelola dengan baik akan membawa efek negatif yang berlarut-larut.

Konflik sebenarnya adalah suatu permasalahan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Hal ini sebagai akibat dari adanya interaksi sosial. Konflik bisa terjadi antarindividu maupun konflik yang sifatnya komunal. Yang kemudian menjadi perhatian adalah bagaimana mencegah konflik, mengatasi konflik, dan mencegah konflik terulang kembali.

Penyelesaian konflik dilakukan untuk jangka pendek dan panjang. Penyelesaian konflik jangka pendek seperti yaitu tindakan aparat pemerintah dan keamanan untuk menghentikan tindak kekerasan yang terjadi agar konflik dapat dihentikan, penegakan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, dan meminta pihak luar yaitu media untuk berperan serta media dalam menciptakan damai di masyarakat.

Penyelesaian konflik jangka panjang dapat berupa memasukkan resolusi konflik (*conflict resolution*), pembangunan perdamaian (*peace building*) dan pendidikan perdamaian (*peace education*) ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, sejak dini. Semakin tinggi potensi konflik di tanah air, semakin mendesak pula kebutuhan menjadikan resolusi konflik dan pendidikan perdamaian mejadi bagian dari proses pembelajaran di sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pembelajaran ini berguna, bukan hanya untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya perdamaian, melainkan juga untuk memberikan keterampilan teknis mengatasi konflik dan membangun perdamaian. Tanpa itu, mereka akan mengalami kegamangan demi kegamangan. (Nurkholis, 2012)

Pendidikan memegang peranan cukup strategis dalam penanaman nilai-nilai perdamaian karena pendidikan (sekolah) merupakan miniatur masyarakat yang akan menyiapkan fungsi sosial dari peserta didik. Melalui lingkungan sekolah, peserta didik dihadapkan pada situasi mini sebuah masyarakat multikultural dengan keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Praktik berinteraksi sesama peserta didik yang multikultural inilah yang membentuk karakter anak dalam menghadapi realitas kehidupan di masyarakat nantinya. Pada situasi inilah pengelola sekolah memiliki peranan sentral dalam membina peserta didik membentuk karakter dan kepribadian untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat secara nyata.

Lingkungan pendidikan (sekolah) memiliki peran strategis dalam menumbuhkan budaya damai. Sayangnya, sekolah belum sepenuhnya menjadi *agent of change* dalam mengubah karakter peserta didik. Sekolah lebih mengarah pada *transfer of knowledge* dan belum mampu meningkatkan kecerdasan emosi dan kecerdasan religius secara maksimal. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan “*Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*” Dengan melihat tujuan tersebut maka pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mencapai harapan. Pendidikan yang diyakini mempunyai peran besar dalam membentuk

karakter individu peserta didik ternyata belum mampu membentuk karakter perdamaian dalam menghadapi kehidupan masyarakat yang serba multikultural.

Sekolah memiliki peranan penting dalam membentuk karakter perdamaian bagi peserta didik melalui pendidikan multikultural. Dalam pendidikan multikultural yang diselenggarakan di sekolah, semua aspek kelembagaan harus menerapkan sistem dan metode yang dapat menumbuhkan multikulturalisme dan pluralisme serta mampu menggali sisi perdamaian dan toleransi (Maarif, 2007). Seorang guru tidak hanya dituntut menguasai mata pelajaran yang diajarkan tetapi juga harus mampu mengajarkannya secara profesional. Lebih dari itu, seorang pendidik juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti pendidikan multikultural (seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme) dan menanamkan nilai-nilai keberagaman yang inklusif pada peserta didik. Oleh karena itu, setiap guru harus mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan perdamaian dalam setiap mata pelajaran yang diampunya.

Pendidikan damai merupakan pendidikan sangat penting dan mutlak diberikan di daerah-daerah pascakonflik, terutama konflik yang cukup besar. Bagaimanapun “luka” yang ditimbulkan oleh sebuah konflik sosial tetap akan terasa dalam waktu lama. Apabila “luka” ini tidak dikelola dengan baik maka ada potensi konflik terulang lagi. Dalam hal ini, pendidikan budaya damai berfungsi sebagai salah satu upaya mengelola konflik, yaitu sebagai upaya mencegah konflik terulang. Pendidikan budaya damai juga dimaksudkan untuk mengubur dalam-dalam “luka” yang pernah ditinggalkan oleh sebuah konflik menuju terciptanya masyarakat multikultural yang inklusif.

Pendidikan perdamaian atau pendidikan budaya damai dapat dilaksanakan dengan dua cara: diintegrasikan pada beberapa atau semua mata pelajaran yang ada atau dapat pula dilakukan pada satu mata pelajaran tertentu. Secara lebih luas pendidikan perdamaian ini dimaksudkan untuk merespon keragaman populasi peserta didik di sekolah dan keragaman di masyarakat. Pendidikan perdamaian juga dimaksudkan untuk memberikan perlakuan kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan etnis, budaya, agama, dan strata sosial.

Sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, anti kekerasan, dan kebutuhan hidup berdampingan secara damai adalah dengan memasukkan pesan-pesan perdamaian melalui mata pelajaran mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi, tidak terkecuali adalah dalam mata pelajaran pendidikan agama melalui lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan keagamaan (madrasah).

Pendidikan agama merupakan sarana sangat strategis dalam penanaman nilai-nilai perdamaian. Pendidikan agama pada lembaga formal atau sekolah merupakan salah satu sarana dalam pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melak-

sanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah "pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia".

Sementara itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap-sikap kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Isi Peraturan Menteri Agama ini mengindikasikan bahwa apabila tujuan pendidikan agama bisa tercapai, maka peserta didik yang memiliki jiwa perdamaian, anti kekerasan, toleran, dan hidup berdampingan secara damai akan terbentuk. Hal ini karena ajaran agama apapun telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti itu.

Akan tetapi dalam kenyataan yang ada, cita-cita pendidikan agama sebagaimana termaktub dalam peraturan-peraturan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Pendidikan agama masih terfokus kepada pemberian pengetahuan kognitif dan dogmatis. Pendidikan agama belum sepenuhnya mampu membentuk manusia-manusia yang bersikap damai, mengikis konflik kekerasan, permusuhan, disharmoni sosial sehingga konflik antaretnis masih saja terjadi.

Memperhatikan hal tersebut di atas, pendidikan agama di sekolah menjadi begitu strategis untuk memberi muatan dan penguatan nilai-nilai perdamaian. Khusus untuk daerah yang pernah punya sejarah konflik antaretnis, maka penguatan nilai-nilai perdamaian yang secara implisit termuat dalam pendidikan agama menjadi suatu yang strategis dalam menjaga kerukunan dan harmoni antarwarga.

Pertanggungjawaban Penelitian

Penelitian yang dilakukan Wulandari (2010:73-80), yang berjudul “Menciptakan Perdamaian Melalui Pendidikan Perdamaian di Sekolah”, menyatakan pendidikan perdamaian, pada dasarnya adalah dalam rangka memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar mampu membina hubungan baik dalam setiap level interaksi manusia, dari anak-anak sampai orajngtua, dari tingkat sekolah dasar sampai jenjang pendidikan tinggi. Begitu pentingnya pendidikan perdamaian ini, maka pemerintah dapat memulai dengan mewajibkan sekolah memberikan materi tentang perdamaian. Pemerintah bisa memberikan pedoman kurikulum pendidikan perdamaian pada tiap jenjang pendidikan dan memberikan semacam pelatihan kepada guru tentang pendidikan perdamaian. pendidikan perdamaian dapat diberikan dalam tiga alternatif: (1) *include* dalam materi pelajaran; (2) diajarkan dalam mata pelajaran tersendiri (3) diberikan melalui kelompok kegiatan ekstrakurikuler. Dari ketiga alternatif itu bentuk yang paling tepat adalah sebagai mata pelajaran tersendiri, karena jika hanya dimasukkan ke dalam kurikulum mata pelajaran tertentu ada banyak kekurangan dalam hal waktu dan porsinya.

Penelitian Wibowo dkk. (2015) berjudul “Pendidikan Multikultural di Pulau Dewata” menyatakan bahwa pendidikan agama berbasis multikultural merupakan keniscayaan yang harus diterapkan dalam lembaga pendidikan di Indonesia. Pendidikan agama berbasis multikultural akan melahirkan generasi yang siap bergaul, berinteraksi, bekerjasama, saling mengisi, saling menghargai, dan saling menghormati sesama

manusia tanpa harus saling menyakiti atau menganggap salah ajaran agama dan budaya orang lain.

Banks (1999) dalam Baedowi (2015) memberikan ciri dan karakter yang baik untuk mengembangkan pendidikan multikulturalisme di sekolah antara lain dengan penetrasi pendidikan multikulturalisme ke dalam kurikulum sekolah dan proses pengembangannya didesain mengacu dan merefleksikan pengalaman, budaya, dan perspektif dari berbagai macam keragaman etnis dan suku bangsa serta kesetaraan gender.

Baedowi (2015: 166) mengatakan bahwa masih adanya konflik bernuansa SARA dan politik di beberapa daerah memberikan bukti bahwa pendidikan damai belum sampai menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya diungkapkan bahwa salah satu akar konflik yaitu masalah-masalah ekonomi dan politik lokal. Pada sisi lain, adanya keanekaragaman budaya dan perbedaan agama bisa mengakibatkan meluasnya konflik.

Haba (2012:47-50) dalam penelitiannya berjudul “Etnisitas, Hubungan Sosial dan Konflik di Kalimantan” mengatakan konflik etnis di Kalimantan Barat membuktikan bahwa manajemen pengelolaan budaya dan konflik di Indonesia dan daerah-daerah belum terbangun serta belum diimplementasikan dengan tepat dan benar. Indonesia yang multietnik perlu dibangun bersama-sama untuk mempertahankan sila “Persatuan Indonesia” dari gangguan hidup bermasyarakat. Gangguan yang dapat mengakibatkan disharmoni dapat disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya disparitas penduduk lokal dan penduduk pendatang, perbedaan kebudayaan, dan kebijakan pembangunan yang

menguntungkan kelompok tertentu. Dinamika perubahan konstelasi politik juga memberikan kontribusi terhadap meruncingnya hubungan antaretnis, kontestasi antarkelompok untuk memperoleh posisi sosial, isu etnis yang dihubungkan dengan agama, penguasaan sumber daya alam, dan ketimpangan akses ekonomi dan pemerintahan. Untuk mencegah konflik berkelanjutan dan agar konflik tidak terulang maka pemerintah perlu bekerja sama dengan segenap lapisan masyarakat, lembaga keagamaan, dan politik untuk menjaga benturan ataretnis. Hubungan etnis yang harmonis menjadi barometer kesadaran hidup warga negara Indonesia. Kebijakan pembangunan yang berkeadilan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi merupakan pilihan kebijakan nasional di masa yang akan datang.

Penelitian dan kajian di atas sangat penting untuk melihat konteks dan beberapa implementasi pendidikan perdamaian di berbagai daerah. Namun, secara khusus dan mendalam kajian terkait pendidikan perdamaian atau pendidikan budaya damai di wilayah pascakonflik perlu dikembangkan lagi. *Buku ini merupakan hasil penelitian yang mengungkap proses pendidikan budaya damai yang diberikan kepada peserta didik di daerah yang pernah mengalami konflik antaretnis, yaitu di Kalimantan Barat. Sejauh mana lingkungan sekolah telah menciptakan suasana menghargai perbedaan dan keragaman sesuai dengan perspektif multikultural, inklusif, dan terbuka. Sejauh mana lingkungan sekolah memberikan pemahaman untuk mentransformasikan perspektif monokultural, penuh prasangka, dan diskriminatif menjadi perspektif multikultural dan toleran.*

Tiga wilayah di Kalimantan Barat yang menjadi lokus penelitian ini adalah Kota Pontianak, Kabupaten Bengkayang,

dan Kabupaten Sambas. Tiga wilayah ini memiliki kaitan penting dalam sejarah konflik di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, muatan-muatan budaya damai melalui pendidikan agama di ketiga wilayah tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana praktik pendidikan budaya damai diimplementasikan di sekolah.

Kajian yang dilakukan dalam buku ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2008:6). Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan dan wawancara kepada subyek penelitian. Pengamatan dilakukan pada kegiatan sekolah dan aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa. Sedangkan wawancara dilakukan terhadap guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat terkait, dan siswa. Sasaran penelitian ini adalah SMA dengan karakter yang berbeda yang berada di tiga wilayah konflik, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas.

Buku ini disusun atas beberapa bagian yang integral. Bagian awal ini merupakan prolog yang menjelaskan latar belakang penelitian dan urgensi mengungkap pendidikan budaya damai di sekolah pada wilayah yang memiliki sejarah konflik di masa lalu. Bagian berikutnya kajian yang bersifat teoretik untuk menjelaskan konsep penting yang mengerangkai buku ini, yaitu konsep tentang damai-konflik, pendidikan budaya damai, dan pendidikan agama. Kerangka

teoretik ini diharapkan dapat mempermudah pembaca memahami alur dan pembahasan dalam buku ini.

Bagian selanjutnya terdiri dari dua bab yang merupakan temuan, analisis, dan pembahasan hasil data lapangan. Kedua bab ini disampaikan secara deskriptif untuk menggambarkan implementasi pendidikan budaya damai di sekolah-sekolah yang diteliti, dan bagaimana dapat menjadi *best-practice* pengembangan pendidikan budaya damai ke depan. Harapannya, pendidikan budaya damai ini dapat diterapkan dalam berbagai jenjang pendidikan dan dalam konteks wilayah yang berbeda.

Terakhir, sebagai penutup adalah satu tulisan epilog yang merupakan simpulan dari buku ini, sekaligus memberikan ilustrasi *what's next* pendidikan budaya damai ini dikembangkan dalam pendidikan di Indonesia. Selain itu, di bagian belakang juga dilampirkan apendiks (tambahan) berupa *executive summary* dan *policy brief* terkait tema pendidikan budaya damai yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh pembaca dari kalangan eksekutif dan pengambil kebijakan.

MENYOROTI DAMAI DAN KONFLIK, PENDIDIKAN DAMAI, SERTA PENDIDIKAN AGAMA

Memahami Damai dan Konflik

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Kehidupan manusia tergantung pada manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia berhubungan satu sama lain atau berinteraksi sosial. Proses interaksi sosial ini meniscayakan kemungkinan terjadinya relasi yang baik dan relasi yang tidak baik. Relasi yang baik menjadikan kondisi damai, sedangkan relasi yang tidak baik menyebabkan situasi konflik.

Soekanto (1982: 71) membedakan dua model relasi atau interaksi sosial, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif adalah hubungan sosial dalam masyarakat yang terwujud dari kehendak rasional antarelemen masyarakat, dalam pengertian segala hal yang disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Proses ini mengarah pada

semakin kuatnya ikatan antarpihak yang berhubungan. Proses ini meliputi bentuk kerja sama dan akomodasi. Di sisi lain, interaksi disosiatif merupakan bentuk hubungan sosial yang mengarah pada perpecahan atau merenggangnya hubungan sosial antarpihak yang saling berhubungan. Proses ini dapat berbentuk persaingan, kontravensi, maupun pertentangan.

Interaksi asosiatif paling mudah mendorong terciptanya perdamaian, dan interaksi disosiatif gampang menyulut terjadinya konflik. Namun dalam suatu proses sosial, damai dan konflik ini membutuhkan penjelasan yang lebih kompleks. Interaksi yang asosiatif memang dekat dengan kondisi perdamaian, tetapi belum tentu kondisi damai yang ideal. Demikian pula interaksi disosiatif; tidak mesti melahirkan konflik yang berdarah, pertempuran fisik, ataupun peperangan. Konflik tidak mesti melahirkan kekerasan. Konflik dan kekerasan adalah dua pengertian yang berbeda. Kondisi yang menunjukkan adanya tujuan yang bertentangan dapat disebut konflik, tetapi apabila kondisi pertentangan ini dapat disikapi secara bijaksana maka dapat ditransformasikan menjadi bentuk kerja sama dan hubungan yang saling menguntungkan. Adapun kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kerusakan fisik maupun psikis yang menghalangi orang lain mencapai potensi kemanusiaannya secara penuh (Jamil, [ed], 2007).

Konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat karena masing-masing pihak tentu memiliki kepentingan (interest) yang bisa jadi saling bertentangan. Dalam menyelesaikan pertentangan atau konflik ini, ada yang mengambil jalan damai, seperti dengan

dialog, akomodasi, bahkan kerja sama tetapi ada pula yang mengambil jalan kekerasan. Dengan demikian, kekerasan sudah pasti konflik, tetapi konflik belum tentu kekerasan. Kekerasan ini pun dapat berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikis; baik kultural maupun struktural.

Johan Galtung (dalam Susan, 2010: 118-119) membagi tiga jenis kekerasan. Pertama, kekerasan struktural (*structural violence*) yang tercipta dari penggunaan kekuasaan struktural dari pihak yang memiliki kewenangan menciptakan kebijakan publik. Kekerasan struktural ini menyebabkan ketertindasan manusia dan kelompok sosial sehingga mengalami berbagai kesulitan menjalani kehidupannya. Kedua, kekerasan langsung (*direct violence*), yaitu kekerasan yang langsung ditujukan untuk menyakiti fisik atau psikis seseorang atau kelompok sosial. Pembunuhan, penganiayaan, ancaman, dan teror termasuk dalam kekerasan ini. Ketiga, kekerasan budaya (*cultural violence*) yang berasal dari aspek-aspek kebudayaan, bukan keseluruhan sistemnya. Oleh karena itu, kekerasan budaya bisa muncul dari agama, etnisitas, dan ideologi. Kekerasan ini berupa kebencian, stereotip, ketakutan, dan kecurigaan, sehingga dapat menjadi motor bagi kekerasan struktural maupun kekerasan langsung.

Lebih lanjut Johan Galtung memberikan penjelasan bahwa damai adalah tidak adanya kekerasan baik kekerasan secara langsung maupun kekerasan tidak langsung (*terstruktur*). Melalui penjelasan tersebut Galtung kemudian membuat pembedaan mengenai damai, yaitu damai negatif (*negative peace*) dan damai positif (*positive peace*). Damai negatif dimaknai sebagai ketiadaan kekerasan secara langsung (perang, penyiksaan, kekerasan terhadap anak

dan wanita [gender]), sedangkan damai positif dimaknai sebagai ketiadaan kekerasan struktural yaitu terciptanya keadilan sosial, hubungan sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan politik yang harmonis (Galtung, 1969: 183).

Apa yang dimaksudkan oleh Galtung dengan perdamaian positif adalah terwujudnya struktur sosial (termasuk politik, ekonomi, dan budaya) yang menjamin terpenuhinya rasa aman dan keadilan ekonomi serta politik yang terwujud dalam sistem sosial yang menghapus diskriminasi ras, etnis, status, dan identitas sosial lainnya. Sementara perdamaian negatif hanya berfokus pada ketiadaan kekerasan langsung, seperti perang, tidak adanya kekerasan berupa ancaman terhadap fisik, psikis, dan nyawa (Susan, 2010: 130). Kondisi yang diidealkan tentunya adalah perdamaian positif karena visi dari perdamaian positif adalah menghapus kekerasan struktural dan mengembangkan hubungan vertikal sosial yang bertanggung jawab dengan meniadakan diskriminasi struktural, serta menuntut kesetaraan, keadilan, dan kesatuan bersama. Perdamaian harus bisa memberi ruang pergerakan sosial sekaligus menciptakan situasi yang mengontrol dan mengelola kehidupan ini tetap dalam situasi harmonis antarbagian yang berbeda dari sistem kehidupan ini (Susan, 2010: 134).

Senada dengan itu, Ursula Franklin (dalam Chaer, 2016: 79) berpendapat bahwa damai bukan hanya sekedar tidak adanya perang, tetapi juga terciptanya keadilan dan hilangnya ketakutan dalam diri individu dan masyarakat dari apa yang disebut “sistem yang mengancam”, yaitu sistem yang diciptakan oleh suatu kelompok untuk mengontrol dan mengatur individu atau kelompok lain dengan memberi

mereka rasa takut dan ketidakpastian demi mencapai tujuan tertentu.

Budaya damai menurut PBB (Castro dan Galace, 2010: 23) adalah seperangkat nilai, sikap, tradisi, perilaku, dan cara hidup yang:

1. Menghargai hak kehidupan dan hak azasi manusia;
2. Menolak kekerasan dalam segala bentuknya dan mencegah konflik kekerasan dengan mencari akar permasalahan melalui dialog dan negosiasi;
3. Komitmen kepada partisipasi penuh dalam proses pertemuan yang adil untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.
4. Mempromosikan persamaan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan;
5. Pengakuan terhadap kebebasan berekspresi, opini, dan informasi;
6. Mengutamakan kepada prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, demokrasi, toleransi, solidaritas, kerja sama, pluralisme, dialog, dan saling memahami antarbangsa, antaretnis, agama, kultur, antarkelompok, dan antarindividu;

Berkebalikan dengan damai atau perdamaian di atas, konflik adalah kondisi pertentangan antarindividu maupun kelompok. Konflik atau pertentangan menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (1974: 177) merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang terjadi akibat adanya ketegangan antara satu pihak dengan pihak lain. Menurut Pruitt dan Rubin (1986: 9-10) konflik dapat diarti-

kan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Menurut Amy Ohlendorf dalam buku *Peace Education, Volume II* (dalam Zamroni, 2008: 14), konflik yaitu suatu situasi persaingan yang di dalamnya orang-orang sadar akan adanya ketidaksesuaian posisi potensial di masa depan dan masing-masing orang berniat untuk menguasai posisi yang dirasa tidak sesuai untuk yang lainnya.

Faktor-faktor yang dapat mempertajam terjadinya konflik adalah adanya perbedaan ideologi yang mendasar karena tidak senang terhadap nilai-nilai kelompok lain, adanya perbedaan kelas, makin meningkatnya mobilitas status yang cenderung memaksakan kontak antarindividu dan kelompok, dan makin intensifnya perjuangan politik yang cenderung mengaburkan keadaan agama dengan kepentingan politik. Adapun faktor-faktor yang meredakannya adalah adanya perasaan memiliki satu kebudayaan dan adanya toleransi umum yang didasarkan atas suatu relativisme kontekstual yang menganggap nilai-nilai tertentu sesuai dengan konteksnya (Geertz, 1986: 207).

Dalam suatu konflik terdapat beberapa unsur yang menjadi akar penyebabnya, yaitu:

1. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat. Jadi, ada interaksi antaramereka yang terlibat.
2. Ada tujuan yang dijadikan sasaran konflik. Tujuan inilah yang menjadi sumber konflik.

3. Ada perbedaan pikiran, perasaan, dan tindakan di antara pihak yang terlibat untuk mendapatkan atau mencapai tujuan.
4. Ada situasi konflik antara dua pihak yang bertentangan. Meliputi situasi antarpribadi, antarkelompok, dan antar-organisasi (Barge dalam Liliweri (2005).

Konflik dapat terjadi dalam beberapa tipe situasi. *Pertama*, situasi tanpa-konflik menggambarkan situasi yang stabil, hubungan antarkelompok bisa saling memenuhi dan damai. Situasi ini bisa terjadi karena masyarakat mampu menciptakan struktur sosial yang dapat mencegah terjadinya konflik, tetapi juga bisa terjadi karena sifat budaya yang memungkinkan anggota masyarakat menjauhi permusuhan dan kekerasan. *Kedua*, situasi konflik laten di mana keadaan yang di dalamnya mengandung persoalan-persoalan yang tersembunyi, di mana sewaktu-waktu dapat meledak apabila ada pemicunya. *Ketiga*, konflik terbuka, di mana situasi konflik sosial telah muncul ke permukaan dengan akar masalah yang besar dan nyata sehingga perlu penanganan menyeluruh untuk mengatasi akar dan efeknya. *Keempat*, konflik permukaan, konflik yang terjadi di permukaan tetapi tidak memiliki akar atau akar yang sangat dangkal yang umumnya berupa kesalahpahaman sehingga perlu dialog/komunikasi antarpihak untuk menyelesaikannya (Susan, 2010: 100).

Indonesia sebagai bangsa yang plural memiliki pengalaman konflik, baik konflik vertikal antara kelompok masyarakat dengan pemerintah, maupun konflik horisontal antarkelompok dalam masyarakat. Tercatat ada dua jenis

konflik horisontal yang tergolong memiliki pengaruh besar. *Pertama*, konflik antaragama, terutama antara kelompok agama Islam dengan kelompok agama Nasrani, seperti yang yang mengemuka di Ambon, Jakarta, dan tempat lain. *Kedua*, konflik antarsuku, khususnya antara suku Jawa dengan suku lain di luar Jawa, selain itu juga antara suku Madura dengan Dayak dan Melayu di Kalimantan (Susan, 2010: 99). Selain kedua jenis konflik tersebut, masih ada jenis konflik yang *ketiga*, yaitu konflik intern-agama, konflik yang terjadi antarkelompok dalam satu agama yang di tahun-tahun terakhir ini juga menyita perhatian seperti kerusuhan Sampang tahun 2012 akibat konflik antara penganut Syiah dan Sunni, dan juga pertentangan sebagian umat Islam dengan kelompok Ahmadiyah.

Menurut Varshney (2002), konflik sosial antaretnik/agama lebih disebabkan oleh kuatnya kohesivitas internal dalam kelompok-kelompok etnik/agama (internal engagement). Sedangkan perdamaian sosial lebih didorong oleh menguatnya jaringan pertalian antarwarga lintas etnik/agama. Masyarakat sipil memiliki jaringan antaretnik yang baik melalui keterlibatan bersama dalam suatu kegiatan yang akan mencegah terjadinya konflik dan kekerasan. Ikatan warga ini meliputi ikatan formal seperti asosiasi bisnis, organisasi, dan sebagainya; dan ikatan informal berupa interaksi rutin yang terjadi setiap hari dalam bentuk saling mengunjungi, memberi ucapan selamat, makan bersama, perayaan di lingkungannya, hubungan pertetanggaan, dan mengizinkan anak-anak mereka bermain bersama.

Oleh karena itu, perdamaian menjadi suatu hal yang dapat didorongkan dalam masyarakat melalui berbagai jalur, salah satunya melalui pendidikan. Terlebih, pada

masyarakat yang memiliki pengalaman konflik di mana peristiwanya telah terlewati, melakukan proses-proses sosial sebagai upaya peace building (membangun perdamaian) sangatlah penting untuk mencegah terjadinya konflik kembali di masa depan. Trauma-trauma konflik di masa lalu sangat mungkin menjadi memori kolektif masyarakat yang dapat menghambat relasi dan interaksi sosial yang positif. Upaya mengikis trauma dan memori konflik tersebut dan mentransformasikannya menjadi energi untuk saling menghormati dan bekerja sama, di antaranya adalah melalui pendidikan budaya damai di sekolah-sekolah, di mana peserta didik diharapkan dapat menjadi pembawa bendera perdamaian di masa depan.

Pendidikan Budaya Damai

Fungsi pendidikan sebagaimana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 adalah “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya kemampuan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Undang-undang tersebut juga mengamanatkan prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan, yaitu *pertama*, demokratis berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, kultural, dan kemajemukan. *Kedua*, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan dengan

sistem terbuka dan multimakna. *Ketiga*, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. *Keempat*, pendidikan diberikan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. *Kelima*, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. *Keenam*, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Berkaitan dengan peraturan pendidikan tersebut, pendidikan secara inheren memiliki tanggung jawab menjadikan peserta didik memiliki visi perdamaian yang terwujud dalam sikap demokratis, menjunjung tinggi HAM, dan menghargai perbedaan, serta memiliki kemauan mencari penyelesaian konflik yang positif. Oleh karena itu, pendidikan perdamaian atau yang disebut pendidikan damai atau pendidikan budaya damai perlu didorong ke sekolah-sekolah. Pendidikan perdamaian ini adalah proses mempromosikan pengetahuan, keahlian, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk membawa perubahan perilaku untuk mencegah (to prevent) konflik dan kekerasan; menyelesaikan (to resolve) konflik secara damai; dan menciptakan (to create) kondisi yang kondusif untuk perdamaian (Chaer. 2016: 80).

Hal ini senada dengan Bar-Tal (dalam Nurwanto dan Habiby, 2020: 3) yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan perdamaian adalah untuk mengurangi atau membasmi berbagai “penyakit” manusia mulai dari ketidak-

adilan, prasangka kelompok, intoleransi, perusakan lingkungan, konflik dengan kekerasan, hingga perang dan kejahatan lainnya dalam rangka mewujudkan dunia yang penuh dengan keadilan, kesamaan, toleransi, HAM, kualitas lingkungan, perdamaian, dan wujud kehidupan positif lainnya.

Isi pokok pendidikan damai dalam buku *Peace Education: a Pathway to a Culture of Peace* (Castro dan Galace, 2008: 61-161) antara lain adalah: menjunjung tinggi martabat manusia, mengubah prasangka dan membangun toleransi, dan mengutamakan tanpa kekerasan. Sementara menurut Lincoln dan AmaLee (2010: vi) ada 12 nilai dasar perdamaian (tema) yang perlu disampaikan dalam pendidikan damai, yaitu: menerima diri, bebas prasangka, keragaman etnis, perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, perbedaan status ekonomi, perbedaan kelompok, keanekaragaman, konflik, menolak kekerasan, mengakui kesalahan, dan memberi maaf.

Selain itu, pendidikan damai selayaknya juga diterapkan pada semua kondisi masyarakat, tidak hanya pada masyarakat yang sedang mengalami konflik ataupun rawan konflik (Fountain, 1999: 1). Pada masyarakat yang normal atau tidak rawan konflik pendidikan damai juga perlu ditanamkan karena perubahan perilaku masyarakat terjadi secara terus-menerus. Pada sisi inilah pendidikan damai berperan untuk senantiasa memunculkan kesadaran akan budaya damai agar diterapkan dalam semua lini kehidupan.

Berangkat dari substansi pendidikan damai di atas, maka istilah pendidikan perdamaian, pendidikan damai, dan pendidikan budaya damai secara substansial adalah

sama. Pendidikan perdamaian ini juga mengarah pada pembentukan budaya damai. Budaya damai yang dimaksud adalah sistem pengetahuan, nilai, dan tindakan yang mengembangkan perdamaian di lingkungan sosial dan alam secara harmoni. Oleh karena itu, pendidikan perdamaian dengan sendirinya juga merupakan pendidikan budaya damai. Buku ini tidak akan membedakan istilah pendidikan perdamaian, pendidikan damai, dan pendidikan budaya damai, kecuali untuk penjelasan teknis.

Susan Fountain (1991: 1) menjelaskan konsep pendidikan damai yang didefinisikan oleh UNICEF. Lembaga kemanusiaan dan kesejahteraan untuk anak-anak yang didirikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ini merumuskan bahwa prinsip pendidikan damai mencakup tiga pokok bahasan. Pertama, bahwa pendidikan damai merupakan proses memperkenalkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dibutuhkan untuk mewujudkan perubahan perilaku yang akan memungkinkan anak-anak, remaja, dan orang dewasa untuk mencegah konflik dan kekerasan. Kedua, bahwa dengan adanya pendidikan damai juga sebagai upaya untuk penyelesaian konflik secara damai. Ketiga, pendidikan damai juga bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk perdamaian, baik dalam lokal, nasional, maupun internasional.

Montessori, seorang aktivis perdamaian asal Italia mengungkapkan bahwa penanaman nilai perdamaian melalui pendidikan adalah karena pendidikan sebagai jalur untuk menghubungkan masyarakat yang ada saat ini dengan kehidupan masyarakat di masa depan yang lebih baik (Saleh, 2012: 49). Melalui pendidikan diharapkan akan tercipta masyarakat yang bebas dari kekerasan, ketidakadilan,

peperangan, dan bahkan akan lebih jauh lagi akan tercipta kehidupan kedamaian dan persaudaraan di antara masyarakat. Hal itu akan dapat dicapai dengan aktualisasi maksimal seluruh potensi peserta didik melalui interaksi sosial secara bebas, kreatif, dan mandiri.

Substansi dari pendidikan damai di atas, dalam implementasinya dapat menggunakan jalur pendidikan. Pendidikan adalah miniatur masyarakat yang di dalamnya terdapat interaksi antarseluruh elemen sekolah, siswa, guru, dan tenaga kependidikan dengan berbagai latar belakang dan strata sosial yang berbeda. Untuk menanamkan nilai dan karakter damai pada peserta didik maka budaya damai perlu ditanamkan pada semua jenjang pendidikan. Pendidikan damai menjadi urgen untuk diberikan kepada siswa-siswa mulai dari pra sekolah, sekolah dasar, menengah, bahkan perguruan tinggi. Pada tingkatan awal (pra sekolah dan sekolah dasar), pendidikan damai sangat bermanfaat untuk memberikan kesadaran awal kepada siswa akan adanya keragaman. Sementara pada sekolah di tingkatan selanjutnya siswa akan bisa diajak untuk lebih mengeksplorasi realitas di masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah-tengah perbedaan.

Menurut Danesh (2007: 306) pendidikan damai haruslah menjadi kerangka utama dalam semua subject (pelajaran) pada sekolah tingkat dasar hingga menengah. Ini memberikan makna bahwa semua mata pelajaran semestinya selain memiliki target pengetahuan (knowledge) juga memiliki target menjadikan anak didik memiliki pandangan damai dalam melihat segala aspek kehidupan. Prinsip yang perlu dipegang dalam pandangan damai ini adalah:

1. Pengakuan terhadap persamaan dalam kemanusiaan.
2. Pengakuan kesatuan dalam keragaman
3. Pengakuan bahwa hal mendasar tentang kemanusiaan adalah mempersatukan dalam keragaman.
4. Pengakuan bahwa tugas menciptakan perdamaian ini tidak dapat dicapai melalui kekerasan, akan tetapi diselesaikan melalui proses dengan keterbukaan, kreatifitas, perdamaian, adil, dan kebersamaan

Tujuan pendidikan damai menurut H.B. Danesh (2007: 307) adalah:

1. Membangun pandangan dunia yang universal
2. Menciptakan budaya damai
3. Mengupayakan penyembuhan dari trauma konflik
4. Mengintegrasikan nilai budaya damai sebagai kerangka dalam semua kegiatan pendidikan.

Menurut Wulandari (2010) ada tiga alternatif strategi implementasi pendidikan budaya damai di sekolah, yaitu *pertama*, dimasukkan dalam muatan kurikulum pada mata pelajaran yang ada; *kedua*, disampaikan melalui suatu mata pelajaran tersendiri; *ketiga*, penanaman nilai perdamaian melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan pendukung lainnya. Ketiga strategi tersebut tentu dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan infrastruktur dan kemampuan lembaga pendidikan. Hal yang paling pokok dalam pendidikan budaya damai ini adalah mentransformasikan pengetahuan, nilai, dan perilaku anak didik agar berorientasi pada perdamaian. Substansi pendidikan

budaya damai dapat menjadi suatu pelajaran tersendiri ataupun diintegrasikan dengan pelajaran yang lain atau kegiatan ekstrakurikuler. Cakupan substansi pendidikan budaya damai seperti sikap toleransi, menghormati dan menghargai orang lain, menjunjung tinggi HAM dan demokrasi, mengembangkan sikap bekerja sama, dan mengikis sikap diskriminasi sangat mungkin ada dalam mata pelajaran yang sudah ada di setiap jenjang pendidikan. Salah satu mata pelajaran yang memiliki materi yang bersentuhan secara substantif dengan pendidikan budaya damai adalah pendidikan agama. Ajaran agama yang diajarkan dalam pelajaran agama di jenjang pendidikan menguatkan budaya damai yang dituju oleh pendidikan budaya damai itu sendiri.

Pendidikan Agama

Pada hakikatnya pendidikan merupakan proses pembentukan manusia seutuhnya, dalam arti utuh meliputi fisik, psikis, moral, spiritual, dan religius. Pendidikan agama pada jalur pendidikan formal adalah dalam rangka membentuk kedewasaan seseorang pada aspek spiritual dan religius. Oleh karena itu, pendidikan agama pada lembaga pendidikan formal diberikan kepada peserta didik untuk memperoleh haknya dalam pelayanan kebutuhan kehidupan beragama.

Pendidikan agama di Indonesia secara legal dipayungi oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Secara eksplisit disebut

bahwa pada semua jenjang pendidikan wajib peserta didik berhak memperoleh pendidikan agama. Oleh karena itu , semua pihak yang menyelenggarakan pendidikan wajib mematuhi hal tersebut. Sementara di dalam penjelasan pasal 12 dari UU Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan pula bahwa pendidik atau guru pendidikan agama disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Tenaga pendidikan atau guru tersebut dalam perekrutan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Pada sisi siswa, pendidikan agama merupakan hak dari peserta didik karena “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama” (UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat 1. Dengan demikian, setiap siswa yang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan menurut regulasi dapat dipastikan akan menerima dan mengikuti pendidikan agama dan setiap satuan pendidikan berkewajiban memenuhinya.

Pendidikan agama merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan (PP Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 1). Pendidikan agama dalam regulasi diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan

antarumat beragama (PP Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 2). Dengan demikian, melalui pendidikan agama, selain seorang peserta didik diarahkan agar menjadi individu-individu yang religius sesuai agamanya juga diarahkan menjadi manusia yang memiliki jiwa dan semangat menjalin hubungan yang harmonis antarsesama sehingga akan terbentuk masyarakat yang damai dan memperkecil potensi timbulnya konflik. Banyaknya nilai moral yang diajarkan menjadikan pendidikan agama sebagai perekat hubungan antar sesama manusia tanpa membedakan latar belakangnya.

Pendidikan agama adalah salah satu pendidikan yang urgen untuk diberikan kepada peserta didik karena di dalamnya mengajarkan bagaimana seseorang berperilaku dalam hubungannya dengan Tuhan dan berperilaku dalam menjalin relasi sosial dengan sesamanya. Dalam hubungannya dengan Tuhan, pendidikan agama diarahkan agar siswa memahami dan melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Sedangkan dalam relasi sosial, pendidikan agama memberikan pengajaran bagaimana seseorang harus bersikap dan bertindak terhadap orang lain. Oleh karena itu, pendidikan agama memiliki peran yang sangat besar dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi dengan kondisi bangsa Indonesia yang multikultural karena terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya.

Sementara itu, terkait dengan pendidikan agama telah disusun kurikulum pendidikan agama yang meliputi enam agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap pembelajaran agama di sekolah umum senantiasa mengacu kepada kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan pengawas dan pembina pelaksanaan pendidikan agama dilakukan oleh Kementerian Agama.

Pendidikan agama pada lembaga pendidikan formal saat ini mengacu pada Kurikulum 2013. Apabila dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya (Kurikulum 2004/KBK, Kurikulum 2006/KTSP), maka Kurikulum 2013 memiliki ciri-ciri antara lain: (1) proses pembelajaran lebih berpusat kepada aktivitas peserta didik (*student centered*); (2) menggunakan *scientific approach*, *discovery*, dan *inquiry learning* pada ranah sikap (menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan), pengetahuan (mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan menerapkan), maupun keterampilan (mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta); (3) penilaian yang bersifat autentik dalam bentuk deskripsi hasil pengamatan, portofolio, uji kemampuan dan sebagainya yang dituangkan dalam kata-kata dan angka (Hidayati, 2014: 72).

Secara praktik, saat ini terdapat empat model pendidikan agama di sekolah. *Pertama*, model sebagaimana ketentuan sistem pendidikan nasional, peserta didik memperoleh pendidikan agama sesuai agama dan diajarkan oleh guru yang seagama. *Kedua*, model pendidikan religiusitas, peserta didik mempelajari agama-agama secara bersama-sama di bawah bimbingan guru. Siswa yang beragama sesuai dengan satuan pendidikan mendapatkan pendalaman materi dari guru agama, sedangkan siswa yang lain cukup mendiskusikan ajaran agama dan keyakinannya. Model ini diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Katolik di bawah Keuskupan Agung Semarang. *Ketiga*, model pendidikan agama di mana siswa dari semua agama hanya

menerima satu pendidikan agama sesuai dengan satuan pendidikannya. Sebagian besar sekolah swasta bercirikan keagamaan menyelenggarakan model ketiga ini. *Keempat*, model pendidikan agama sesuai ketentuan pemerintah dengan tambahan materi keagamaan sesuai ciri khas keagamaan lembaganya. Model ini dilaksanakan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang mana ada pelajaran materi tambahan sesuai ciri khas lembaganya (Setyawan, 2014).

Dalam kaitannya dengan pendidikan budaya damai, pendidikan agama sangat berperan dalam menanamkan nilai-nilai perdamaian kepada siswa. Hal ini karena *pertama*, ajaran agama pada semua agama memberikan pedoman kepada umatnya dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia. *Kedua*, salah satu inti ajaran agama adalah memerintahkan senantiasa berhubungan baik dengan sesama manusia sebagai aspek kemanusiaan dan menjauhkan diri dari konflik. *Ketiga*, pendidikan agama diberikan kepada seluruh peserta didik pada semua jenjang pendidikan sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh penduduk Indonesia yang mengikuti proses pendidikan, baik formal maupun non-formal, dapat dipastikan mengikuti atau mempelajari pendidikan agama.

Akan tetapi, untuk mendapatkan hasil dari target pendidikan damai yang dimasukkan dalam materi pendidikan agama, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, pendidikan agama perlu mengadopsi materi-materi dari nilai perdamaian yang selaras dengan pendidikan agama. *Kedua*, perlu mempersiapkan guru pendidikan agama yang memiliki kesadaran untuk memberikan pendidikan damai.

Hal kedua ini bisa ditempuh dengan cara pendidikan dan pelatihan para guru pendidikan agama.

Kedua cara di atas perlu dilakukan secara bersama-sama agar tujuan pendidikan damai melalui pendidikan agama bisa tercapai. Kekurangan salah satunya akan menyebabkan tidak maksimalnya pencapaian target dari pendidikan damai yang dilaksanakan. Adopsi materi ke dalam perangkat kurikulum dan perangkat pembelajaran menjadi penting untuk memastikan bahwa materi perdamaian sudah benar-benar disampaikan dan guru memahami substansi dan tujuan dari pemberian materi tersebut. Oleh karena itu, pembuat kebijakan bersama dengan pihak terkait dan para ahli perlu menyusun materi-materi pendidikan perdamaian untuk diintegrasikan dalam pendidikan agama.

MENGENAL KALIMANTAN BARAT DAN DAERAH PASCA KONFLIK

Sosiokultural Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Kalimantan dengan luas wilayah 146.807 km² dan menjadi provinsi terluas keempat di Indonesia. Ibu kota Kalimantan Barat yaitu Kota Pontianak merupakan kota yang dilewati garis khatulistiwa. Wilayah Kalimantan Barat selain berbatasan darat dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, juga berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sarawak Malaysia. Hal ini menjadikan provinsi ini satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing karena antara Kalimantan Barat dan Sarawak telah terbuka jalan darat Pontianak–Entikong–Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km. Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki 3 (tiga) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan akses jalan darat yaitu PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau,

PLBN Aruk di Kabupaten Sambas dan PLBN Badau di Kabupaten Kapuas Hulu (BPS Kalbar, 2019).

Gambar 1
Wilayah Provinsi Kalimantan Barat



Sumber : BPS Kalbar, 2019.

Sebagian besar luas tanah di Kalimantan Barat adalah hutan (63,02%) dan areal perkebunan (16,82%). Wilayah pemukiman di Kalimantan Barat hanya berkisar 0,35 persen saja dengan lokasi pemukiman terbesar di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Sintang. Jumlah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 12 (dua belas) kabupaten dan 2 (dua) kota. Empat belas kabupaten/kota ini mencakup 174 kecamatan dan 2.076 desa/kelurahan. Adapun jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 berdasarkan hasil Proyeksi

Penduduk berjumlah 5.001.664 juta jiwa, di mana laki-laki berjumlah 2.544.860 juta jiwa dan perempuan sebanyak 2.456.804 juta jiwa (BPS Kalbar, 2019).

Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 sebanyak 2.451.399 orang, di mana 2.346.881 orang di antaranya bekerja (95,74 persen). Komposisi penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat masih didominasi oleh pekerja yang berpendidikan rendah, yaitu sekitar 67,6 persen adalah tamat SLTP ke bawah. Sedangkan lapangan usaha yang paling dominan adalah sektor pertanian yang menyerap sekitar 50,94 persen (BPS Kalbar, 2019).

Adapun kondisi pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat dalam data pada tabel 3.1. s.d. 3.4.

Tabel 3.1 Kondisi Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar di Kalimantan Barat Tahun 2018/2019

	Taman Kanak- kanak (TK)	Raudatul Athfal (RA)	Sekolah Dasar (SD)	Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Prasarana	785	167	4.419	422
Murid	59.836	6.947	585.936	53.312
Guru	2.916	706	34.550	4.446

Sumber : BPS Kalbar, 2019.

Table 3.2 Kondisi Pendidikan Menengah di Kalimantan Barat Tahun 2018/2019

	SMP	MTs	SMA	SMK	MA
Prasarana	1.323	323	437	221	147
Murid	233.517	40.381	123.652	67.731	19.901
Guru	14.184	3.599	7.485	4.288	1.589

Sumber : BPS Kalbar, 2019.

Adapun jumlah perguruan tinggi di Kalimantan Barat yang meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, dan politeknik dapat dilihat pada tabel 3.3. dan 3.4.

Tabel 3.3 Kondisi Perguruan Tinggi Umum di Kalimantan Barat tahun 2017/2018

	Perguruan Tinggi	Mahasiswa	Tenaga edukatif
Negeri	4	47.997	1.428
Swasta	44	42.184	1.524

Sumber : BPS Kalbar, 2019.

Tabel 3.4 Kondisi Perguruan Tinggi Agama di Kalimantan Barat Tahun 2017/2018

	Perguruan Tinggi	Mahasiswa	Tenaga edukatif
Negeri	1	6.717	70
Swasta	9	3.389	244

Sumber : BPS Kalbar, 2019.

Kondisi pendidikan di atas menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun masyarakat telah memiliki perhatian dengan menyediakan sarana pendidikan dan tenaga pendidik. Data di atas menunjukkan rasio antara guru dengan murid/siswa akan terlihat setiap guru rata-rata akan mengampu 11-20 murid/siswa. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya jumlah murid/siswa dibandingkan jumlah pendidik. Kondisi ini juga menunjukkan kemungkinan masih rendahnya minat bersekolah di masyarakat. Kondisi pendidikan yang demikian tentu akan berpengaruh pula terhadap perubahan sosial di masyarakat Kalimantan Barat.

Kondisi keberagaman di Provinsi Kalimantan Barat juga membentuk pluralitas sosial di mana terdapat berbagai agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Berdasarkan proyeksi BPS jumlah penganut agama di Kalimantan Barat pada tahun 2018 seperti ditunjukkan tabel 3.5.

Tabel 3.5 Komposisi penduduk berdasarkan agama tahun 2018

Agama	Jumlah	Persentase
Islam	3.238.669	59,72
Kristen Protestan	623.456	11,49
Katolik	1.207.078	22,26
Hindu	3.046	0,06
Budha	334.877	6,17
Lainnya	15.688	0,3

Sumber : BPS Kalbar, 2019.

Dari tabel 3.5, agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Kalimantan Barat sebesar 59,72%, dan diikuti oleh agama lainnya. Adapun agama yang masuk kategori lainnya di Kalimantan Barat adalah Konghucu dan agama lokal yang secara tradisional dianut oleh Etnis Dayak yaitu Kaharingan. Agama Konghucu secara tradisional dianut oleh masyarakat terutama etnis Tionghoa di Kota Singkawang, bahkan kegiatan peringatan tahun baru Imlek dan tradisi Cap Gomeh dilaksanakan besar-besaran di Kota Singkawang ini. Adapun kepercayaan Kaharingan merupakan kepercayaan lokal yang masih dianut dan dilestarikan oleh suku Dayak terutama yang berada di pedalaman (Haryanto, 2012.a). Mozaik sosial budaya ini membangun keragaman masyarakat Kalimantan Barat.

Guna melayani umat beragama dalam peribadatan, di lingkungan masyarakat juga tersedia fasilitas tempat ibadah. Jumlah tempat ibadah pada 2018 adalah sebagai berikut: masjid berjumlah 3.596, musala berjumlah 3.752, gereja Kristen berjumlah 3.062, gereja Katolik 2.853, pura berjumlah 21, vihara berjumlah 984, dan kelenteng berjumlah 76 unit. Jumlah-jumlah tersebut juga bersifat tentatif, karena data tiap kabupaten dan kota di Kalimantan Barat bersifat dinamis. Misalnya, jumlah klenteng yang terdata di Kota Singkawang melampaui jumlah data di Kalimantan Barat yaitu 270 klenteng sehingga Kota Singkawang sering disebut sebagai kota seribu klenteng (Haryanto, 2012.a).

Keragaman di Kalimantan Barat tidak hanya dalam hal agama saja, tetapi juga dalam hal etnis dan budaya. Sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa di

Kalimantan Barat terdapat berbagai suku bangsa atau etnis dengan suku dominan adalah suku Dayak dan Melayu. Suku Dayak 34,93 persen, suku Melayu 33,84 persen, kemudian diikuti oleh suku Jawa, Cina, Madura, Bugis dan suku lainnya (Ananta, dkk., 2016: 108) . Komposisi penduduk di Kalimantan Barat berdasarkan suku dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Komposisi Etnis di Kalimantan Barat Tahun 2010

No.	Suku Bangsa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1.	Dayak	785.755	746.234	1.531.989	34,93%
2.	Melayu	730.600	753.485	1.484.085	33,84%
3.	Jawa	231.280	195.598	427.238	9,74%
4.	Cina	188.662	169.789	358.451	8,17%
5.	Madura	139.815	135.054	274.869	6,27%
6.	Bugis	71.664	65.618	137.282	3,13%
7.	Sunda	26.903	22.627	49.530	1,13%
8.	Batak	15.289	11.197	26.486	0,60%
9.	Daya	10.382	12.308	22.690	0,52%
10.	Banjar	7.735	6.695	14.430	0,33%
11.	suku lainnya	32.002	26.304	58.306	1,33%

Sumber: Ananta, dkk., 2016: 108

Etnis Dayak mendiami bagian pedalaman Kalimantan Barat yang berkonsentrasi sebagai petani dan peladang, etnis Melayu kebanyakan berada di wilayah pesisir baik di perkotaan maupun di pedesaan yang umumnya menjadi pegawai dan pedagang, etnis Jawa umumnya bermukim di wilayah-wilayah lokasi transmigrasi dan perkotaan lainnya

dengan bidang pekerjaan petani, pegawai, dan pedagang, dan etnis Cina sebagian besar berada di perkotaan sebagai pedagang seperti di Pontianak dan Singkawang yang menurut sejarahnya dirintis oleh para penambang dari Cina. Adapun etnis Madura, Bugis, Banjar, dan etnis lainnya membaaur dalam lingkungan perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan bidang pekerjaan petani, pedagang, dan nelayan (Karim, 2008: 293).

Apabila dikaitkan dengan agama, mayoritas etnis Melayu beragama Islam, sebagaimana juga etnis Jawa, Madura, Bugis, dan Banjar yang umumnya berada di wilayah pesisir. Sedangkan etnis Dayak yang berada di pedalaman dikenal menganut agama Kristen (Protestan maupun Katolik) dan agama lokal. Adapun etnis Cina yang banyak di Pontianak dan Singkawang banyak yang menganut agama Buddha dan Konghucu, serta agama Kristen (Protestan atau Katolik). Kota Singkawang yang di sana 62 persen beretnis Cina bahkan dikenal sebagai basis umat Konghucu di mana perayaan tahun baru Imlek biasanya dirayakan besar-besaran. Namun, di Pontianak juga terdapat denominasi Gereja Kristen Kalimantan Barat (GKKB) yang cukup besar di mana umatnya sebagian besar beretnis Cina dan tergabung dalam aras Gereja Kristen Tionghoa Indonesia (Haryanto, 2012a; Haryanto, 2012b; Haryanto, 2013).

Pertemuan antarkelompok etnis dalam masyarakat sudah barang tentu menjadikan proses asimilasi terjadi. Akan ada sebagian dari satu kelompok mengambil atau beralih identitas keagamaan yang berbeda dengan kecenderungan etnisnya. Tidak tertutup kemungkinan proses konversi dari agama yang satu ke agama yang lain. Namun demikian, kecenderungan umum bahwa agama menjadi

ciri atau atribut kesukuan masih akan tetap ada. Suku Melayu dan suku Madura selalu identik dengan Islam, dan suku Dayak identik dengan Kristen akan menjadi persepsi umum. Hal ini karena agama atau kepercayaan telah menjadi spesifik bagi kelompok etnis tertentu dan bersifat komunal (terlepas dari persoalan apakah sifat komunal itu *indigenous* dari sistem dan struktur sosial komunitas itu sendiri atau datang dari luar). Pada tingkat ini agama saling berhimpit (*interwoven*) dengan sistem dan struktur sosial. Jika seseorang dari agama yang dianut oleh mayoritas dalam komunitasnya berpindah agama, maka seringkali ia harus meninggalkan atau menanggalkan keanggotaannya dalam komunitas. Contoh yang bagus tentang hal itu adalah agama Islam dan etnis Melayu. Islam dan Melayu menjadi identitas yang sama, menjadi Melayu berarti menjadi penganut Islam, menjadi Islam berarti menjadi Melayu, dan keluar dari Melayu berarti keluar dari Islam (Azra, 1998: x-xi). Di Kalimantan Barat ini, jika seorang suku Dayak berkonversi menjadi muslim, maka oleh masyarakatnya ia dipandang bukan lagi seorang Dayak tetapi telah menjadi seorang Melayu.

Keragaman etnis, budaya dan agama merupakan suatu kekayaan sosial, tetapi sekaligus juga dapat menjadi sumber terjadinya konflik. Hal ini karena keragaman tersebut membentuk identitas sosial, di mana individu-individu dalam kelompok-kelompok tersebut merefleksikan diri dalam kategori atau klasifikasi sosial tertentu. Identitas sosial dapat menjadi penguat terhadap ikatan kelompok atau komunitas masyarakat berdasarkan identitas yang sama. Namun identitas sosial yang dipandang sebagai pembeda dengan identitas kelompok lain menimbulkan sekat sosial

berupa perbandingan sosial sehingga muncul *in-group* dan *out-group* (Stets dan Burke, 2010).

Kondisi yang beragam seperti halnya di Kalimantan Barat tentu rawan tmenyulut konflik sosial. Terlebih jika keragaman identitas sosial tersebut berkelindan dengan aspek sosial lain seperti politik dan ekonomi. Oleh karena itu, wilayah Kalimantan Barat ini pun tak lepas dari sejarah konflik sosial, berupa konflik komunal antaretnik yang berbeda. Konflik ini melibatkan penduduk suku asli Kalimantan, yaitu suku Dayak dan suku Melayu, melawan etnis pendatang yaitu etnis Madura. Kerusuhan yang diakibatkan konflik tersebut pecah ketika terjadi saling tidak percaya antaretnis tersebut serta menganggap etnis lain sebagai penghalang dalam mencapai keinginan dari etnis tertentu ataupun dianggap sebagai pengganggu kehidupan etnis tersebut. Beberapa konflik di Kalimantan Barat ini melibatkan massa dalam jumlah cukup besar dan mengakibatkan puluhan ribu orang harus mengungsi, ratusan orang menjadi korban jiwa, serta tak terhitung pula korban harta benda.

Situasi konflik ini tentu bukanlah hal yang dikehendaki oleh masyarakat Kalimantan Barat. Oleh karena itu, berbagai aksi dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sendiri untuk melakukan upaya perdamaian yang berkelanjutan di Kalimantan Barat. Di antaranya melalui dunia pendidikan, materi-materi terkait kerukunan beragama, perdamaian sosial, dan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan orang lain menjadi perhatian penting, terlebih di daerah yang memiliki pengalaman konflik sosial.

Tiga Wilayah dalam Sejarah Konflik

Alqadrie (2006) dalam Masfiah (2015: 55) memberikan gambaran konflik di Kalimantan Barat sebagai sisi gelap dan menduduki ranking tertinggi dalam hal pertikaian antar-komunitas. Tahun 1963 terjadi konflik antara komunitas Cina keturunan/Tionghoa dengan komunitas Dayak; tahun 1967 konflik anggota komunitas Madura pedalaman dengan komunitas Dayak; tahun 1996/1997 konflik anggota komunitas Madura dengan Dayak; dan konflik antara Melayu Sambas dengan Madura Sambas terjadi pada tahun 1998/1999 di Kabupaten Sambas. Pada tahun 2000 terjadi lagi konflik antara anggota komunitas Madura Pontianak berbaur dengan anggota kelompok lainnya. Di antara beberapa konflik yang kemudian menyebabkan kerusuhan antaretnis terbilang cukup besar terjadi pada tahun 1996/1997. Konflik ini berawal di Sanggau Ledo dan merupakan konflik antara etnis Dayak yang berhadapan dengan etnis Madura (Cahyono, 2008: 2). Konflik ini menimbulkan korban puluhan orang meninggal.

Konflik berikutnya yang juga berskala besar terjadi di Kabupaten Sambas pada bulan Februari 1999. Konflik Sambas terjadi antara etnis Melayu yang dibantu oleh etnis Dayak berhadapan dengan etnis Madura. Akibat dari konflik ini adalah korban jiwa dan harta benda serta etnis Madura terpaksa harus keluar dari Sambas, dan kemudian direlokasi di sekitar Pontianak. Konflik Sambas ternyata tidak berhenti sampai di situ, bahkan kemudian masih berlanjut. Pada 25 Oktober tahun 2000 massa dalam jumlah besar mengepung GOR Pontianak, tempat penampungan pengungsi etnis Madura (Cahyono, 2008: 3). Kerusuhan ini melibatkan

etnis Melayu yang berhadapan dengan etnis Madura korban konflik Sambas yang mengungsi di penampungan sementara di GOR Pontianak.

Sekian tahun peristiwa konflik di Sambas, ternyata sampai saat ini masih menyisakan trauma dari perseteruan antaretnis ini. Masyarakat dari etnis Melayu yang tinggal di Sambas masih belum bisa menerima kembali etnis Madura untuk hidup dan tinggal di Sambas.

Penyelesaian konflik telah dilaksanakan melalui jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah dengan penyelesaian pada saat terjadi konflik dan upaya rekonsiliasi sesaat setelah konflik. Sementara penyelesaian jangka panjang terus diupayakan dengan menjaga iklim budaya damai di masyarakat. Pendidikan agama sebagai salah satu aspek dalam membentuk karakter dan kepribadian masyarakat menjadi relevan sebagai satu jalan dalam menyisipkan pesan-pesan perdamaian dan budaya damai. Hal ini sebagai salah satu upaya dalam menjaga kesadaran peserta didik akan perlunya budaya damai di masyarakat.

a. Kota Pontianak

Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat mempunyai keunikan dibanding kota lainnya di Indonesia, karena letaknya di garis khatulistiwa dan tidak banyak kota yang memiliki pemandangan sungai. Pemandangan perahu besar dan kecil yang lalu lalang menyusuri Sungai Kapuas di malam hari membuat suasana di tepi sungai terasa lengang dan keindahan lampu yang menghiasi kota menimbulkan kesan meriah

bagi Pontianak yang dibelah oleh Sungai Kapuas sebagai salah satu sungai terbesar di Kalimantan. Kerajaan – lebih tepatnya Kesultanan – Pontianak didirikan Syarif Abdurrahman Al Qadri, 23 Oktober 1771. Bersama keluarga dan pengikutnya, menebas hutan dan membangun permukiman di tepi pertemuan Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Landak. Peristiwa pembukaan pemukiman itu kini diabadikan sebagai Hari Jadi Kota Pontianak. Di lokasi itu berdiri sekarang Istana Qadariah. Dari tahun ke tahun, daerah baru itu berubah jadi kawasan perdagangan. Enam tahun kemudian, Abdurrahman memproklamasikan berdirinya kerajaan Islam bernama Kesultanan Pontianak (Usman, 2011:14).

Kota Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat yang sudah barang tentu masyarakatnya (penduduknya) lebih beragam dibandingkan dengan daerah yang bukan sebagai ibu kota provinsi, baik dilihat dari varian etnis, agama, budaya maupun tingkat pendidikannya. Realitas keragaman tersebut mempunyai implikasi kuantitas permasalahan yang muncul juga lebih banyak.

Diskursus dalam pembahasan ini hanya difokuskan pada keadaan masyarakat Kota Pontianak dalam perspektif etnis asal dan agama yang dipeluk, karena kedua hal tersebut mempunyai relevansi dengan tema penelitian ini, yakni pendidikan budaya damai, khususnya pada sekolah jenjang menengah atas.

Jumlah penduduk kota Pontianak per tahun 2016 sebanyak 653.030 orang. Relevan dengan fokus penelitian ini (pendidikan budaya damai), komposisi penduduk

berdasarkan etnis dan agama dapat dilihat pada tabel 3.7. dan tabel 3.8.

Tabel. 3.7 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Berdasarkan Etnis

No.	Etnis Asal	Jumlah
1.	Tionghoa	203.745 (31,2%)
2.	Melayu	170.441 (26,1%)
3.	Bugis	85.547 (13,1%)
4.	Jawa	76.405 (11,7%)
5.	Madura	41.794 (6,4%)
6.	Dayak, dll.	75.098 (11,5%)
	JUMLAH	653.030 (100%)

Data diolah berdasarkan sumber dari BPS Kota Pontianak Tahun 2016.

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa Pontianak didominasi oleh etnis Tionghoa. Selain Tionghoa, etnis dominan kedua adalah etnis Melayu sebagai penduduk asli. Menarik pula untuk dicermati bahwa ternyata persentase etnis pendatang yang berasal dari luar Kalimantan Barat yang tinggal di Pontianak cukup besar. Beragamnya etnis ini tentu akan mempengaruhi pola kehidupan sosial dan kemasyarakatan di Kota Pontianak, karena sedikit banyak etnis dari luar akan membawa pula kebiasaan dan budaya dari tempat asalnya.

Tabel. 3.8 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Berdasarkan Agama.

No.	Agama yang dipeluk	Jumlah
1.	Islam	509.437 (76,3%)
2.	Buddha	85.280 (12,8%)
3.	Katolik	39.794 (6%)
4.	Kristen	32.570 (4,9%)
5.	Hindu	355 (0,05%)
6.	Lainnya	8 (0,01%)
	JUMLAH	667.444 (100%)

Sumber: BPS Kota Pontianak Tahun 2020

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa pemeluk agama Islam adalah paling dominan di Kota Pontianak. Sebagaimana variasi penduduk dilihat dari etnis asal penduduk Kota Pontianak di muka, maka dengan beragamnya agama yang dipeluk oleh penduduk jika tidak dikelola dengan cermat dan baik akan mudah muncul permasalahan yang bernuansa (dinuansakan) agama. Realitas kondisi penduduk (masyarakat) Kota Pontianak di muka secara hipotetik ada dan/atau tidak ada pengaruhnya ke dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK). Adapun data pendidikan menengah di Kota Pontianak seperti diunjukkan pada tabel 3.9.

Tabel 3.9 Jumlah Sekolah, Guru , dan Siswa SMA di Kota Pontianak 2017/2018

KECAMATAN	SEKOLAH			GURU			SISWA		
	N	S	J	N	S	J	N	S	J
Pontianak Selatan	4	8	12	162	217	379	3.178	3.877	7.055
Pontianak Timur	2	2	4	38	56	94	845	1.137	1.982
Pontianak Barat	1	6	7	41	73	114	742	901	1.643
Pontianak Utara	1	6	7	44	41	85	797	1.169	1.966
Pontianak Kota	2	8	10	93	144	237	2.105	2.284	4.389
Pontianak Tenggara	0	7	7	0	119	119	0	2.149	2.149
Total Jumlah	10	37	47	378	650	1.028	7.667	11.517	19.184

Keterangan : N=Negeri, S=Swasta, J=Jumlah

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2019: 111

Tabel 3.10 Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa SMK di Kota Pontianak 2017/2018

KECAMATAN	SEKOLAH			GURU			SISWA		
	N	S	J	N	S	J	N	S	J
Pontianak Selatan	3	5	8	96	147	243	1.600	2.527	4.127
Pontianak Timur	1	2	3	33	38	71	804	626	1.430
Pontianak Barat	2	5	7	133	77	210	2.080	914	2.994
Pontianak Utara	3	3	6	106	75	181	1.645	1.146	2.791
Pontianak Kota	1	4	5	37	65	102	1.035	806	1.841
Pontianak Tenggara	0	2	2	0	28	28	0	312	312
Total Jumlah	13	25	36	411	437	843	7.173	6.341	13.506

Keterangan : N=Negeri, S=Swasta, J=Jumlah

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2019: 113

Tabel 3.11 Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa di Kota Pontianak 2017/2018

KECAMATAN	SEKOLAH			GURU			SISWA		
	N	S	J	N	S	J	N	S	J
Pontianak Selatan	1	1	2	43	15	58	1.662	142	1.804
Pontianak Timur	0	1	1	0	9	9	0	95	95
Pontianak Barat	1	5	6	5	36	41	839	585	1.424
Pontianak Utara	1	4	5	0	33	33	523	440	963
Pontianak Kota	0	5	5	3	39	42	0	827	827
Pontianak Tenggara	0	1	1	1	8	9	0	108	108
Total Jumlah	3	17	20	52	140	192	3.024	2.197	5.221

Keterangan : N=Negeri, S=Swasta, J=Jumlah

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2019: 112

Berdasarkan data-data di atas, terlihat jumlah siswa terbanyak belajar di SMA, dan selanjutnya SMK yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun jumlah siswa Madrasah Aliyah (MA) yang berada di naungan Kementerian Agama lebih kecil dibandingkan SMA dan SMK.

b. Kabupaten Bengkayang

Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu kabupaten di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah ini sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Sambas, yang oleh karena pemekaran pada tahun 2006 dibagi menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas,

Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Singkawang. Kabupaten Bengkayang terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Utara dan berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia Timur. Wilayah Kabupaten Bengkayang terdiri dari pantai, dataran rendah, dan pegunungan.

Penduduk Kabupaten Bengkayang yang sebagian besar beretnis Dayak menempati wilayah pegunungan. Sebagian lainnya adalah etnis Melayu yang bertempat tinggal di wilayah pesisir. Etnis Tionghoa dan etnis pendatang menempati wilayah kota dan wilayah transmigrasi. Pendatang yang ada sebagian besar adalah suku Jawa yang datang pada saat transmigrasi. Mereka bertempat tinggal di kompleks transmigran. Sebagian pendatang dari etnis Jawa, Bugis, Madura dan lainnya lebih banyak bertempat tinggal di kota.

Agama yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Bengkayang adalah Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Gambaran mengenai agama yang dianut warga Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.12 Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2020

No	Agama	Jumlah Penganut	Persentase
1	Islam	101.512	35,4
2	Katolik	88.501	30,8
3	Kristen	76.364	26,6
4	Hindu	292	0,1
5	Budha	17.508	6,1

6	Konghucu	2.644	0,9
7	Kepercayaan	300	0,1
JUMLAH		287.121	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bengkayang per tanggal 1 Februari 2020

Adapun data pendidikan menengah di Kabupaten
Bengkayang sebagai berikut ini:

Tabel 3.13 Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa SMA di Kabupaten
Bengkayang Tahun 2018

KECAMATAN	SEKOLAH			GURU			SISWA		
	N	S	J	N	S	J	N	S	J
1. Sungai Raya	1	1	2	7	4	1	193	20	213
2. Capkala	1	0	1	13	0	13	242	0	242
3. Sungai Raya Kepulauan	1	0	1	21	0	21	354	0	354
4. Samalantan	3	1	4	47	5	52	674	206	880
5. Monterado	1	0	1	11	0	11	190	0	190
6. Lembah Bawang	1	0	1	12	0	12	71	0	71
7. Bengkayang	3	3	6	82	32	114	1.445	1.031	2.476
8. Teriak	2	0	2	28	0	28	467	0	467
9. Sungai Betung	1	0	1	20	0	20	294	0	294
10. Ledo	2	0	2	36	0	36	490	0	490
11. Suti Semarang	1	0	1	11	0	11	42	0	42
12. Lumar	1	0	1	20	0	20	155	0	155
13. Sanggau Ledo	1	1	2	30	8	38	532	64	596
14. Tujuh Belas	1	0	1	13	0	13	132	0	132
15. Seluas	2	0	2	36	0	36	382	0	382
16. Jagoi Babang	1	0	1	15	0	15	212	0	212

17. Siding	2	0	2	13	0	13	109	0	109
JUMLAH	25	6	31	415	49	464	5.984	1.321	7.305

Keterangan : N=Negeri, S=Swasta, J=Jumlah

Sumber: BPS Kabupaten bengkayang, 2019: 92-93

Tabel 3.14 Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa SMK di Kabupaten Bengkayang Tahun 2018

KECAMATAN	SEKOLAH			GURU			SISWA		
	N	S	J	N	S	J	N	S	J
1. Sungai Raya	1	0	1	20	0	20	373	0	373
2. Capkala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sungai Raya Kepulauan	1	0	1	11	0	11	242	0	242
4. Samalantan	1	0	1	13	0	13	170	0	170
5. Monterado	1	0	1	23	0	23	446	0	446
6. Lembah Bawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bengkayang	2	0	2	55	0	55	649	0	649
8. Teriak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sungai Betung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Ledo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Suti Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Lumar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Sanggau Ledo	1	0	1	22	0	22	234	0	234
14. Tujuh Belas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Seluas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Jagoi Babang	1	0	1	7	0	7	80	0	80
17. Siding	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	8	0	8	151	0	151	2.194	0	2.194

Keterangan : N=Negeri, S=Swasta, J=Jumlah

Sumber: BPS Kabupaten bengkayang, 2019: 94-95

Tabel 3.15 Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa di Kabupaten Bengkayang Tahun 2018

KECAMATAN	SEKOLAH			GURU			SISWA		
	N	S	J	N	S	J	N	S	J
1. Sungai Raya	0	2	2	0	17	17	0	164	164
2. Capkala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sungai Raya Kepulauan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Samalantan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Monterado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Lembah Bawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bengkayang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Teriak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sungai Betung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Ledo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Suti Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Lumar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Sanggau Ledo	1	0	1	21	0	21	202	0	202
14. Tujuh Belas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Seluas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Jagoi Babang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Siding	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	1	2	3	21	17	38	202	164	366

Keterangan : N=Negeri, S=Swasta, J=Jumlah

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang 2019

a. Kabupaten Sambas

Wilayah Kalimantan Barat pada masa dahulu terbagi dalam wilayah kerajaan atau kesultanan, yakni daerah Kesultanan Sambas, Kerajaan atau Panembahan Mempawah, dan Kerajaan atau Kesultanan Pontianak yang pada masa kolonial Belanda disatukan sebagai daerah Afdelling van Singkawang. Adapun wilayah Kesultanan

Sambas sendiri meliputi Singkawang, Bengkayang, Pemangkat, dan Sambas. Setelah Perang Dunia II, wilayah Kesultanan Sambas menjadi otonom dengan ibu kota di Singkawang dan terdiri atas 4 kawedanan yaitu, Singkawang, Pemangkat, Sambas, dan Bengkayang. Setelah kemerdekaan, berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 1959 terkait pembentukan Kabupaten Sambas, tahun 1963 sistem kawedanan dihapuskan sehingga Kabupaten Sambas memiliki 19 kecamatan termasuk Singkawang. Tahun 1999, dibentuklah Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang sehingga kedudukan pemerintahan daerah Kabupaten Sambas dipindahkan dari kota Singkawang ke Kota Sambas (BPS Kabupaten Sambas, 2020: 34-35).

Kabupaten Sambas didominasi daerah dataran rendah. Oleh karena itu, permasalahan genangan banjir kerap terjadi di beberapa tempat. Penduduk Kabupaten Sambas yang pada tahun 2013 sebanyak 667.921 orang, didominasi oleh orang yang beragama Islam (87,7%). Secara etnisitas suku asli di Kabupaten Sambas didominasi oleh suku Melayu. Kabupaten Sambas dikenal pula sebagai “Serambi Mekah” karena dalam sejarahnya banyak ulama besar di Kalimantan Barat bahkan internasional berasal dari sini. Dalam melaksanakan pembangunan di bidang agama, kondisi yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya pendidikan dan pemahaman agama serta peran lembaga keagamaan pada masyarakat, selain itu, pengalaman yang dimiliki juga belum optimal dan belum mampu mengimbangi menguatnya pengaruh negatif budaya luar sebagai akibat dari pengaruh globalisasi (Pemerintah Kabupaten Sambas, 2011).

Komposisi umat beragama di Kabupaten Sambas dapat dilihat pada tabel 3.16.

Tabel 3.16 Komposisi Umat Beragama di Kabupaten Sambas Tahun 2019.

No	Agama	Jumlah Penganut	Prosentase
1	Islam	560.286	88
2	Katolik	18.186	2,86
3	Kristen	11.645	1,83
4	Hindu	194	0,03
5	Budha	43.518	6,83
6	Lainnya	3.019	0,47
	JUMLAH	636.848	100

Sumber : BPS Kabupaten Sambas, 2019: 153

Jumlah rumah ibadat di Kabupaten Sambas untuk umat Islam terdapat 692 masjid dan 392 musala. Adapun untuk peribadatan umat Katolik terdapat 75 gereja Katolik dan 11 kapel. Umat Kristen Protestan memiliki 95 gereja, umat Buddha 136 vihara, umat Hindu 2 pura, dan umat Konghucu 36 klenteng (BPS Kabupaten Sambas, 2020: 152).

Berdasarkan proyeksi BPS Kabupaten Sambas, jumlah penduduk Kabupaten Sambas berjumlah 535.725 jiwa di tahun 2019. Persebaran penduduk dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Pemangkat sekitar 425 jiwa perkilometer persegi, dan penduduk dengan kepadatan terendah di Kecamatan Sajingan Besar yaitu 8 jiwa perkilometer persegi (BPS Kabupaten Sambas, 2020: 65). Adapun data pen-

didikan menengah di Kabupaten Sambas dapat dilihat dalam tabel 3.17 hingga tabel 3.19.

Table 3.17 Jumlah Sekolah, Guru , dan Siswa SMA di Kabupaten Sambas Tahun 2019

KECAMATAN	SEKOLAH			GURU			SISWA		
	N	S	J	N	S	J	N	S	J
Selakau	2	1	3	41	3	44	839	39	878
Selakau Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemangkat	2	2	4	47	18	65	900	482	1.382
Semparuk	1	0	1	31	0	31	555	0	555
Salatiga	1	0	1	21	0	21	386	0	386
Tebas	3	1	4	66	7	73	1.286	107	1.393
Tekarang	1	0	1	21	0	21	392	0	392
Sambas	2	3	5	70	32	102	1.395	387	1.782
Subah	2	0	2	24	0	24	255	0	255
Sebawi	1	0	1	18	0	18	233	0	233
Sajad	1	0	1	17	0	17	291	0	291
Jawai	1	0	1	28	0	28	551	0	551
Jawai Selatan	1	0	1	14	0	14	248	0	248
Teluk Keramat	4	0	4	77	0	77	1.720	0	1.720
Galing	2	0	2	32	0	32	528	0	528
Tangaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sejangkung	1	0	1	21	0	21	323	0	323
Sajingan Besar	1	0	1	9	0	9	70	0	70
Paloh	3	0	3	38	0	38	638	0	638
Jumlah Total	29	7	36	575	60	635	10.610	1.015	11.625

Keterangan: N=Negeri, S=Swasta, J=Jumlah

Sumber: BPS Kabupaten Sambas, 2019: 115-117

Tabel 3.18 Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa SMK di Kabupaten Sambas Tahun 2019

KECAMATAN	SEKOLAH			GURU			SISWA		
	N	S	J	N	S	J	N	S	J
Selakau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selakau Timur	1	0	1	22	0	22	421	0	421
Pemangkat	2	1	3	65	6	71	1.206	199	1.405
Semparuk	1	0	1	23	0	23	653	0	653
Salatiga	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tebas	1	2	3	22	10	32	587	247	834
Tekarang	1	0	1	12	0	12	190	0	190
Sambas	2	2	4	48	17	65	1.121	550	1.671
Subah	1	0	1	14	0	14	111	0	111
Sebawi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jawai	1	1	2	21	4	25	301	18	319
Jawai Selatan	1	0	1	25	0	25	534	0	534
Teluk Keramat	2	1	3	56	5	61	1.176	29	1.205
Galing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tangaran	1	0	1	13	0	13	138	0	138
Sejangkung	1	0	1	8	0	8	78	0	78
Sajingan Besar	1	0	1	22	0	22	158	0	158
Paloh	1	0	1	33	0	33	666	0	666
Jumlah Total	17	7	24	384	42	426	7.440	1.043	8.483

Keterangan: N=Negeri, S=Swasta, J=Jumlah

Sumber: BPS Kabupaten Sambas, 2019: 118-120

Tabel 3.19 Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa di Kabupaten Sambas Tahun 2019.

KECAMATAN	SEKOLAH			GURU			SISWA		
	N	S	J	N	S	J	N	S	J
Selakau	2	1	3	41	3	44	839	39	878
Selakau Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemangkat	2	2	4	47	18	65	900	482	1.382
Semparuk	1	0	1	31	0	31	555	0	555
Salatiga	1	0	1	21	0	21	386	0	386
Tebas	3	1	4	66	7	73	1.286	107	1.393
Tekarang	1	0	1	21	0	21	392	0	392
Sambas	2	3	5	70	32	102	1.395	387	1.782
Subah	2	0	2	24	0	24	255	0	255
Sebawi	1	0	1	18	0	18	233	0	233
Sajad	1	0	1	17	0	17	291	0	291
Jawai	1	0	1	28	0	28	551	0	551
Jawai Selatan	1	0	1	14	0	14	248	0	248
Teluk Keramat	4	0	4	77	0	77	1.720	0	1.720
Galing	2	0	2	32	0	32	528	0	528
Tangaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sejangkung	1	0	1	21	0	21	323	0	323
Sajingan Besar	1	0	1	9	0	9	70	0	70
Paloh	3	0	3	38	0	38	638	0	638
Jumlah Total	29	7	36	575	60	635	10.610	1.015	11.625

Keterangan: N=Negeri, S=Swasta, J=Jumlah

Sumber: BPS Kabupaten Sambas, 2019: 121-123

DARI SEKOLAHAN MEMBANGUN PERDAMAIAN

Mengenal SMA di Wilayah Pascakonflik

Di Kalimantan Barat telah terjadi beberapa konflik besar, seperti di Kabupaten Bengkayang (Sanggau Ledo) pada tahun 1997 dan di Sambas pada tahun 1999. Salah satu akibat dari konflik tersebut adalah terusirnya etnis Madura dari Sambas yang kemudian mengungsi dan tinggal di Kota Pontianak. Oleh karena itu, sampel lokasi dalam penelitian juga diambil dari tiga lokasi kabupaten tersebut.

Dengan mengambil lokasi di tiga kabupaten maka lokus penelitian mengambil beberapa sekolah untuk dijadikan sampel penelitian ini. Untuk merepresentasikan penduduk di masing-masing kota/kabupaten maka setiap kota/kabupaten tersebut diambil sampel SMA negeri, dengan asumsi bahwa siswa sekolah-sekolah negeri tersebut beragam baik etnis maupun agamanya dengan komposisi tidak jauh berbeda dengan masyarakat di kabupaten/kota tersebut. Oleh karena itu, di Pontianak diambil sampel

SMAN 1 Pontianak, di Kabupaten Bengkayang diambil SMAN 1 Bengkayang, dan di Kabupaten Sambas diambil SMAN 1 Sambas.

Selain sekolah yang memiliki kecenderungan plural, sampel penelitian juga diambil dari sekolah swasta yang memiliki siswa cenderung homogen. Oleh karena itu, pengambilan sampel SMA swasta juga memperhatikan kondisi kabupaten/kota yang menjadi lokasi penelitian. Masyarakat Kota Pontianak yang cenderung urban diwakili oleh SMA Bina Utama. SMA ini adalah SMA umum, artinya bukan SMA di bawah yayasan keagamaan tertentu. Sedangkan untuk Kabupaten Bengkayang yang masyarakatnya didominasi oleh Suku Dayak dan beragama Kristen dan Katolik, maka SMA yang dipilih adalah SMA St. Fransiskus Asisi (SMA di bawah yayasan keagamaan Katholik) dan SMA Shalom (SMA di bawah yayasan keagamaan Kristen). Sedangkan untuk Kabupaten Sambas dengan memperhatikan gambaran kondisi sosial masyarakatnya maka sampel yang diambil adalah SMA Muhammadiyah Sambas yang berada di bawah yayasan keagamaan Islam dan SMA Santo Bonaventura Sambas yang berada di bawah naungan yayasan keagamaan Katolik.

a. Profil SMA Negeri

Dari setiap kabupaten/kota yang menjadi lokasi penelitian ini diambil satu SMA negeri, yang ketiganya adalah SMA Negeri 1. Berikut adalah sekilas profil sekolah-sekolah tersebut.

SMAN 1 Pontianak berlokasi di Jl. Gusti Johan Idrus, Akcaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113. Sekolah ini berdiri pada tahun 1953 dengan SK Pendirian Nomor 3467/B tanggal 14 Juli 1953 (<http://schoolmap.dindikptk.net>).

Visi yang dicanangkan oleh SMA Negeri 1 Pontianak adalah “unggul dalam prestasi, berakhlak mulia dan berwawasan lingkungan”. Sedangkan misinya yang merupakan penjabaran dari visi adalah (1) membentuk generasi intelektual tinggi sesuai dengan kemajuan IPTEK dan generasi yang berkepribadian dan berbudi pekerti luhur, (2) membentuk generasi yang terampil serta peduli terhadap lingkungan, dan (3) menciptakan keselarasan serta keseimbangan emosi dan intelektual berdasar akhlak mulia bagi peserta didik (<https://www.sman1-ptk.sch.id>).

SMAN 1 Bengkayang berada di Jl. Sanggau Ledo No. 17, Bengkayang. Visi sekolah adalah “terwujudnya SMAN 1 Bengkayang yang unggul dalam mutu dan prestasi, terampil, berwawasan lingkungan serta berbudaya berlandaskan keimanan”. Misi sekolah ini adalah (1) melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, efisien sehingga setiap siswa berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, (2) melaksanakan pembinaan di bidang seni sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki setiap siswa, agar tumbuh sikap kreatif dan percaya diri dalam dirinya sehingga mampu tampil di masyarakat, (3) melaksanakan pembinaan dan pelatihan olahraga sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki siswa sehingga memiliki daya fisik yang sehat, tangguh dan tumbuh rasa sportifitas dalam dirinya, (4) melak-

sanakan pembinaan dan pelatihan pramuka agar terwujud siswa yang berkarakter, (5) melaksanakan pelatihan keterampilan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bekal untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut, (6) mewujudkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut untuk meningkatkan iman dan takwa serta kepribadian yang mulia sebagai dasar berpikir, berkata, dan berbuat yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari, (7) melestarikan lingkungan dan menjaga keindahan, kebersihan, dan ketertiban sekolah, (8) menetapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua siswa.

SMAN 1 Sambas terletak di Jl. Pendidikan, Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, 79463. Sekolah ini memiliki visi “sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif”. Sedangkan misinya adalah (1) merumuskan kebijakan sekolah tentang program-program peningkatan mutu sekolah dalam rangka pemenuhan standar nasional untuk mencapai sekolah mandiri, (2) mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, (3) menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk kegiatan pendidikan, (4) dikembangkannya kompetensi keagamaan, yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan keagamaan dalam menjalankan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (5) mengembangkan kompetensi akademik, yang meliputi pengetahuan, sikap, kemampuan, dan keterampilan guna meningkatkan wawasan ilmu dan teknologi, (6) mengembangkan kompetensi

ekonomi, yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan guna memenuhi kebutuhan ekonomi agar dapat memiliki kehidupan yang layak, (7) mengembangkan kompetensi sosial pribadi, yang meliputi pengetahuan sistem nilai, sikap, dan keterampilan agar memiliki perikehidupan yang adaptif sebagai warga negara, warga masyarakat yang demokratis.

b. Profil SMA Swasta

Sekolah menyampaikan profil SMA negeri di tiga wilayah penelitian ini, berikut akan dipaparkan profil SMA swasta yang menjadi sampel penelitian penanaman pendidikan budaya damai di SMA di wilayah pascakonflik. SMA-SMA tersebut adalah SMA Bina Utama (Kota Pontianak), SMA St. Fransiskus Asisi dan SMA Shalom (Kabupaten Bengkayang), dan SMA Muhammadiyah Sambas dan SMA St. Bonaventura Sambas (Kabupaten Sambas).

SMA Bina Utama Pontianak merupakan SMA yang bernaung di bawah yayasan non keagamaan (umum). Sekolah ini berada di Jalan H. Rais A. Rahman No. 65, Kelurahan Sungai Jawi, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat.

Visi SMA Bina Utama adalah “terwujudnya peserta didik yang bertakwa, santun, unggul dalam prestasi dan peduli lingkungan”. Sedangkan misinya adalah: (1) mengembangkan semangat untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, (2) meningkatkan semangat siswa untuk memenuhi ketertiban dan kedisiplinan

dalam sekolah secara optimal, (3) mengembangkan pembelajaran dan bimbingan dengan intensif untuk mencapai ketuntasan belajar dan daya serap yang tinggi, (4) menumbuhkan semangat berolahraga dengan berlatih secara intensif kepada semua warga sekolah, (5) menumbuhkan cinta seni sekaligus mampu berkarya dan berkreasi serta berprestasi di bidang seni dan budaya, (6) meningkatkan keterampilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, (7) mengembangkan semangat kompetisi tingkat nasional maupun global, (8) mengembangkan kultur sekolah yang berwawasan pelestarian lingkungan hidup, (9) meningkatkan kepedulian warga sekolah terhadap pencegahan pencemaran lingkungan, dan (10) meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan, dan pelestarian fungsi lingkungan sekolah.

Lokasi kedua penelitian ini yaitu di Kabupaten Bengkayang, yang berjarak sekitar 2020 km arah utara dari Kota Pontianak. Di lokasi ini terdapat dua sekolah swasta yang menjadi lokus penelitian. *Pertama*, SMA St. Fransiskus Asisi, yang berdiri tahun 1987 dan merupakan sekolah swasta yang bernaung di bawah Yayasan Santo Pius X Bengkayang, yayasan keagamaan Katolik. Visi SMA St. Fransiskus Asisi adalah “terdidik, cerdas, berprestasi, kreatif, berlandaskan cinta kasih”. Selanjutnya, sebagai penjabaran dari visi, misi sekolah ini adalah (1) melaksanakan pembelajaran yang kreatif, mandiri, peduli lingkungan, dan bertanggung jawab ber-

landaskan cinta kasih, (2) membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, (3) memberdayakan tenaga pendidik dan peserta didik agar mampu berkreatifitas, terampil, dan bertanggung jawab, (4) mengembangkan kemampuan akademik dan non akademik peserta didik yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, (5) menanamkan budaya sopan santun dan beradab dalam pergaulan berlandaskan cinta kasih.

Kedua, SMA swasta yang berada di Kabupaten Bengkayang yang menjadi lokus penelitian adalah SMA Shalom Bengkayang. Sekolah ini didirikan oleh Yayasan Anugerah Bengkayang yang merupakan yayasan keagamaan Kristen. Visi sekolah ini adalah “menyiapkan generasi muda dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan tanpa mengabaikan nilai-nilai rohani. Misi sekolah adalah (1) melaksanakan pembelajaran yang efektif dan bimbingan secara optimal sehingga setiap siswa berkembang sesuai potensi yang dimiliki, (2) menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak, (3) melaksanakan pembinaan secara konsisten dan teratur, (4) melaksanakan pembinaan pelatihan olahraga, kesenian, sesuai dengan bakat dan minat siswa, (5) menumbuhkan kesadaran warga sekolah sehingga tercipta lingkungan sekolah yang sehat, bersih, teratur, dan indah, (6) meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan TIK.

Wilayah kabupaten yang ketiga yaitu di Kabupaten Sambas. Di wilayah ini terdapat SMA Muhammadiyah Sambas dan SMA St. Bonaventura. SMA Muhammadiyah Sambas yang beralamat di Jalan Masudi, Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas merupakan sekolah di bawah Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sambas. Visi sekolah ini adalah “beriman, berilmu, dan mandiri. Unggul dalam prestasi olahraga, kompetitif dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa”. Sementara itu misinya adalah (1) meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang kognitif, afektif, dan psiko-motorik, (2) mempersiapkan siswa untuk mengikuti olimpiade di bidang sains dan keagamaan, (3) melatih siswa dalam hal baca tulis kandungan Al-Qur'an, (4) meningkatkan kreativitas siswa melalui pelatihan kecakapan hidup, dan (5) meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler olahraga dan pramuka.

Sekolah swasta yang terakhir adalah SMA St. Banoventura yang beralamat di Jl. Rumah Sakit No. 94, Ps. Melayu, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sekolah ini adalah sekolah di bawah yayasan swasta Katolik, yaitu Yayasan Amkar (Amal dan Kurban) yang ada di Kota Sambas. Visi sekolah adalah “cerdas, terampil, dan berkarakter” dan misinya adalah (1) melaksanakan pembelajaran, bimbingan, dan pelatihan yang efektif, inovatif, dan, kreatif (2) mengoptimalkan pengembangan diri dan muatan lokal, (3) melaksanakan pengembangan sikap rendah hati dan

cinta kasih. Selain itu, sekolah ini memiliki tujuan: (1) menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bekerja sama, (2) meningkatkan prestasi sekolah, (3) meningkatkan keterampilan siswa dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, (4) meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang akademik dan nonakademik, (5) mengembangkan budi pekerti luhur siswa. Karakter dan budaya sekolah yang dikembangkan adalah CERDIK yang merupakan singkatan dari Cinta kasih, Empati, Rendah hati, Disiplin, Intelekt, dan Kerja sama.

Budaya Damai di SMA Wilayah Pascakonflik

Lokasi penelitian secara umum berada di Provinsi Kalimantan Barat yang berdasarkan catatan sejarah memiliki riwayat konflik yang cukup panjang. Potensi konflik ini tersimpan lama dan kemudian pecah ketika dipicu oleh hal-hal tertentu yang menimbulkan sentimen antaretnis. Memperhatikan sejarah panjang konflik yang ada dapat dikatakan bahwa Kalimantan Barat merupakan daerah yang memiliki potensi dan rentan untuk terulangnya kejadian konflik antaretnis.

Menyadari akan tingginya potensi konflik antaretnis, maka pemerintah bersama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama berusaha bersama-sama untuk meningkatkan keharmonisan hubungan antarkelompok. Dengan hubungan baik antarwarga, meski berbeda etnis maupun agama, diharapkan akan meminimalisir terjadinya konflik komunal.

Hasil sebuah kajian mengenai peran lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam upaya pencegahan konflik di Kalimantan Barat menyampaikan beberapa hal, *Pertama* selain faktor eksternal, seperti stabilitas nasional, Faktor internal berupa peran lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang diwakili oleh pimpinan dan tokoh kelompok etnis memiliki peran besar dalam pencegahan konflik. *Kedua*, lembaga pemerintah dan nonpemerintah mempunyai peran yang berbeda terkait kompleksitas konflik. Termasuk dalam hal ini peningkatan dan pengefektifan kinerja lembaga intelijen daerah, alat negara pendukung keamanan, program multikulturalisme oleh Kesbangpol Kalimantan Barat, dukungan sektor pendidikan dalam semua jenjang untuk mengajarkan toleransi, peranan ormas berbasis etnis maupun keagamaan (di antaranya Pancur Kasih, Muhammadiyah, MABM, IKBM, MABT, dan DAD) dalam mengedukasi masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat di bidangekonomi. *Ketiga*, strategi-strategi yang dilakukan lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah turut berkontribusi bagi kondisi damai di Kalimantan Barat (The Habibi Center, 2015: 126-128).

Oleh karena itu, ada beberapa mekanisme yang dilakukan lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah. *Pertama*, meningkatkan koordinasi antarlembaga, selain juga penguatan peran lembaga tersebut di masyarakat sehingga akan memberikan kemudahan dalam berinteraksi untuk bisa membawa masyarakat dari potensi konflik dan kekerasan ke arah positif. *Kedua*, sistem peringatan dini yang telah dibangun mampu mencegah meluasnya konflik di Kalimantan Barat. *Ketiga*, keterlibatan masyarakat dalam proses pencegahan konflik untuk mengatasi keterbatasan

yang dimiliki lembaga pemerintah dan nonpemerintah. *Keempat*, penyelesaian perselisihan alternatif, yaitu melalui musyawarah antarkelompok atau menggunakan mekanisme adat.

Upaya menciptakan kebersamaan sebagai sesama warga Kalimantan Barat juga diupayakan dengan melalui semboyan atau yel-yel, yaitu *Adil Ka' Talino Bacuramin Ka' Saruga Basengat Ka' Jubata*, yang berarti “dengan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa dan dengan berpedoman pada ajaran agama/kepercayaan, bersikap adil terhadap sesama manusia, bersikap dan berbuat baik sebagaimana diyakini di surga yang penuh kebaikan, bernafas atau hidup (bersyukur dan ketergantungan terhadap Tuhan)”. Semboyan tersebut kemudian dijadikan sebagai semacam salam pembuka pada acara-acara seremonial, pada setiap ceramah/pidato¹. Selanjutnya audiens akan menjawab “arus...arus...arus”, yang artinya, “amin” atau bisa diartikan “harus” dan diucapkan sebanyak tiga kali sebagai simbol kekuatan. Semboyan ini mengajak untuk berbuat adil, jujur, tidak diskriminatif terhadap sesama manusia, dan dengan mengedepankan perbuatan-perbuatan baik seperti di surga (Katarina dan Diana, 2020: 28). Meski semboyan ini berasal dari bahasa dan adat Dayak, tetapi tidak mengarah kepada satu macam agama tertentu, sehingga dapat diterima oleh semuanya. Diharapkan nilai yang terkandung di dalam semboyan tersebut menjadi nilai bersama yang dipegang oleh masyarakat Kalimantan Barat,

¹. Salam ini sering diucapkan pada beberapa acara baik acara resmi (formal) maupun acara tidak resmi, biasanya diucapkan pada awal pidato setelah salam pembuka yang biasa diucapkan, misalnya “assalamualaikum” atau “selamat pagi/siang/sore” dan sebagainya.

yaitu setiap langkah dalam bermasyarakat akan senantiasa menuju keharmonisan hubungan dengan tanpa membedakan suku agama dan status sosial.

Sektor pendidikan merupakan salah satu pendukung bagi upaya penanaman semangat perdamaian dan budaya damai dalam rangka pencegahan konflik. Lingkungan sekolah menjadi lahan untuk melatih siswa dalam menghadapi kehidupan masyarakat yang multikultural. Upaya dalam menyampaikan pendidikan budaya damai di sekolah yang menjadi lokus penelitian dapat diuraikan seperti di bawah ini.

Pada sekolah-sekolah negeri, yaitu SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Bengkayang dan SMAN 1 Sambas dapat terlihat pada suasana interaksi anak-anak di sekolah yang lingkungannya heterogen dari segi agama dan suku. Hal serupa juga terjadi pada SMA Bina Utama, sekolah swasta umum, dalam artian bukan di bawah yayasan keagamaan. Ketiga SMA negeri tersebut dan juga SMA Bina Utama memiliki kemiripan pola, yaitu pembiasaan doa bersama pada awal dan akhir pelajaran. Untuk menghormati siswa yang berlainan agama maka cara berdoa dipandu oleh seorang siswa dengan aba-aba tertentu, yaitu “berdoa mulai”, kemudian siswa berdoa sendiri-sendiri di dalam hati, aba-aba: “berdoa selesai”.

Hal yang berbeda dilakukan oleh sekolah swasta keagamaan, yaitu SMA St. Fransiskus Asisi Bengkayang (Katolik), SMA Shalom Bengkayang (Kristen), SMA Muhammadiyah Sambas (Islam), dan SMA St. Boneventura (Katolik). Keempat sekolah tersebut berdoa sesuai agama yang menjadi ciri khas keagamaan sekolah tersebut.

Pembacaan doa dipandu oleh seorang siswa dengan membacakan doa-doa dalam bahasa Indonesia, dan yang lain mendengarkan dan mengikuti di dalam hati. Naskah doa tersebut biasanya telah disusun oleh guru pendidikan agama untuk menjadi panduan setiap kali berdoa. Siswa yang bertugas memimpin doa dilakukan secara bergiliran. Sedangkan sekolah yang berciri khas keagamaan Islam (Muhammadiyah) dengan cara berdoa dalam lafal bahasa Arab dibaca bersama (keras). Bacaan doa dalam bahasa Arab ini sudah disusun oleh pengelola sekolah dan merupakan kebijakan dari yayasan untuk sekaligus melatih bacaan doa.

Meski terdapat beberapa siswa yang berbeda agama, pembacaan doa pada sekolah berciri khas keagamaan Katolik dan Kristen tidak menjadi permasalahan. Siswa yang beragama lain (selain Katolik dan Kristen) diperbolehkan berdoa menurut keyakinannya pada saat siswa yang memimpin doa sedang membacakan doa. Sedangkan di SMA Muhammadiyah, meski doa dibaca keras bersama-sama, tetapi tidak menimbulkan kesulitan karena seluruh siswa beragama Islam.

Toleransi beragama juga sudah dikembangkan pada semua sekolah baik sekolah negeri maupun swasta. Pelayanan sekolah terhadap siswa dilakukan tanpa membedakan siswa berdasarkan agama maupun etnisnya. Tidak ada upaya untuk mengistimewakan siswa berdasarkan agama dan etnis. Seperti dalam hal prestasi, baik dalam hal akademik maupun nonakademik, semua siswa memiliki hak sama, saling berkompetisi untuk meraih prestasinya.

Hal yang menarik terjadi di sekolah yang bernaung di bawah yayasan keagamaan Katolik di Kabupaten Bengkayang, yaitu SMA St Fransiskus Asisi. Saat pemilihan pengurus OSIS, siswa yang terpilih sebagai ketua justru siswa yang beragama Islam. Seorang pengurus OSIS mengatakan bahwa terpilihnya siswa tersebut karena di kalangan siswa, siswa tersebut dianggap mampu untuk memimpin (pengurus OSIS, wawancara, 9 Juni 2017). Pembina OSIS juga memberikan arahan dalam pemilihan agar tidak memilih berdasarkan kelompok, agama, maupun suku, akan tetapi dipilih yang benar-benar mampu memimpin dan mau bekerja untuk organisasi. Kejadian siswa Islam terpilih sebagai ketua OSIS pernah pula terjadi di SMA Shalom Bengkayang (sekolah di bawah yayasan Kristen) yang berlokasi tidak jauh dari SMA St. Fransiskus Asisi (Sibarani, wawancara, 8 Juni 2017).

Di SMAN 1 Pontianak siswa diberi motivasi dan dibimbing untuk menambah pengetahuan dan pemahaman agama melalui kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan kerohanian. Kemunculan kegiatan-kegiatan kerohanian pada beberapa agama adalah salah satu upaya pihak sekolah dalam memfasilitasi dan memacu pendalaman pemahaman keagamaan siswa-siswa. Maka kemudian muncullah forum/organisasi kerohanian, yaitu FDRM (Forum Dialog Remaja Muslim), OSK (Oratorium Siswa Katolik), dan Persiten (Persatuan Siswa Kristen). Siswa beragama selain itu, yaitu Hindu, Buddha, dan Konghucu tidak membentuk organisasi karena berjumlah sedikit. Sedangkan di SMA Bina Utama hanya ada kerohanian Islam saja. Sementara itu SMAN 1 Bengkayang tidak memiliki kegiatan ekstrakurikuler kerohanian baik Islam, Kristen maupun

Katolik. Semua kegiatan keagamaan dilaksanakan hanya pada saat jam pelajaran pendidikan agama.

Sementara itu, di sekolah-sekolah swasta keagamaan, tidak terdapat forum kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Semua kegiatan keagamaan terwadahi dalam kegiatan pendidikan agama dan program sekolah. Setiap sebulan sekali di sekolah swasta keagamaan Kristen/Katolik diadakan kegiatan bersama di gereja, dengan acara doa/ibadah dan pembinaan agama (ceramah). Meskipun bukan sebuah keharusan, semua siswa diikutkan dalam kegiatan ini. Sedangkan pada sekolah keagamaan Islam, upaya menambah pengetahuan keagamaan adalah dengan adanya mata pelajaran keagamaan tambahan selain Pendidikan Agama Islam, yaitu Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Bahasa Arab, Sejarah Islam, dan Kemuhammadiyahan. Pelajaran-pelajaran tambahan sebagai muatan lokal khusus sekolah Muhammadiyah ini tidak menjadi masalah karena semua siswa beragama Islam.

Sebagai wujud toleransi beragama maka pelaksanaan kegiatan belajar setiap hari Jumat pada sekolah-sekolah negeri dan swasta umum hanya berlangsung sampai jam 11 untuk memberi kesempatan siswa-siswa beragama Islam untuk mengikuti ibadah sholat Jumat. Sedangkan sekolah keagamaan Kristen dan Katolik di Bengkulu memberi izin siswa muslim apabila akan melaksanakan sholat Jumat dengan syarat harus menunjukkan bukti bahwa siswa tersebut benar-benar mengikuti sholat Jumat, yaitu dengan bukti tanda tangan khotib Jumat beserta menulis isi ringkas khotbah yang disampaikan. Hal yang agak berbeda pada SMA St. Bonaventura, karena sekolah ini masuk siang, yaitu pukul 13.00 WITA sampai dengan pukul 18.30

WITA. Kebetulan, tidak ada siswa beragama Islam yang belajar di sekolah ini sehingga tidak menjadi kendala.

Kegiatan-kegiatan keagamaan yang merupakan cerminan upaya sekolah memberikan layanan bagi siswa adalah dengan diadakannya perayaan atau peringatan hari besar keagamaan. Pada sekolah-sekolah negeri dan sekolah umum perayaan ini umumnya dilaksanakan untuk kegiatan halal bihalal dan peringatan Hari Raya Natal yang senantiasa dilaksanakan di sekolah. Keterlibatan semua siswa, meski berbeda agama, pada kedua kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menjalin kebersamaan dan saling memahami ajaran agama orang lain sehingga mempertebal rasa toleransi antarumat beragama. Meskipun begitu, pada saat ritual atau ceramah agama, maka siswa yang beragama lain tidak harus mengikuti.

Hal yang sedikit berbeda terjadi di SMAN 1 Bengkayang, baik pada acara Halal Bihalal maupun peringatan Natal. Pada kedua acara tersebut semua siswa harus datang. Kegiatan Halal Bihalal didahului dengan pembinaan keagamaan Islam berupa ceramah oleh guru atau ustad. Kegiatan ini diikuti oleh siswa yang beragama Islam. Sedang siswa beragama Katolik berada di ruang yang lain dan juga diberi pembinaan keagamaan yang dipandu oleh guru agama atau rohaniwan. Demikian pula dengan siswa beragama Kristen. Di ruangan yang lain, mereka juga memperoleh pembinaan dari guru agama atau rohaniwan yang didatangkan ke sekolah. Sementara itu siswa beragama Hindu, Buddha, dan Konghucu menyesuaikan. Setelah acara pembinaan tersebut selesai, semua siswa berkumpul dalam satu ruangan untuk “ramah tamah” dan berjabat tangan sebagai wujud peringatan Halal bi Halal.

SMA-SMA swasta keagamaan umumnya hanya mengadakan satu macam perayaan keagamaan sesuai dengan misi yayasannya, kecuali SMA St. Fransiskus Asisi, yang selain mengadakan peringatan hari raya agama Katolik, juga menyelenggarakan peringatan Imlek karena ada beberapa siswa yang berasal dari etnis Tionghoa beragama Konghucu atau Buddha. Meskipun demikian, perayaan Imlek ini baru dilaksanakan satu kali, yaitu pada tahun 2017 ini.

Penanaman budaya damai di sekolah juga tercermin dari visi dan misi sekolah tersebut. Semua sekolah sudah mencantumkan visi dan misi yang di dalamnya memuat nilai-nilai budaya damai, baik pada sekolah negeri maupun sekolah swasta. Secara umum visi dan misi semua sekolah adalah unggul dalam prestasi akademik dan pembinaan karakter peserta didik.

Semua sekolah baik negeri maupun swasta memiliki target mendidik siswa menjadi siswa yang memiliki prestasi akademik yang baik sehingga siswa dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal ini tercermin dari wawancara dengan pihak sekolah, bahwa 75 persen lulusan semua sekolah yang menjadi lokus penelitian ini rata-rata melanjutkan studi di perguruan tinggi. Tingginya minat melanjutkan studi ini tidak hanya pada sekolah-sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta yang berada di daerah, yaitu di Kabupaten Bengkayang dan Sambas. Apalagi saat ini pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang dan Sambas dan pemerintah pusat gencar memberi semangat bagi putra daerah untuk kuliah di perguruan tinggi dengan memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.

Tingginya animo untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi ini pada gilirannya akan menaikkan tingkat pendidikan masyarakat. Selanjutnya, dengan harapan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka tingkat keterbukaan berfikir masyarakat terhadap perbedaan budaya dan etnis semakin baik. Masyarakat yang tinggi pendidikannya akan lebih terbuka, toleran, dan mengurangi atau mengikis sikap fanatisme yang berlebihan pada etnis dan agama.

Setiap sekolah juga mengembangkan pendidikan karakter peserta didik dengan khas masing-masing sekolah. Pada sekolah negeri yang sangat heterogen maka siswa secara otomatis terlatih berinteraksi dengan siswa yang berbeda etnis dan agama. Sementara pada sekolah swasta yang cenderung homogen, pendidikan budaya damai dilaksanakan dengan memberikan pemahaman kepada peserta didik.

Edy Kiswar, Kepala SMA Negeri 1 Sambas (wawancara 6 Juni 2017) menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban sekolah untuk membangun karakter siswa, termasuk di dalamnya adalah sikap toleransi dan saling menghormati sesama manusia, termasuk perbedaan agama. Pengembangan karakter tersebut, harus dimulai dari manajemen sekolah yang profesional dan penataan lingkungan sekolah yang kondusif. Rasa damai bisa muncul apabila keamanan dan kenyamanan terwujud di lingkungan belajar. Rasa nyaman terwujud karena adanya sikap saling menghargai dan menghormati orang lain, antarsiswa dan, antarguru.

SMAN 1 Bengkayang, Shilvia Shanti (wawancara pada tanggal 9 Juni 2017) ada beberapa hal penting terkait dengan pembinaan karakter siswa. Di antaranya yaitu (1)

pihak sekolah sangat menekankan visi dan misi sekolah, bahwa visi dan misi ini bukan hanya sekedar hiasan yang terpampang di dinding, tetapi juga sering diingatkan oleh kepala sekolah dan guru dalam setiap kesempatan, (2) anak-anak juga dibiasakan setiap pagi hari sebelum memasuki ruang kelas untuk berbaris, berdoa, dan kemudian menyanyikan lagu-lagu nasional atau lagu daerah, (3) sebelum pulang sekolah siswa dibiasakan bernyanyi lagu-lagu kebangsaan dan juga berdoa, (3) menyelesaikan konflik yang terjadi sesama siswa dengan cara kekeluargaan dan damai, (4) mengembangkan kerja sama antarsiswa dalam berbagai macam kegiatan, termasuk juga kegiatan keagamaan, (5) menanamkan rasa kekeluargaan di antara semua guru dan karyawan, tidak membedakan latar belakang agama, suku, etnis, maupun ekonomi.

SMA Shalom Bengkayang merupakan SMA swasta yang berada di bawah yayasan keagamaan. Sekolah ini mengembangkan sekolah siswa berkarakter. Saking kuatnya pendidikan karakter, di sekolah ini sampai dikenal masyarakat sebagai sekolah yang disiplin dan tertib. Sekolah ini bahkan bersedia menerima siswa-siswa pindahan dari sekolah lain yang pada umumnya pindah atau dikeluarkan karena ada “masalah”. Siswa-siswa pindahan tersebut berhasil dibina dan dididik di sekolah ini. Satu kunci yang dipegang oleh pihak sekolah dan pengurus adalah bahwa jika seorang anak “masih mau datang ke gereja” maka bisa dipastikan bahwa anak tersebut masih bisa diperbaiki (Simson, wawancara, 15 Juni 2027).

SMA St. Fransiskus Asisi Bengkayang memiliki program penguatan nonakademis yaitu pengembangan seni dan budaya, berupa seni tradisional suku Dayak. Untuk itu,

sekolah membangun sanggar tari sendiri beserta peralatan musik tradisional Dayak yang cukup lengkap. Tidak ketinggalan yang merupakan faktor utama, yaitu mengangkat guru kesenian yang menguasai kesenian tradisional. Selain tarian tradisional, kesenian kerajinan khas Dayak, berupa ukir/pahat. Semua siswa dengan tanpa melihat asal etnisnya harus mengikuti kegiatan pembelajaran seni tradisional Dayak ini.

Penguatan prestasi nonakademik di SMA St. Fransiskus Asisi pada sisi lain akan sangat membantu dalam menanamkan sikap budaya damai. Hal ini karena seni tradisi tersebut bila dipahami mengandung makna yang dalam untuk kebaikan hidup manusia. Hal inilah yang menjadi salah satu penekanan guru seni di sekolah ini, yaitu agar para siswa memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam seni tradisi tersebut. Dengan penghayatan ini maka juga akan diperoleh hasil maksimal dalam membawakan kesenian.

Pada sekolah berbasis Islam yaitu SMA Muhammadiyah Sambas, pendidikan karakter yang dikembangkan adalah 5S: salam, sapa, sopan, santun, dan senyum. Pada saat masuk sekolah, siswa saling bersalaman dengan guru dan di antara sesama mereka. Sekolah juga menerapkan sistem pemanggilan anak-anak bermasalah. Apabila ada siswa yang bermasalah atau melakukan kesalahan pihak sekolah akan memanggil siswa yang bersangkutan dan menghindari memarahi siswa di depan umum. Dengan cara ini, siswa dapat diajak membicarakan masalahnya dari hati ke hati tentang sikap atau perilakunya tersebut. Umumnya cara ini lebih mengena dan menyentuh hati siswa sehingga

terjadi perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik (Suadaony, FGD 15 Juni 2017).

Siswa-siswa di SMA Muhammadiyah Sambas dilatih untuk menyambut dan menghormati tamu yang datang ke sekolah dengan sebaik-baiknya. Setiap tamu yang datang akan disambut oleh siswa yang kebetulan bertemu dan diantarkan kepada pihak yang hendak ditemui. Selain itu, siswa akan membantu memarkirkan kendaraan tamu. Hal-hal semacam ini selain menimbulkan kesan mendalam bagi tamu, juga menjadi pembelajaran bagi siswa terkait menghormati tamu (Suadaony, FGD 15 Juni 2017).

SMA St. Bonaventura Sambas mengembangkan budaya dan karakter CERDIK yang merupakan singkatan dari Cinta kasih, Empati, Rendah hati, Disiplin, Intelektual, Kerja sama. Sekolah ini sebagai lembaga pendidikan juga menekankan anak untuk hidup secara damai dengan lingkungan hidup dan sesama manusia. Dalam pendidikan perdamaian, sejak dini anak-anak diajarkan untuk tidak melakukan diskriminasi dan penghinaan terhadap orang lain. Sebaliknya, anak-anak didorong untuk memiliki rasa toleransi dan mencintai sesama manusia dan lingkungannya (Eni Veronica, FGD 13 Juni 2017). Kesadaran untuk tidak membedakan sesama orang baik di sekolah maupun di luar sekolah ini menjadi hal prioritas dalam pendidikan karakter siswa di sekolah ini. Siswa senantiasa dilatih untuk berjiwa menghargai sesamanya, empati, dan tidak dibenarkan melakukan penghinaan kepada yang lain karena perbedaan suku, agama, tingkat ekonomi, latar belakang keluarga, dan perbedaan-perbedaan lainnya.

PENDIDIKAN AGAMA SEBAGAI PENDIDIKAN DAMAI

Kebijakan Pendidikan Agama

Sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 khususnya Pasal 12 Ayat 1 memberikan amanat bahwa setiap peserta didik berhak untuk memperoleh pendidikan agama. Dengan kata lain bahwa setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk memenuhi hak peserta didiknya dalam memperoleh pendidikan agama. Dalam uraian ini akan disampaikan bagaimana penyelenggara pendidikan, dalam hal ini adalah SMA-SMA yang menjadi lokus penelitian ini, menyikapi regulasi tentang pendidikan agama. Akan tetapi, perlu disampaikan terlebih dahulu komposisi siswa SMA yang menjadi lokus penelitian ini berdasarkan agama yang dipeluk.

Tabel 5.1 Jumlah siswa berdasarkan agama

	ISLAM	KATOLIK	KRISTEN	HINDU	BUDHA	KONGHUCU	JUMLAH
SMAN 1 Pontianak	937	62	115	5	8	0	1.127
SMA Bina Utama Pontianak	356	70	24	0	0	0	452
SMAN 1 Bengkayang	148	289	170	1	20	3	631
SMA St. Fransiskus Bengkayang	21	127	34	0	14	1	197
SMA Shalom Bengkayang	7	141	232	1	4	0	385
SMAN 1 Sambas	710	31	23	1	6	8	779
SMA Muhammadiyah Sambas	325	0	0	0	0	0	325
SMA St. Bonaventura Sambas	0	83	10	0	12	7	112

Sumber: Data Siswa SMAN 1 Pontianak, SMA Bina Utama Pontianak, SMAN 1 Bengkayang, SMA St. Fransiskus Asisi Bengkayang, SMA Shalom Bengkayang, SMAN 1 Sambas, SMA Muhammadiyah Sambas, dan SMA St. Bonaventura Sambas

Pada umumnya pendidikan agama tidak menjadi kendala di SMA-SMA negeri. Artinya, setiap peserta didik memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dipeluknya dan diajarkan oleh guru yang seagama. Pelaksanaan pendidikan agama ini di SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas diadakan di ruang-ruang tersendiri yang sudah tersedia untuk kegiatan belajar agama. Untuk siswa beragama Hindu dan Buddha, karena jumlahnya sedikit dan belum memiliki guru khusus, maka pengajar didatangkan dari luar sekolah.

Hal yang berbeda terdapat di SMAN 1 Bengkayang. Sekolah ini hanya menyelenggarakan pendidikan agama

untuk Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, dan Pendidikan Agama Katolik. Sedangkan untuk siswa yang beragama Hindu, Buddha, dan Konghucu diminta memilih pendidikan agama apa yang akan diikuti. Pemilihan ini dilakukan pada saat pendaftaran siswa baru, dan sebagian besar juga mengacu pada pendidikan agama apa yang diikuti oleh siswa tersebut ketika sekolah di SMP. Jadi, hanya melanjutkan pendidikan agama yang telah diperoleh pada jenjang sebelumnya (Imaculata, wawancara, 9 Juni 2017). Dengan demikian, ada beberapa siswa yang bahkan jumlahnya cukup banyak (Hindu: 1 siswa, Buddha: 20 siswa, Konghucu: 3 siswa) yang tidak memperoleh haknya dalam pendidikan agama di sekolah ini; meskipun sekolah ini adalah sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Pola pendidikan agama di sekolah swasta umum sama dengan sekolah negeri, yaitu menyelenggarakan pendidikan agama sesuai dengan agama siswanya. Hal ini dilaksanakan oleh SMA Bina Utama Pontianak. Semua siswa memperoleh haknya mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianut dan dilaksanakan di ruangan-ruangan yang telah tersedia. Sementara itu, untuk siswa beragama Hindu, Buddha, dan Konghucu, sekolah mendatangkan guru hanya pada saat pelajaran agama.

Sekolah swasta pada yayasan berciri khas keagamaan tertentu hanya menyelenggarakan pendidikan agama sesuai dengan yayasannya. SMA St. Fransiskus Asisi dan SMA St. Bonaventura Sambas hanya menyelenggarakan Pendidikan Agama Katolik. Sementara SMA Shalom Bengkayang hanya menyelenggarakan Pendidikan Agama Kristen. Demikian pula SMA Muhammadiyah yang hanya menyelenggarakan

Pendidikan Agama Islam. Bagi SMA Muhammadiyah Sambas hal ini tidaklah menjadi persoalan karena semua siswa beragama Islam. Sedangkan untuk SMA yang lain, siswa yang memeluk agama berbeda dari ciri khas yayasan keagamaan diharuskan mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang menjadi basis sekolah tersebut.

Kebijakan yang dilakukan pada sekolah yang hanya menyediakan satu macam pendidikan agama adalah dengan cara pada saat pendaftaran siswa baru, siswa dengan diketahui oleh orang tua atau wali menandatangani persetujuan untuk mengikuti pendidikan agama sesuai dengan basis sekolah tersebut. Dengan demikian, menurut pihak sekolah, siswa mestinya sudah tahu dengan sadar ketika akan masuk sekolah, bahwa ia masuk ke sekolah bercirikan keagamaan katolik dengan segala konsekuensinya. Namun demikian, semua sekolah bercirikan keagamaan yang menjadi lokus penelitian ini senantiasa menekankan untuk saling menghormati dan saling bertoleransi kepada pemeluk agama lain. Pendidikan agama yang dilaksanakan di sekolah bercirikan keagamaan katolik atau sekolah bercirikan keagamaan kristen tidak bermaksud untuk meng-Katolik-kan atau meng-Kristen-kan peserta didik, yang terpenting mereka bisa memetik nilai-nilai kebaikan dari pendidikan agama yang diajarkan (Elsi, FGD, 12 Juni 2017).

Pendidikan Agama dan Pendidikan Budaya Damai

Uraian berikut adalah mengenai muatan nilai-nilai budaya damai dalam pendidikan agama di SMA, baik Pendidikan

Agama Islam, Pendidikan Agama Katolik, maupun Pendidikan Agama Kristen.

Pendidikan Agama Islam diselenggarakan pada sekolah-sekolah negeri, sekolah swasta umum, dan sekolah swasta yang didirikan oleh yayasan keagamaan Islam. Saat penelitian dilakukan, SMA negeri sudah menerapkan Kurikulum 2013, sedangkan SMA swasta masih menggunakan KTSP 2006.

Pada Pendidikan Agama Islam, penanaman nilai-nilai budaya damai menjadi bagian dari internalisasi ajaran Islam. Nilai-nilai budaya damai ini tidak menjadi materi kajian secara khusus, tetapi menjadi bagian dari materi-materi pembelajaran agama yang mencakup beberapa silabi materi pelajaran. Nilai budaya damai ini dapat ditemukan dalam materi terkait *akhlakul karimah*, Sejarah Kebudayaan Islam dan Sirah Nabawi (sejarah nabi), dan pengkajian ayat-ayat Al-Qur'an.

Materi-materi Pendidikan Agama Islam tersebut mengandung muatan nilai-nilai budaya damai. Materi *akhlakul karimah* berisikan pelajaran tentang perilaku yang baik yang dituntunkan oleh ajaran agama Islam, baik berperilaku dalam hubungannya dengan Tuhan, hubungan dengan manusia lainnya, maupun hubungannya dengan lingkungan semesta. Materi ini mengarah pada terwujudnya Islam *rahmatan lilalamin*, yakni tujuan diturunkannya agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Siswa melalui materi ini didorong untuk ikut pula memperhatikan hubungan antarmanusia. Jadi, bukan hanya ibadah dengan Tuhan tetapi juga hubungan dengan lingkungan, terutama mendorong kepada sikap menghargai orang lain

(Noviandi, wawancara, FGD, 14 Juni 2017; Indah, wawancara, 8 Juni 2017).

Sejarah Kebudayaan Islam dan Sirah Nabawi merupakan materi yang berkaitan dengan sejarah perkembangan Islam. Materi ini memiliki banyak deskripsi bagaimana hubungan damai yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan penerusnya dalam kaitannya dengan relasi sosial. Sikap Rasulullah terhadap *kafir dzimmi* sangat baik dan saling menghormati. Melalui materi ini diharapkan agar siswa memiliki pemikiran yang ramah, Islam yang *rahmatan lil alamin*. Sikap itu nantinya malah akan membuat Islam lebih disegani (Noviandi, FGD, 14 Juni 2017).

Nilai-nilai toleransi dan kerja sama dengan tanpa memandang suku, agama, dan status sosial seperti inilah yang senantiasa ditekankan kepada siswa-siswanya. Harapan paling besar adalah tertanamnya jiwa dan semangat menghargai, menghormati perbedaan untuk terciptanya relasi sosial yang harmonis. Dalam pengkajian ayat-ayat Al-Qur'an juga disampaikan bahwa kitab suci umat Islam ini mengandung ayat-ayat yang mendorong kepada sikap-sikap perdamaian dan kerukunan antarumat manusia dan antarumat beragama. Seperti halnya dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 yang terjemahnya berbunyi: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Ayat tersebut dapat membangun karakter toleransi. Selain itu, Surat al-Kafirun juga memberikan nilai-nilai saling

toleransi dan saling menghormati terhadap agama dan keyakinan orang lain (Noviandi, FGD, 14 Juni 2017; Ahkam, FGD, 15 Juni 2017).

Dalam Pendidikan Agama Islam, terdapat satu topik yang secara tegas dan jelas menanamkan nilai pendidikan damai, yaitu pada topik “Sejarah Dakwah Nabi Muhammad Periode Madinah”. Pada topik ini Kompetensi Inti yang hendak dicapai adalah mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerja sama, cinta damai, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

Lain halnya dengan Pendidikan Agama Katolik, Hendi, Guru Pendidikan Agama Katolik di SMA St. Fransiskus Asisi Bengkayang, mengemukakan bahwa materi Pendidikan Agama Katolik tidak semata-mata menekankan masalah ibadah ritual maupun keyakinan, tetapi sebagian besar justru mengenai pembentukan kepribadian dan karakter diri sendiri dan bagaimana seseorang seharusnya menjalin hubungan dengan sesama manusia (Wawancara tgl 9 Juni 2017).

Pada kelas X semester 1 tema utamanya tentang diri pribadi, yang meliputi: (1) pengenalan diri dengan segala kelebihan dan kekurangan, (2) memahami sebagai makhluk ciptaan Allah, dan menyadari bahwa semua makhluk adalah ciptaan-Nya, (3) menyadari diri pribadi sebagai pria dan wanita yang diciptakan Allah yang sederajat dan saling

melengkapi, (4) mengenali suara hati sebagai penuntun berbuat kebaikan, (5) kritis terhadap mass media. Sedangkan pada semester 2 tema utamanya Yesus Kristus dengan materi: (1) mengenal kitab suci, (2) mengenal Yesus dan merasa terpanggil untuk berjuang bersama Yesus, (3) mengenal Yesus yang bersedia menderita sengsara, wafat disalib, bangkit dan naik ke surga demi kebahagiaan manusia, (4) mengenal Yesus Kristus sebagai sahabat sejati, tokoh idola, Putera Allah dan Juru Selamat, (5) mengenal Roh Kudus dan mengenal Allah Tritunggal sebagai kebenaran iman Kristen (BSNP, 2006: 73-74).

Pada kelas XI semester 1 tema utamanya mengenai gereja, yang di dalamnya terdapat materi mengenai (1) arti gereja, (2) fungsi dan peranannya, (3) sifat-sifat gereja, tugas-tugas gereja, (4) keterpanggilan untuk terlibat berupa menggereja, merasul dan memperjuangkan kepentingan umum. Pada semester 2 tema pokoknya adalah kemasyarakatan dengan beberapa materi, yaitu (1) hubungan gereja dan dunia, keterlibatan dalam kegembiraan dan keprihatinan dunia, (2) memahami HAM dan keterpanggilan untuk menegakkannya, (3) memahami dan menghargai hidup baik secara pribadi dan sesamanya (BSNP, 2006: 75).

Kelas XII masih mengenai tema kemasyarakatan, pada semester 1 dengan kompetensi dasar yang ditetapkan yaitu (1) menghargai, bekerja sama, dan berdialog dengan umat beragama atau kepercayaan, (2) memperjuangkan keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan, (3) memahami dan menyadari kemajemukan dan terlibat dalam membangun masyarakat. Sedangkan pada semester 2 dengan kompetensi dasar (1) memahami peranan sebagai warga negara dan terlibat dalam pembangunan, (2) menya-

dari panggilan hidup sehingga mampu untuk menjawab panggilan tersebut (BSNP, 2006: 76).

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa sebagian besar materi Pendidikan Agama Katolik adalah mengenai hidup dan kehidupan bermasyarakat yang sangat relevan dengan pendidikan damai. Materi kelas 1 dimulai dengan pemahaman mengenai pengenalan diri pribadi, kelebihan dan kekurangannya. Hal ini sangat penting artinya dalam pendidikan damai, karena pengenalan diri sehingga mau menerima diri pribadi dengan kelebihan dan kekurangannya

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa sebagian besar materi adalah mengenai hidup dan kehidupan diri pribadi dan bermasyarakat. Banyak nilai yang dapat diambil untuk menjadi pedoman dalam menjalin relasi di masyarakat yang dalam realitas adalah majemuk. Siswa diberikan pengarahan agar sebagai anggota masyarakat, baik di tingkat kecil (RT/RW) maupun tingkat yang lebih luas (daerah/negara), ikut berperan serta dalam membangun untuk menuju kebaikan bersama. Siswa juga diberikan arahan dalam bersikap dan bertindak dalam pergaulan di masyarakat yang majemuk agar tercipta suasana lingkungan dan masyarakat yang harmonis dan menjauhkan diri dari sikap-sikap yang akan membuat permasalahan dan konflik di masyarakat.

Adanya materi-materi tersebut menjadikan Pendidikan Agama Katolik yang diikuti pula oleh siswa bukan Katolik tidak menjadi masalah, karena tetap memberikan manfaat, banyak muatan nilai yang bersifat umum sehingga dapat diambil manfaatnya untuk menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari (wawancara dengan Hendi, Guru Pendidikan

Agama Katolik, pada tanggal 19 Juni 2017). Pendidikan Agama Katolik juga memuat materi-materi yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya damai. Inti dari agama Katolik, seperti dijelaskan oleh Elsi, Guru Agama Katolik, di salah satu SMA Katolik di Sambas, bahwa Pelajaran agama katolik mengajarkan tentang budaya cinta damai, sebagai diungkapkan oleh Yesus, “Hukum pertama dan utama hukum adalah cinta kasih.” (Wawancara Elsi, Guru Pendidikan Agama Katolik, dalam FGD 13 Juni 2017).

Bahkan dalam beberapa materi yang kelasnya diikuti oleh siswa yang berlainan agama, guru justru memberikan kesempatan kepada siswa yang beragama lain untuk mempresentasikan materi terkait dalam ajaran agama mereka mereka sendiri supaya juga dikenal oleh siswa yang berlainan agama. Dengan cara ini, mereka bisa menyadari eksistensi agama lain secara langsung dari siswa yang memiliki agama tersebut sehingga memunculkan sikap saling memahami, menghormati, dan toleransi antaragama (Elsi, FGD, 13 Juni 2017).

Pada Pendidikan Agama Kristen, materi secara umum bertujuan untuk (1) memperkenalkan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan karya-karyanya agar siswa tumbuh iman dan meneladani dalam hidupnya, (2) menanamkan pemahaman tentang Allah dan karya-Nya sehingga mampu memahami dan menghayatinya, (3) menghasilkan manusia Indonesia yang mampu menghayati imannya serta berakhlak mulia di tengah masyarakat yang pluralistik. Oleh karena itu, kompetensi dasar yang hendak dicapai pada kelas X semester 1 adalah (1) menjadi pribadi yang dewasa dan memiliki karakter kokoh dengan pola pikir yang komprehensif dalam segala aspek dan (2) mengidentifikasi

berbagai pergumulan dalam keluarga dalam kaitannya dengan pengaruh modernisasi. Sedangkan pada semester 2 kompetensi yang hendak dicapai adalah (1) mengidentifikasi pergumulan dalam keluarga serta kaitannya dengan modernisasi dan (2) menjelaskan makna kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Pada kelas di atasnya, yaitu kelas XI standar kompetensinya adalah (1) mengenali dan mewujudkan nilai-nilai Kristiani, (2) mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam pergaulan, (3) mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam menghadapi gaya hidup modern, (4) memahami dan kritis terhadap perkembangan budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Standar kompetensi kelas XII adalah (1) gereja dan peranannya sebagai institusi sosial, (2) bersikap kritis terhadap peran agama dalam masyarakat, (3) bersikap kritis terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM dalam hidupnya, dan (4) mewujudkan perannya sebagai pembawa kabar baik dan damai sejahtera secara pribadi dan komunitas (BSNP, 2006: 64-68).

Memperhatikan kompetensi dasar pada Pendidikan Agama Kristen di atas maka banyak pembahasan materi yang mendukung pendidikan damai. Pada kelas X keseluruhan kompetensi yang akan dicapai pada semester 1 dan 2 bertemakan nilai-nilai Kristiani, dan memuat materi mengenai kedewasaan diri, keluarga, masyarakat, dan pengaruh modernisasi. Nilai-nilai kebaikan tersebut berlaku universal dan memiliki semangat penanaman budaya damai, karena memberikan arahan sikap dan perilaku dalam kehidupan nyata yang dihadapi saat ini. Standar kompetensi pada semester 1 dan semester 2 kelas XI adalah merespon nilai-nilai Kristiani yang diperhadapkan dengan gaya hidup modern serta perkembangan ilmu dan teknologi dan men-

jelaskan cara mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi-materi yang merupakan penjabaran Kompetensi Dasar pada kelas XI yang memberikan dukungan terhadap pendidikan budaya damai yaitu: nilai-nilai universal di masyarakat, pergaulan remaja, menggunakan masa muda, bersikap terhadap gaya hidup modern, keluarga dan masyarakat, dan perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Kelompok Kerja PAK-PGI, 2007). Tema pokok materi kelas XII masih tentang nilai-nilai Kristiani, yaitu antara lain menerangkan mengenai Gereja dan peranannya, pluralisme agama, Hak Azasi Manusia, demokrasi, dan hidup damai (Burdeni, FGD, 9 Juni 2017).

Dalam Pendidikan Agama Kristen juga terdapat materi-materi yang mendorong pada sikap perdamaian. Pelajaran agama Kristen mengajarkan untuk menghargai orang lain, sebagaimana ungkapan bahwa manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Seringkali kita yang membedakan padahal Tuhan menciptakan kita sama. Tuhan menciptakan manusia juga istimewa. Oleh karena itu, semua manusia sudah seharusnya saling menghargai dan saling menghormati (Naga, FGD, 9 Juni 2017).

Menyemai Nilai Perdamaian melalui Pendidikan Agama

Nilai-nilai perdamaian di masyarakat dapat tersampaikan salah satunya melalui jalur pendidikan agama. Pendidikan agama menjadi penting dalam hal ini karena semestinya mengajarkan perihal-perihal kebaikan dalam kepribadian dan berperilaku dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia. Semua agama memberikan pengajaran untuk

senantiasa berbuat kebaikan baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat dengan tidak memandang agama dan etnisnya.

Konflik yang terjadi di Kalimantan Barat, yang melibatkan etnis Dayak, Melayu, dan Madura, adalah konflik antaretnis. Dengan demikian secara tidak langsung adanya pengelompokan masyarakat berdasarkan etnis dan agama patut untuk menjadi perhatian bersama. Hal ini karena etnis Dayak identik dengan Katolik dan Kristen, etnis Melayu dikenal mayoritas beragama Islam, dan etnis Madura identik beragama Islam. Melihat identitas etnis dan agama serta sejarah panjang konflik dan perkembangan sosial politik pada dewasa ini, keragaman etnis dan agama berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik.

Kejadian terakhir yang memunculkan kekhawatiran akan terjadinya konflik adalah penolakan etnis Dayak terhadap tokoh agama yang akan datang ke Kalimantan Barat, karena dalam sebuah pernyataan dia dianggap melecehkan etnis Dayak dan agamanya (Hidayat, 2017). Peristiwa tersebut kemudian berlanjut dengan aksi tandingan berupa “aksi bela ulama 205” dengan melakukan demo pada tanggal 20 Mei 2017 untuk menyatakan keberatan terhadap penolakan tersebut. Aksi ini dapat berakhir dengan damai meski ada kekhawatiran terjadi konflik karena berbarengan dengan agenda besar kelompok etnis Dayak yang mengadakan pawai Gawai Dayak (Retaduari, 2017). Selain itu, masih ada kejadian dalam skala lebih kecil yang menyebabkan 199 warga terpaksa mengungsi. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Landak yang dipicu oleh kekecewaan hasil pilgub

dan ditambah dengan provokasi melalui media sosial, meski akhirnya dapat diredam (Eddy dan Abubakar, 2018).

Beberapa konflik tersebut berakibat pada jatuhnya korban jiwa dan harta. Selain itu, konflik itu juga menimbulkan kerugian yang berupa aspek nonfisik, trauma psikologis, terputusnya hubungan persaudaraan, dan kehilangan mata pencaharian. Begitu berat dan dalam luka yang diakibatkan oleh konflik, baik luka fisik, nonfisik maupun psikis yang harus dirasakan oleh kedua pihak yang bertikai. Hal ini menimbulkan kesadaran masyarakat dan berharap konflik antarkelompok masyarakat tidak terulang (Simson, wawancara 15 Juli 2017).

Berbagai peristiwa konflik menunjukkan bahwa potensi konflik di Kalimantan Barat masih saja cukup tinggi. Dalam hal ini, peran pendidikan agama adalah untuk menanamkan nilai-nilai perdamaian kepada siswa-siswa pada sekolah formal. Nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam ajaran agama dan ditanamkan kepada peserta didik diharapkan dapat memberikan jiwa dan spirit damai kepada siswa pada semua tingkatan. Penyampaian pendidikan agama yang dipenuhi pesan-pesan perdamaian diharapkan dapat mewarnai jiwa dan semangat siswa dalam menjalani kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa yang diliputi nilai-nilai perdamaian dan meminimalkan dari potensi-potensi konflik.

Pada aplikasinya di lapangan, secara faktual nilai-nilai budaya damai sudah disampaikan melalui pendidikan agama. Hal ini karena muatan pendidikan agama sudah memuat nilai-nilai perdamaian yang tercermin dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada kurikulum KTSP

atau Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013. Namun demikian, guru pendidikan agama pada umumnya belum mengetahui dan memahami pendidikan damai. Dengan demikian, guru menyampaikan materi hanya sebagai kewajiban terkait dengan target pembelajaran yang harus dicapai sesuai dengan tuntutan kurikulum. Guru belum pernah mengikuti pendidikan maupun pelatihan sehingga belum memahami esensi dan spirit dari pendidikan damai. Guru masih menyampaikan materi sebagai pendidikan agama, dan belum memiliki maksud menyampaikan pendidikan damai.

Padahal, dalam pendidikan, kesadaran akan maksud pengajaran¹ ini sangatlah penting agar tujuan pendidikan damai, baik tujuan jangka pendek (penguasaan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik) maupun tujuan jangka panjang (terciptanya masyarakat yang damai dan minim konflik) dapat tercapai. Hal ini juga yang menjadi salah satu hambatan dalam penyampaian pendidikan damai di sekolah.

Selain faktor yang berasal dari internal lingkungan sekolah di atas, hambatan penyampaian pendidikan budaya damai juga berasal dari luar lingkungan sekolah. Hambatan dari luar sekolah adalah terkait faktor historis konflik di Kalimantan Barat yang cukup panjang sehingga masih membekas di ingatan masyarakat. Residu konflik berupa

¹ Sesuai pengertian dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan adalah usaha **sadar dan terencana** untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

perasaan dendam atau ketidaksukaan terhadap etnis tertentu belum bisa hilang, apalagi bagi seseorang yang pernah terlibat langsung dalam konflik tersebut atau menjadi pihak yang dirugikan dalam konflik (kehilangan harta benda atau keluarga). Di sisi lain, masyarakat masih senang mereproduksi cerita-cerita seputar konflik yang pernah terjadi, dengan dibumbui oleh kisah kebaikan dan kehebatan etnisnya atau kisah mengenai kejahatan dan keburukan terhadap etnis lain.

Faktor eksternal lain yang dikhawatirkan ikut serta menghambat pendidikan damai adalah politik identitas. Keberadaan kelompok dan lembaga yang sarat kepentingan dapat terlihat jelas ketika terdapat ajang politik seperti pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Sejarah panjang konflik di Kalimantan Barat menyebabkan potensi pertikaian antarkelompok masih ada, dan bisa ikut mempengaruhi adanya kerawanan konflik akibat pemilu dan pilkada. Politik identitas bisa ikut mewarnai kontestasi antarkelompok untuk bersaing memperebutkan posisi elit politik. Hiruk pikuk pertikaian politik antarkelompok masyarakat tersebut langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi alam pikiran peserta didik.

PENDIDIKAN AGAMA BAGI PERDAMAIAN BANGSA

Dari uraian terdahulu ada tiga kesimpulan penting yang dapat disampaikan.

Pertama, terdapat tiga pola pendidikan agama yang dilakukan oleh SMA-SMA yang menjadi lokus penelitian ini. Ketiga pola tersebut adalah sebagai berikut (1) menyelenggarakan pendidikan agama sesuai dengan agama siswa, pola ini dilakukan oleh SMA N 1 Pontianak dan SMA Bina Utama; (2) menyelenggarakan tiga pendidikan agama, yaitu Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, dan Pendidikan Agama Katolik. Pola ini diselenggarakan oleh SMAN 1 Bengkayang. Siswa beragama Hindu, Buddha, dan Konghucu dipersilakan memilih pendidikan agama yang disediakan di sekolah. Sedangkan di SMAN 1 Sambas siswa Konghucu mengikuti Pendidikan Agama Katolik dan siswa beragama Hindu belajar agama secara privat di rumah dibimbing seorang guru; (3) menyelenggarakan satu macam pendidikan agama sesuai dengan misi sekolah/yayasannya. Pola ini dilakukan oleh SMA swasta keagamaan

yaitu SMA St. Fransiskus Asisi Bengkayang, SMA Shalom Bengkayang, SMA Muhammadiyah Sambas, dan SMA St. Bonaventura Sambas.

Kedua, pendidikan budaya damai diberikan secara terintegrasi pada pelajaran pendidikan agama. Nilai-nilai pendidikan budaya damai sudah tercantum langsung dalam materi kurikulum dan silabus meski tidak menyebut secara spesifik pendidikan budaya damai. Selain itu, nilai-nilai budaya damai juga sudah diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di sekolah, seperti peringatan hari besar agama, dan juga dilaksanakan melalui pembiasaan budaya dan kultur sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya.

Ketiga, terdapat beberapa faktor pendukung terlaksananya pendidikan budaya damai, yaitu: (1) dukungan standar isi pendidikan agama (SK-KD pada KTSP dan KI-KD pada Kurikulum 2013 pada pelajaran pendidikan agama, (2) visi misi sekolah yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan terciptanya pembiasaan budaya damai, (3) faktor guru pendidikan agama, yaitu kompetensi guru yang mendukung dan semangat dalam memberikan penanaman nilai toleransi dan kerja sama antarpenganut agama/kepercayaan, (4) kesadaran warga masyarakat untuk mengambil pelajaran terhadap kejadian konflik dan akibat-akibatnya yang sangat merugikan.

Akan tetapi, pelaksanaan pendidikan damai di sekolah juga menjumpai beberapa hambatan, yaitu (1) guru pendidikan agama belum memahami pendidikan damai, guru belum mengetahui esensi dan spirit dan tujuan pendidikan

damai sendiri, sehingga meskipun nilai-nilai pendidikan damai sudah ada dalam pendidikan agama, tetapi belum tersampaikan secara efektif sebagai pesan perdamaian untuk mencegah konflik, (2) sejarah konflik di Kalimantan Barat yang cukup panjang dan memberikan kesan mendalam di masyarakat, (3) masyarakat yang masih suka mereproduksi kisah-kisah seputar konflik yang di dalamnya juga terdapat muatan stigma negatif terhadap suatu kelompok etnis, dan (4) pengaruh negatif politik identitas dalam pemilu dan pilkada untuk memperebutkan elit politik.

Berangkat dari temuan ini, maka ada tiga rekomendasi yang dapat penulis berikan. *Pertama*, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah (sekolah negeri) seharusnya memenuhi hak siswa untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut sesuai dengan amanat undang-undang. *Kedua*, pelatihan pendidikan damai bagi kepala sekolah dan guru pendidikan agama supaya mereka dapat menyampaikan pesan-pesan perdamaian yang bukan hanya tersurat tetapi juga tersirat dalam materi pendidikan agama. Selain itu, pelatihan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang pendidikan damai. *Ketiga*, kepala sekolah membuat kebijakan untuk mendukung dan menguatkan budaya damai di sekolah. *Keempat*, kepala sekolah senantiasa mendukung terciptanya kultur sekolah yang religius. *Kelima*, pendidikan damai harus terus diupayakan bukan hanya di lingkungan sekolah tetapi juga di masyarakat karena keduanya saling mendukung. Oleh karena itu, membangun kepercayaan antaretnis harus selalu digalakkan di kalangan akar rumput (*grass root*)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. 2016. “Meneguhkan Moderasi Beragama”. Diunduh dari <http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=17325> tanggal 17 Juli 2017
- ACDP Indonesia. 2016. “Mempromosikan Budaya Damai melalui Pendidikan Agama Islam”. Diunduh dari <http://www.acdpindonesia.org/wp-content/uploads/2016/07/ACDP-Nilai-nilaidibudaya-islam-INHigh.pdf> tanggal 17 Juli 2017
- Ananta, Aris. dkk. 2016. *Demography of Indonesia's Ethnicity*. Institute of Southeast Asian Studies dan BPS.
- Arkanudin. 2005. "Menelusuri Akar Konflik Antaretnik di Kalimantan Barat". *Jurnal Mediator* 7: 186.
- Atmanto, Nugroho Eko, dkk., 2017. “Pendidikan Budaya Damai pada Pendidikan Agama SMA di Wilayah Pascakonflik (Studi di Kota Pontianak, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)”. Laporan Penelitian Balai Litbang Agama Semarang

- Azra, Azyumardi. 1998. *Agama dalam Keragaman Etnik di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Agama Departemen Agama.
- Baedowi, Ahmad. dkk. 2015. *Potret Pendidikan Kita*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet
- BPS Kalbar. 2019. *Kalimantan Barat Dalam Angka 2019*. Pontianak: BPS Kalimantan Barat
- BPS Kabupaten Bengkayang. 2019. *Bengkayang dalam Angka 2019*. Kabupaten Bengkayang: BPS Kabupaten Bengkayang
- BPS Kota Pontianak. 2019. *Kota Pontianak dalam Angka 2019*. Pontianak: BPS Kota Pontianak.
- BPS Kabupaten Sambas. 2019. *Kabupaten Sambas dalam Angka 2019*. Kabupaten Sambas: BPS Kabupaten Sambas.
- Cahyono et al. 2008. *Konflik Kalbar dan Kalteng*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Castro dan Galace. 2010. *Peace Education: a Pathway to a Culture of Peace*. Quezone City, Philippine: Centre for Peace Education Miriam College
- Chaer, Moh. Thoriqul. 2016. "Islam dan Pendidikan Cinta Damai" *Istiwa Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 2: 73-94
- Danesh, H.B. 2005. *Education for Peace Curriculum Manual: a Conceptual and Practical Guide*. Vancouver, Canada: EFP Press International Education for Peace Institute (Canada).

- Edy, Gusti, dan Abu Bakar, Faisal. 2018. “*Ricuh Hasil Pilgub Kalbar di Landak, 119 Warga Mengungsi*” *Sindonews* <https://daerah.sindonews.com>, diakses tanggal 21 Agustus 2018
- Galtung, Johan. 1969. “Violence, Peace, and Peace Research” *Journal of Peace Research* 6(3): 167-191 dalam <http://www.jstor.org/stable/422690>, diunduh pada tanggal 18 Agustus 2018.
- Geertz. 1986. “Konflik dan Integrasi” dalam *Agama, Analisa dan Interpretasi Sosiologis* oleh Roland Robrtson (Terj.) A.F. Saifudin. Jakarta: Penerbit Rajawali Press
- Haba, John. 2012. “Etnisitas, Hubungan Sosial dan Konflik di Kalimantan” *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Jakarta: LIPI.
- Hanafi, M. Muchlis. 2013. *Moderasi Islam Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama*. Jakarta: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi Al-Qur’an.
- Handoko. 2012. “Cerita Panjang Konflik dan Kekerasan”, <http://nasional.kompas.com>, diunduh pada 5 Mei 2017.
- Haryanto, Joko Tri. 2012.a. “Interaksi dan Harmoni Umat Beragama”. *Jurnal Walisongo* 20 (1): 211-234
- Haryanto, Joko Tri. 2012.b. “Dinamika Kristen Kalimantan Barat dalam Upaya Mempertemukan Dogma Kristen dengan Tradisi Tionghoa”. *Jurnal Harmoni* 11(4): 82-97

- Haryanto, Joko Tri. 2013. “Dinamika Kerukunan Intern Umat Islam dalam Relasi Etnisitas dan Agama di Kalteng”. *Jurnal Analisa* 20(1): 3-24.
- Hayadin. 2017. “Membangun Budaya Damai Berbasis Pendidikan Agama di Sekolah” Diunduh dari <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/posting/read/1738MEMBANGUN-BUDAYA-DAMAI-BERBASIS-PENDIDIKANAGAMA-DI-SEKOLAH> tanggal 17 Juli 2017
- Hidayat. 2017. *Sebut Suku Dayak Kafir, Wasekjen MUI Dihadang Pakai Mandau di Pintu Pesawat*. Dari <https://news.okezone.com> diakses pada 30 Juli 2017.
- Hidayati. 2014. “Kurikulum 2013 dan Arah Baru Pendidikan Agama Islam”. *Insania* 19 (1) : 60-86
- Ishak, Awang Faroek. 2003. *Membangun Wilayah Perbatasan Kalimantan dalam Rangka Memelihara dan Mempertahankan Integritas Nasional*. Jakarta: Indomedia.
- Jamil, M. Muhsin (ed.). 2007. *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Semarang: Walisongo Mediation Centre
- Karim, Muchit, A. 2008. “Saksi-saksi Yehuwa di Palangkaraya” dalam *Faham-faham Keagamaan Aktual dalam Komunitas Masyarakat Islam, Kristen, dan Hindu di Indonesia*. M. Atho’ Mudzhar et.al. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Halaman 291-320

- Katarina dan Diana, Ruat. 2020. *Sembongan Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata sebagai Akses Relasi Sosial Keagamaan*. Kharisma: Jurnal Teologi 1(1): 23-36.
- Kejaksanaan Republik Indonesia. 2014. "*Aliran Kepercayaan dan Keagamaan*" diunduh dari <https://www.kejaksanaan.go.id> pada tanggal 12 April 2017.
- Kelompok Kerja PAK-PGI. 2007 *Suluh Siswa 1-3: Berbuah dalam Kristus*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Liliweri. 2005. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: LKiS.
- Lincoln, Erik dan AmaLee, Irfan. 2010. *Peace Generation: 12 Nilai Dasar Perdamaian*. Bandung: Pelangi Mizan.
- Ma'arif, Syamsul. 2007. "Peace Building Melalui Pendidikan Multikultural". Dalam Musahadi dkk, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Semarang: WMC (Walisongo Mediation Centre) IAIN Walisongo.
- Masfiah, Umi. 2015. *Falsafah Damai untuk Borneo: Studi terhadap Pesan Damai dalam Karya Tiga Cendekiawan Muslim Kalbar Pasca Reformasi*. *Jurnal Smart* 01 (01) :55-67.
- Moleong, Lexy, J. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurkholis, Ahmad. 2012. "Urgensi Pendidikan Perdamaian dalam Konteks Keindonesiaan". <http://http://icrp-online.org>. diunduh pada 5 Mei 2017

- Nurwanto dan Habiby, Wahdan Najib. 2020. "Penyemaian Sikap Hidup Damai di Sekolah: Tinjauan Pendidikan Perdamaian dan Multi-Dimensi Kurikulum". *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 10(1) :1-11
- Pemerintah Kabupaten Sambas 2011 "Profil Kabupaten Sambas" dari <https://sambas.go.id> diunduh pada tanggal 17 Juni 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
- Pradana, Ridho Panji. 2017. "Video Deklarasi Damai Masyarakat Kalimantan Barat". Dari <http://pontianak.tribunnews.com> diunduh pada 16 Juli 2017.
- "Profil SMA Negeri 1 Pontianak" dari <http://schoolmap.dindikptk.net>, diakses 27 Juli 2020.
- Pruitt dan Rubin. 1986. *Social Conflict Escalation, Stalemate, and settlement*. McGraw-Hill, Inc
- Retaduari, Elsa Astari. 2017. "Sempat Ada Insiden, Gawai Dayak di Pontianak Berlangsung Damai". dari <https://news.detik.com> diunduh pada tanggal 17 Juli 2017
- Saefuddin. 2011. "Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa (Sebuah Metamorfosa Baru). *Jurnal Analisis: Jurnal Studi Keislaman*. 11(1): 17-32.
- Setyawan, Davit. "Implementasi Pendidikan Agama di Sekolah dan Solusinya" <https://www.kpai.go.id> diakses pada 27 Juli 2020.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali

- Selosoemarjan. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Stets, Jan E, and Peter J Burke. (2010). "Identity Theory and Social Identity Theory" 63 (3): 224–37. <https://doi.org/10.3102/0013189X0629800>.
- Susan Fountain. 1999. *Peace Education in Unicef*. New York United Nations: Children's Fund Programme Publications 3 UN Plaza.
- Susan, Novri. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Sukandar, dkk. 2015. *Kapasitas Lembaga dan Dinamika Pencegahan Konflik: Studi Kasus Kalimantan Barat*,. Jakarta: The Habibi Center bekerja sama dengan Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Usman, Syafaruddin. 2011. *Pontianak: Perspektif Sejarah Sosial Budaya*. Pontianak: Pustaka Dinosman.
- Varshney. 2002. "Konflik Etnis dan Civil Society. *Jurnal Harmoni* 1(2):
- "Visi Mis". <https://www.sman1-ptk.sch.id>, diakses 27 Juli 2020.
- Wibowo, A.M. 2015. *Pendidikan Multikultural di Pulau Dewata, Sebuah Bunga Rampai tentang Pendidikan Multikultural pada SMA di Provinsi Bali*. Yogyakarta: CV Arti Bumi Intaran.

Wulandari, Taat. 2010. "Menciptakan Perdamaian Melalui Pendidikan Perdamaian di Sekolah". *Jurnal Mozaik IAIN Walisongo Semarang*

Zamroni. 2008. *Kultur Sekolah*. Yogyakarta: Galvin Kalam Utama

PENGARUSUTAMAAN MODERASI AGAMA SEBAGAI PENGUATAN NILAI-NILAI BUDAYA DAMAI PADA PENDIDIKAN AGAMA

Oleh: Joko Tri Haryanto

Ringkasan Eksekutif

Budaya damai menjadi pilar penting bagi kehidupan harmoni masyarakat Indonesia yang beragama baik etnis maupun agama. Nilai budaya damai ini di antaranya bersumber dari ajaran-ajaran agama. Semua agama mengajarkan pada sikap perdamaian, toleransi, dan saling menghormati satu sama lain. Namun pemahaman keagamaan yang ditafsirkan secara ekstrim dapat menyebabkan munculnya pemahaman dan sikap keberagamaan yang intoleran, radikalisme agama, bahkan sampai terorisme. Oleh karena itu, negara perlu melakukan pengarusutamaan moderasi pemahaman keagamaan di masyarakat, yakni pemahaman keagamaan yang moderat, toleran, dan damai. Langkah strategis dalam pengarusutamaan moderasi agama adalah melalui jalur pendidikan, terutama pendidikan agama. Pendidikan agama harus memasukkan materi-materi yang relevan dengan upaya membangun pemahaman, sikap, dan kepribadian siswa dan mahasiswa yang berbudaya damai.

Materi-materi dalam pendidikan agama harus mendorong siswa dan mahasiswa kepada pemahaman keagamaan yang moderat, toleran, dan damai. Guru agama sebagai unsur penting pendidikan agama harus memiliki kompetensi dan wawasan moderasi agama sehingga mampu memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang menuju pada terciptanya budaya damai.

Lembaga yang Dituju

1. Menteri Agama
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama
6. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama
7. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama
8. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama
9. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
10. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
11. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
12. Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama
13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Isu Strategis

1. Pemahaman keagamaan yang ekstrim di kalangan siswa dan mahasiswa akan menumbuhkan pandangan dan sikap keagamaan yang intoleran dan radikalisme keagamaan.
2. Siswa dan mahasiswa harus mendapatkan pendidikan agama yang mendorong terwujudnya sikap damai, moderat, dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Penanaman nilai-nilai budaya damai harus menjadi bagian dari pendidikan karakter siswa dan mahasiswa melalui pengarusutamaan materi moderasi agama melalui pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan lainnya, serta penciptaan lingkungan belajar yang toleran dan damai.

Pengantar

Ajaran agama semestinya membawa umat manusia pada kedamaian, harmoni, dan kesejahteraan, bukan malah menimbulkan konflik, permusuhan, dan disharmoni di masyarakat. Fenomena kekerasan bernuansa agama dan bahkan terjadinya tindak pidana terorisme yang mengatasnamakan agama menunjukkan adanya pemahaman keagamaan yang tidak tepat dan pemahaman keagamaan yang cenderung ekstrim di masyarakat. Pemahaman keagamaan yang moderat, toleran, dan damai harus didorong menjadi arus utama dalam pengajaran agama di masyarakat.

Pemahaman keagamaan semestinya mendorong pada munculnya sikap, perilaku, dan karakter pribadi yang harmoni, cinta damai, toleransi, dan saling menghargai antar-sesama sebagai bagian dari budaya damai. Budaya damai merupakan kombinasi dari nilai, sikap, dan perilaku yang tidak selaras dengan kekerasan. Nilai-nilai damai dilandasi oleh prinsip kebebasan, keadilan, demokrasi, toleransi, dan kohesi sosial. Nilai-nilai yang mendasari budaya damai menolak penggunaan kekerasan untuk menghindari konflik (ACDP, 2016; Ma'arif, 2007).

Salah satu media penting dalam transformasi nilai-nilai budaya damai adalah melalui pendidikan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya kemampuan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Budaya damai merupakan hal yang inheren dalam tujuan pendidikan tersebut.

Pendidikan perdamaian (*peace education*) menurut UNICEF adalah proses memperkenalkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dibutuhkan untuk mewujudkan perubahan perilaku yang akan memungkinkan anak-anak, remaja, dan orang dewasa untuk mencegah konflik dan kekerasan, baik terbuka maupun struktural; menyelesaikan konflik secara damai; dan untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk perdamaian, baik secara

intrapersonal, interpersonal, intergroup, nasional, maupun internasional (Susan Fountain, 1999). Pendidikan perdamaian semacam ini tentu saja dapat dilakukan sebagai bagian dari materi pendidikan agama yang memang pada dasarnya mengajarkan sikap cinta, damai, penghormatan pada sesama, dan toleransi.

Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Balai Litbang Agama Semarang (Atmanto, dkk., 2017) menunjukkan bahwa pendidikan agama di SMA di wilayah Kalimantan Barat telah memiliki muatan-muatan nilai budaya damai secara tidak langsung. Kondisi penanaman nilai budaya damai dalam pendidikan agama di SMA wilayah konflik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti regulasi negara, kebijakan sekolah, kondisi lingkungan sekolah, dan konteks masyarakat. Secara umum, materi-materi pendidikan agama mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan di dalamnya secara langsung maupun tidak langsung mengandung nilai budaya damai. Namun pengaruh lingkungan sekolah seperti guru yang berinteraksi secara langsung dengan siswa sangat berpengaruh terhadap pemahaman keagamaan siswa. Faktor lain, adalah kondisi masyarakat, di mana Kalimantan Barat memiliki sejarah konflik telah mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kelompok lain di mana terjadi reproduksi stereotipe dan bahkan stigmatisasi. Faktor perkembangan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap pengetahuan keagamaan dan sosial siswa, sehingga kasus konflik sosial/politik di wilayah lain turut mempengaruhi cara pandang siswa terhadap persoalan keagamaan.

Dengan demikian, perlu adanya penguatan terhadap pendidikan budaya damai di lembaga-lembaga pendidikan,

baik sekolah maupun perguruan tinggi. Hal ini karena di perguruan tinggi juga ditengarai berkembang pemikiran keagamaan yang cenderung intoleran dan radikal (Saefuddin, 2011). Pendidikan budaya damai dapat dilakukan melalui pendidikan tersendiri maupun masuk dalam materi-materi pendidikan yang telah ada seperti pendidikan agama (Wulandari, 2010). Pendidikan agama harus turut mendorong terwujudnya nilai-nilai budaya damai yang sesungguhnya nilai-nilai tersebut terdapat dalam ajaran-ajaran agama (Hayadin, 2017). Pendidikan agama semestinya menjadi media penanaman nilai-nilai budaya damai, dan menjadi sarana bagi pengarusutamaan pemahaman keagamaan yang moderat atau moderasi agama.

Mainstreaming (pengarusutamaan) materi moderasi agama menjadi penting untuk mengarahkan pemahaman keagamaan sesuai dengan konteks kebangsaan yang majemuk, plural, dan beragam, serta konteks kenegaraan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan sistem demokrasi, serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keberagamaan yang sesuai dengan konteks tersebut adalah keberagamaan yang moderat (Hanafi, 2013). Moderasi agama memiliki beberapa karakter, diantaranya adalah (1) pemahaman keagamaan secara komprehensif, (2) keseimbangan antara ketetapan/doktrin agama dan perubahan zaman, (3) dukungan kepada kedamaian dan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan, (4) pengakuan akan pluralitas agama, budaya dan politik, dan (5) pengakuan terhadap hak-hak minoritas (diolah dari Abdillah, 2016).

Kebijakan yang Ada

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pendidikan seperti demokratis berkeadilan dan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan menyebutkan pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 yang berisi perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
6. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan

Dasar dan Menengah, Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, dan Permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.

7. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sejak tahun 2015 telah melakukan perintisan materi *Islam Rahmatan lil Alamin* dan di tahun 2017 mencaOinangkan moderasi Islam dan pembelajaran *Islam Rahmatan lil Alamin* (ISRA) sebagai arus utama (*mainstreaming*) pendidikan Islam, baik di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi.

Kebijakan Baru yang Diusulkan

1. Kementerian Agama perlu mengeluarkan regulasi untuk pengarusutamaan (*mainstreaming*) moderasi agama secara umum, tidak hanya pada pendidikan agama Islam, tetapi mencakup semua pendidikan agama sehingga siswa sekolah mahasiswa mendapatkan pemahaman keagamaan yang moderat, toleran, dan damai.
2. Kementerian Agama perlu mengeluarkan regulasi yang mendorong masuknya nilai-nilai budaya damai dalam materi pendidikan agama secara khusus di tingkat dasar, menengah dan pendidikan tinggi.
3. Kementerian Agama perlu memfasilitasi penerbitan buku-buku pengayaan bagi pendidikan agama maupun pengetahuan agama secara umum yang mendorong pada pemahaman keagamaan yang moderat, toleran, dan damai.

4. Kementerian Agama perlu melakukan pengawasan, pengendalian, dan penyeleksian buku-buku agama yang dipergunakan sebagai bahan ajar pendidikan agama baik di sekolah maupun perguruan tinggi agar tidak memuat konten yang mengarah pada pemahaman keagamaan yang intoleran, ekstrim, dan radikal.
5. Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu meningkatkan kapasitas guru dan dosen agama kaitannya dengan penguasaan materi nilai-nilai budaya damai dan moderasi agama, serta metode pengajaran yang efektif melalui pendidikan dan pelatihan, *workshop*, dan kegiatan lain.
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengeluarkan regulasi untuk penguatan nilai-nilai budaya damai pada pelaksanaan belajar mengajar di sekolah di antaranya agar memasukkan nilai-nilai budaya damai pada pelajaran-pelajaran yang relevan guna menanamkan nilai-nilai budaya damai kepada para siswa; dan mendorong budaya sekolah yang membangun lingkungan belajar yang harmoni, damai, dan toleran.
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi perlu mengeluarkan regulasi untuk penguatan nilai-nilai budaya damai pada pelaksanaan belajar mengajar di perguruan tinggi, di antaranya agar memasukkan nilai-nilai budaya damai dalam mata kuliah yang relevan, dan mendorong budaya kampus yang membangun lingkungan belajar yang harmoni, damai, dan toleran.

Berangkat dari usulan-usulan kebijakan di atas maka rekomendasi kebijakan paling penting adalah pemerintah harus melakukan pengarusutamaan moderasi agama

sebagai penguatan nilai-nilai budaya damai khususnya melalui pendidikan agama dan penciptaan lingkungan belajar yang moderat, toleran, dan damai pada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

BIODATA PENULIS

Nugroho Eko Atmanto

Peneliti Muda pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang pada bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Penulis menyelesaikan studi S2 pada program Magister Studi Islam IAIN Walisongo tahun 2010.

Karya yang dimuat dalam ilmiah yaitu “Relevansi Konsep Fajar dan Senja dalam Kitab Al Qanun Al Mas’udi bagi Penetapan Waktu Salat Isya’dan Subuh” dimuat dalam jurnal Analisa Balai Litbang Agama Semarang pada volume 19 Nomor 01 Januari-Juni 2012, “Pendidikan Damai melalui Pendidikan Agama pada Sekolah Menengah Atas di Daerah Pasca Konflik (Studi di SMA St. Fransiskus Asisi Bengkayang dan SMA Shalom Bengkayang” dimuat dalam jurnal Smart Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang pada volume 3 No. 02, Desember 2017, “Literasi Al Qur’an Siswa SMP di Jawa Timur: Capaian serta Partisipasi Orang Tua dan Masyarakat” menjadi kontributor pendukung yang dimuat dalam jurnal Suhuf volume 11 nomor 1 Juni 2018.

Joko Tri Haryanto

Peneliti Madya di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang dengan kepakaran di bidang agama dan kemasyarakatan. Penulis menyelesaikan Pendidikan S2 di Pascasarja IAIN Walisongo Semarang di Tahun 2008 pada konsentrasi Tasawuf dan Etika Islam.

Karyanya yang dimuat dalam jurnal ilmiah di antaranya: “Penguatan Toleransi dan Identitas Sosial Melalui Halalbihalal Lintas Agama Pada Masyarakat Kampung Gendingan, Yogyakarta”, ditulis bersama Aulia Rahmawati dalam Jurnal SMaRT Volume 06 Nomor 01 Juni 2020 Balai Litbang Agama Semarang; “Nilai Kerukunan pada Cerita Rakyat Dayuhan dan Intingan di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan” dimuat dalam Jurnal SMaRT Volume 04 Nomor 01 Juni 2018 Balai Litbang Agama Semarang; “Pesan Kerukunan Cerita Lisan Masyarakat Tengger Desa Ngadas Kabupaten Malang”, dimuat dalam Jurnal SMaRT Volume 02 Nomor 02 Desember 2016 Balai Litbang Agama Semarang.

Karya-karyanya dalam buku/bagian buku, antara lain: “Beragama ala Mahasiswa Milenial, Gerakan dan Relasi Keagamaan Mahasiswa Muslim dalam Konstelasi Kebangsaan”. Jakarta: LitbangDiklat Press (2019); “Prolog: Aktivisme Mahasiswa Muslim antara Gerakan Sosial dan Generasi Milenial” ditulis Bersama Zakiyah; dalam Zakiyah dan Haryanto, Joko Tri (Ed.). *Gerakan Sosial Keagamaan Mahasiswa*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran (2019); “Epilog: Corak Keagamaan Mahasiswa Milenial” dalam Zakiyah dan Haryanto, Joko Tri(ed). *Gerakan Sosial Keagamaan Mahasiswa*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran (2019); Negara

Melayani Agama dan Kepercayaan. Jakarta: LitbangDiklat Press (2019); “Pengembangan Kearifan Lokal Bagi Penyuluhan Kerukunan Beragama”, dalam Sulaiman dkk. *Belajar Kearifan Budaya Membangun Kerukunan Beragama, Sebuah Bunga Rampai Kearifan Lokal Di Jawa Tengah dan Jawa Timur*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran (2018); *Panduan Tehnis Mengurus IMB Rumah Ibadah* [ditulis bersama Setyo Boedi Oetomo]. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran (2017); “Paradoks Nasiojunalisme, Wacana Kebangsaan dalam Pandangan Jamaah Salafy Ittibaus Sunnah Klaten” dalam Haryanto, Joko Tri, dkk. *Radikalisme dan Kebangsaan, Gerakan Sosial dan Literatur Organisasi Keagamaan Islam*. Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran (2016); “Praktik Sosial Kerukunan pada Masyarakat Desa Pengalangan Kec Menganti Gresik” dalam Sulaiman, dkk. *Belajar Kearifan Budaya Membangun Kerukunan Beragama*. Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran (2015).

MENYEMAI DAMAI MELALUI PENDIDIKAN AGAMA

(Pendidikan Budaya Damai
pada SMA di Daerah Pascakonflik)

Trauma psikologi dan sosial akibat konflik tentu mengganggu proses integrasi sosial masyarakat. Salah satu jalur penting memulai fajar baru dalam membangun kembali perdamaian di masyarakat yang terkoyak oleh konflik adalah melalui penanaman nilai-nilai perdamaian. Perdamaian haruslah mendorong terwujudnya sistem sosial yang menghapus diskriminasi sosial, menegasikan kekerasan, menuntut kesetaraan dan keadilan, serta mewujudkan situasi harmoni, rukun, dan damai dalam masyarakat. Lahan yang subur untuk menyemai benih-benih perdamaian ini adalah generasi muda melalui lembaga pendidikan atau sekolah. Kegiatan belajar mengajar dan aktivitas di lingkungan sekolah dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan budaya damai. Terlebih pendidikan agama yang merupakan kompilasi ajaran-ajaran luhur ketuhanan yang berisi sikap dan budi pekerti. Bercermin dari pengalaman sekolah-sekolah di wilayah yang mengalami pengalaman konflik di Kalimantan Barat, buku ini dapat menjadi inspirasi untuk mewujudkan Pendidikan budaya damai bagi semua lembaga pendidikan.



KEMENTERIAN
AGAMA
Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Semarang

ISBN: 978-623-293-130-5



9 786232 193130 5